

PENDIDIKAN KARAKTER DAN GLOBALISASI



Dr. Drs. Ida Bagus Brata, M.Si

**PENDIDIKAN, KARAKATER, DAN
GLOBALALISASI**

Dr. Drs. Ida Bagus Brata, M.Si

Unmas Press

Pendidikan, Karakter, dan Globalisasi

Disusun Oleh :

Dr. Drs. Ida Bagus Brata, M.Si

ISBN :978-602-5872-266

Editor : Dr. Ida Bagus Nyoman Mantra, SH., S.Pd.,
M.Pd

Penerbit : UNMAS PRESS

Redaksi : Universitas Mahasaraswati

Jl. Kamboja 11A Denpasar 80233

Tlp/Fax (0361) 227019

Web.www.unmas.ac.id

Cetakan pertama : Januari 2019

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam
bentuk dan dengan cara apapun tanpa seijin dari
penerbit.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan rasa syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya serta kerja sama berbagai pihak, akhirnya buku ini dapat diselesaikan.

Buku ini merupakan hasil analisis yang mendalam terhadap kondisi saat ini mengenai pendidikan karakter di Indonesia yang menjadi komponen pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter berbasis budaya bangsa Indonesia dijadikan fondasi utama dalam menumbuhkembangkan karakter bangsa. Pendidikan difokuskan pada pelaksanaan pendidikan di jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dimana sasaran utamanya adalah meningkatkan karakter anak-anak muda agar mampu hidup secara harmoni di tengah gempuran budaya global. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian dan penulisan buku ini. Dibalik berbagai kekurangan yang ada Penulis berharap semoga buku ini ada kontribusinya dan bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan buku ini.

Denpasar, 20 November 2018

Penulis

Daftar Isi

BAB I	
Demokrasi Pendidikan Menuju Keadilan Pendidikan.....	1
BAB II	
Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Strategi Menghadapi Tantangan Arus Budaya Global.....	37
BAB III	
Membangun Pendidikan Multikultural dalam Wadah NKRI	68
BAB IV	
<i>Megeguritan</i> : Media Pendidikan Karakter Generasi Muda dalam Menghadapi Arus Budaya Global.....	112
BAB V	
Pendidikan Sejarah Sebagai Penguat karakter dalam Membangun Masa Depan Bangsa	157
BAB VI	
Pancasila Sumber Pendidikan Karakter di Tengah Arus Globalisasi.....	192
Daftar Pustaka	224

BAB I

DEMOKRASI PENDIDIKAN MENUJU KEADILAN PENDIDIKAN

I. Pendahuluan

Pada pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya Negara diamanatkan oleh UUD 1945 untuk melaksanakan pendidikan bagi warganya, antara lain dengan menetapkan tujuan-tujuan termasuk menyediakan sarannya. Salah satu wujud kinerja negara (Pemerintah Indonesia) dalam dunia pendidikan adalah sebagai pengambil sekaligus sebagai penentu kebijakan dalam bidang pendidikan. Pemerintah berkewajiban sekaligus berhak mengambil suatu kebijakan dan merekonstruksi berbagai kebijakan pendidikan sebelumnya yang tidak relevan atau yang tidak sesuai tuntutan global.

Berkenaan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan secara jelas dan tegas juga telah diuraikan dalam Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003, seperti tercantum pada pasal 4 yang menjelaskan bahwa: 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan

kemajemukan bangsa; 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Demokrasi dipahami sebagai satu sistem politik terbaik yang dipilih oleh banyak negara, karena itu demokrasi dianggap dapat memberikan banyak peluang bagi individu di masing-masing negara untuk memperoleh hak dan kewajibannya. John Dewey (dalam Rohman, 2013:7) mensinyalir bahwa negara yang demokratis adalah negara yang dapat menyediakan pemerataan kesempatan pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan bagi semua warga negaranya secara adil. Peluang dan kesempatan untuk memperoleh hak dan kewajiban

pendidikan bagi warga negaranya bertujuan untuk meningkatkan kualitas setiap individu sebagai warga negara.

Widja (2009:1) mengungkapkan bahwa permasalahan pendidikan cenderung orang melihatnya dari dua sisi, yaitu berdasarkan dimensi praktis pedagogik yaitu dimensi teknis (bagaimana caranya) dan dimensi normatif (bagaimana seharusnya). Yang pertama menyangkut berbagai strategi, proses serta tindakan untuk mengembangkan dan memungsikan pendidikan dalam masyarakat secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nasional. Sementara yang kedua, meliputi berbagai kebijakan yang berusaha merumuskan nilai-nilai kependidikan sebagai landasan mewujudkan cita-cita bersama baik dalam skala mikro (keluarga/masyarakat) maupun skala makro (kehidupan berbangsa).

Pada kebanyakan negara-negara demokrasi bersifat akomodatif terhadap kepentingan warga negaranya di bidang pendidikan. Peranan negara dalam bidang pendidikan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 adalah memberikan layanan kepada warga negara untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas diri warga negaranya agar menjadi lebih baik. Namun

demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa peranan negara dalam bidang pendidikan tersebut dilaksanakan dalam rangka melegitimasi dan mempertahankan status quo.

Negara memiliki peranan besar dalam menyelenggarakan pendidikan, mencakup kekuasaan besar dalam merencanakan, mengatur, dan mengontrol praktek pendidikan bagi warganya, sebab negara memiliki kepentingan besar terhadap pendidikan. Kepentingan negara dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu upaya untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dalam pembangunan bangsanya.

Sistem politik demokrasi diyakini sebagai sistem yang responsif kepada aspirasi masyarakat umum. Sistem demokrasi memberikan ruang kebebasan untuk berpendapat bagi warga dalam memperoleh ruang publik termasuk dalam menyuarakan aspirasinya. Melalui sistem demokrasi kekuasaan yang absolut melalui tirani mayoritas dan minoritas, kesewenang-wenangan, dan pemerintah otoritas lainnya dapat dihindari. Artinya dengan sistem politik demokrasi ini diyakini dapat dijadikan sebagai instrumen penting menuju cita-cita membangun masyarakat yang sejahtera.

Mencermati hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka upaya mewujudkan demokrasi pendidikan menuju keadilan pendidikan, dibutuhkan kondisi berkembangnya kultur demokrasi. Patut dicermati bahwa persoalan yang muncul dewasa ini tidak lagi menyangkut persoalan pemerataan pendidikan, namun lebih pada permasalahan keadilan pendidikan.

Menyangkut pemerataan kesempatan pendidikan dan kemudahan akses pendidikan sesungguhnya negara telah melaksanakan. Kenyataan ini sejalan dengan komitmen global terhadap *Millennium Development Goals* (MDGs), yang menargetkan bahwa pada tahun 2015 semua negara telah tuntas melaksanakan pemerataan akses pendidikan setidaknya pada jenjang pendidikan dasar, dan tuntutan inilah yang kemudian mendorong terjadinya pemerataan pendidikan di semua negara.

Namun faktanya di Negara Indonesia yang masih bermasalah adalah rendahnya pemerataan mutu pendidikan, menyebabkan kesenjangan mutu antar lembaga pendidikan. Kesenjangan mutu antar lembaga pendidikan menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam akses pendidikan. Permasalahan inilah yang akan dicoba dibahas dalam tulisan ini.

II. Pengertian Demokrasi

Para antropolog mengidentifikasi bahwa bentuk-bentuk protodemokrasi pertama kali diprakarsai oleh sekelompok kecil pemburu dan peramu, jauh sebelum terbentuknya masyarakat sebagai petani dengan pola hidup menetap. Dalam kelompok-kelompok yang umumnya terdiri dari 50-100 orang ini, dipersatukan karena ikatan kekeluargaan, pengambilan keputusan dilakukan melalui mufakat atau suara terbanyak, dan seringkali dilakukan tanpa pemimpin khusus. Pada kenyataannya dinamika kehidupan semacam ini masih ditemukan sampai dewasa ini pada masyarakat-masyarakat paguyuban atau desa-desa kecil.

Penelitian Brata (2005) menunjukkan bahwa ketika suatu *subak* di Bali akan menanam padi di sawah, penentuan pola tanam seperti kapan akan mulai menanam sampai menentukan jenis varietas padi yang akan ditanam adalah ditentukan oleh *krama* (warga) *subak* melalui rapat *subak* yang dipimpin oleh *pekaseh* (pimpinan *subak*). *Subak* adalah komunitas petani yang bersifat otonom dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, institusi atau lembaga tertentu.

Berdasarkan hal itu kiranya tidaklah berlebihan ada pendapat mengatakan bahwa

demokrasi dalam satu atau lain bentuk muncul secara alamiah dalam setiap kelompok atau suku yang erat bersatu. Demokrasi semacam ini umumnya diidentifikasi sebagai tribalisme, atau demokrasi primitif. Demokrasi primitif lazimnya dapat ditemukan dalam paguyuban-paguyuban atau desa-desa kecil bilamana ada pembahasan-pembahasan dalam bentuk tatap muka secara langsung dalam suatu majelis permusyawaratan desa atau bilamana ada pemimpin yang didukung oleh para tetua desa atau bentuk-bentuk pemerintahan kooperatif lainnya.

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh orang Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak tahun 4000 SM di Mezopotamia. Ketika itu bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen (Wikipedia, 2015). Di dalam negara kota inilah masyarakat sering kali berkumpul untuk mendiskusikan permasalahan dengan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus atau suara mufakat. Namun praktek-praktek pengambilan keputusan semacam ini masih digolongkan ke dalam kultural tentatif dan belum memperoleh legitimasi formal dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam catatan sejarah, demokrasi sudah ada sejak jaman Yunani Kuno. Sistem demokrasi di

Yunani kuno diperkirakan sudah dimulai abad ke-5 sampai abad ke-3 SM. Pada waktu itu masyarakat Yunani diperkirakan menganut sistem demokrasi langsung, dengan ciri-ciri bahwa keputusan-keputusan politik dibuat berdasarkan suara mayoritas warga dan dijalankan langsung oleh seluruh warga masyarakat. Kuat dugaan mengapa demokrasi yang diterapkan secara langsung dapat berjalan dengan baik, karena wilayahnya relatif kecil dengan jumlah penduduk yang masih sedikit.

Pada tahun 508 SM, masyarakat Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari lahirnya sistem demokrasi modern. Wilayah Yunani kala itu diperkirakan terdiri dari beberapa negara kota (*poleis*) yang kecil dan independen. Negara kota ini masing-masing memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang oligarkhi, monarkhi, tirani, dan demokrasi. Salah satu diantara negara kota itu adalah Athena, yang mempraktekkan sebuah model pemerintahan baru masa itu yaitu demokrasi langsung. Sistem demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada tahun 510 SM sampai tahun 27 SM.

Secara historis bahwa awal mula negara yang menerapkan demokrasi adalah negara kota (*poleis*) yang bernama Athena. Athena membangun

sistem pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi kepada warga masyarakat seluas-luasnya. Negara kota (*poleis*) merupakan suatu wilayah yang dikelola secara eksklusif oleh suatu kota dengan sistem kedaulatannya sendiri.

Pada masa itu negara kota Athena belum menerapkan prinsip dan nilai demokrasi sepenuhnya dengan memberikan ruang dan kesempatan kepada semua orang untuk mengeluarkan pendapat mereka. Kala itu, hanya kaum laki-laki saja yang dapat berpartisipasi, sementara kaum perempuan, budak, dan penduduk yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Kendatipun masih bersifat terbatas, namun praktek demokrasi di Athena telah menjadi tonggak sejarah lahirnya sistem demokrasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, gagasan dan praktek demokrasi yang diterapkan di Athena Yunani banyak menginspirasi bangsa-bangsa lain, sehingga praktek berdemokrasi semakin meluas. Pemikiran demokrasi banyak menginspirasi, misalnya bahwa setiap individu memiliki hak politik yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Dalam dimensi sosiologis muncul pemahaman bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama

satu dengan yang lain, demikian juga tentang hak milik pribadi dllnya.

Pemikiran demokrasi selanjutnya dikembangkan dengan membatasi kekuasaan pemerintahan melalui konstitusi. Konstitusi menjamin hak-hak politik warga dan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif (lembaga pemerintahan), yudikatif (lembaga peradilan), dan legislatif (parlemen).

Dewasa ini hampir semua negara-negara di dunia mengklaim telah mempraktekkan sistem demokrasi. Suatu negara telah atau belum mempraktekkan sistem demokrasi dapat diketahui apakah negara itu telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi meliputi: 1) kedaulatan rakyat; 2) pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; 3) kekuasaan mayoritas; 4) hak-hak minoritas; 5) jaminan hak asasi manusia; 6) pemilihan yang bebas dan jujur; 7) persamaan di depan hukum; 8) proses hukum yang wajar; 9) pembatasan pemerintahan secara konstitusional; 10) pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; dan 11) nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat (Abdulkarim, 2002).

Sementara Robert Dhal, seperti yang dikutip oleh Zamroni (2011:15) menyebutkan bahwa terdapat dua dimensi utama dalam demokrasi, yaitu: (a) kompetisi yang bebas di antara para kandidat; (b) partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Pertolak dari kedua prinsip itu, maka secara umum demokrasi memiliki dua ciri utama yaitu keadilan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*).

Kebebasan atau persamaan (*freedom/equality*) merupakan fondasi sistem demokrasi. Kebebasan dipandang sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan-kekuasaan penguasa politik. Demokrasi merupakan sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tanggungjawab kepada pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut.

John Dewey (Rohman, 2012) adalah pemikir utama tentang demokrasi yang diterapkan dalam bidang pendidikan. Tokoh ini berpendapat bahwa berbicara mengenai demokrasi pasti menjadi wilayah pendidikan, begitu juga sebaliknya berbicara masalah pendidikan tentu akan mengarah

pada upaya pengembangan sikap demokrasi. Pertumbuhan moral menyangkut pemilikan kapasitas personal dan kapasitas kehidupan komunal. Atas dasar itulah pendidikan menjadi variabel penting dalam menata kemajuan masyarakat.

III. Ideologi Demokrasi Pendidikan

Ideologi dapat dimaknai sebagai kumpulan ide atau gagasan. Bagus Takwin (2009:21) menyebut bahwa istilah ideologi pertama kali digunakan oleh filosof Prancis Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad 18, untuk mendefinisikan *science of idea* atau *science of thought*. Istilah itu digunakan untuk menunjuk satu metode berpikir untuk pelurusan prasangka-prasangka metafisika dan agama (abad pencerahan) dalam rangka mewujudkan pikiran yang benar serta objektif.

Pengertian ideologi yang digunakan Tracy dapat disambung dengan konsep-konsep pemikiran dari jaman sebelumnya (jaman renaissance) yang menandai kebangunan kembali pemikiran rasionalitas yang telah dirintis oleh tokoh-tokoh filosof jaman Yunani Kuno. Walaupun istilah ideologi belum digunakan pada waktu itu, namun pemikiran de Tracy bisa ditarik ke beberapa pemikir sebelumnya, seperti pemikiran Machiavelli

(abad 15/16) terutama menyangkut agama, kekuasaan, dan dominasi yang pada akhirnya juga mempermasalahkan pengaruh negatif pemikiran-pemikiran irasional bagi upaya menuju kebenaran objektif (Widja, 2009:17).

Pemaknaan ideologi yang berbeda dari sebelumnya adalah melalui pemikiran Karl Marx. Rumusan konsep ideologi yang dikemukakan oleh Marx jauh lebih lugas dan fokus, namun makna konsepnya mulai bergeser ke arah yang cenderung negatif. Dalam pandangan Marx, ideologi merupakan sistem ide yang merepresentasikan kepentingan tertentu sekaligus menyembunyikan kepentingan tersebut, dalam arti menjadikannya sebagai rasionalisasi/justifikasi, bahkan legitimasi kepentingan dari kelompok-kelompok dominan tertentu dalam masyarakat. Konsepsi ideologi dari Marx ini terkait dengan ide-ide revolusionernya terhadap kaum borjuis (orang berduit) sebagai pendukung ideologi kapitalis. Seperti hak akan kebebasan sebagai hak asasi yang dijamin oleh negara, ternyata digunakan untuk menjaga kepentingan kelompok elit, yaitu kaum borjuis itu sendiri.

Dalam ideologi kapitalis, barang hanyalah sarana untuk memperoleh uang. Semakin banyak keuntungan yang diraup oleh suatu perusahaan

menjadi jaminan dan sekaligus dapat memperkokoh kedudukannya dalam mekanisme pasar dan begitu sebaliknya. Itulah sebabnya pemilik modal (borjuis) dalam analisis Marx secara terbuka menempatkan kepentingan egoistik, yaitu kepentingan untuk meraih keuntungan diri sendiri yang selalu dikejar sebagai ukuran tertinggi (Brata, 2012: 219).

Ideologi dipandang sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu. Dalam perspektif ilmu sosial, ideologi di bedakan secara fungsional dan struktural. Secara fungsional ideologi dimaknai sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama, atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Secara struktural, ideologi dimaknai berkedudukan sebagai sistem pembenaran atas kebijakan penguasa, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Sejak awal negara ini didirikan, telah menempatkan ideologi keadilan sosial sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan. Seluruh strategi dan kebijakan pembangunan yang dipilih haruslah menuju kemaslahatan bersama. Tidak dibenarkan ada satu manusia yang lebih sejahtera secara mencolok dibandingkan dengan individu

yang lainnya, sebab keadilan sosial menjadi salah satu prasyarat sebuah keutuhan di samping pluralitas bangsa yang tinggi, sehingga tanpa ada tali keadilan niscaya keberagaman itu dapat dipelihara secara baik.

Demokrasi merupakan instrumen yang paling mungkin dipilih untuk mensejajarkan kedudukan rakyat dan negara. Dalam kaitan ini Negara Indonesia telah berpengalaman dalam menjalankan berbagai sistem politik sejak jaman kemerdekaan. Pada masa demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, Indonesia sesungguhnya hendak menampilkan pengelolaan negara yang otoriter, di mana poros negara begitu panjangnya sehingga hampir-hampir sanggup melihat seluruh gerak-gerik setiap pribadi manusia Indonesia (Suseno, 1995:23).

Pasca reformasi terjadi perubahan sistem politik menuju porsi pembagian kekuasaan yang besar kepada rakyat atas negara. Artinya demokrasi secara prosedural sudah dinikmati dengan sangat baik, dimana lembaga legislatif diberi ruang yang sangat besar untuk mengawasi kinerja eksekutif. Bercermin pada kondisi Indonesia setelah ±20 tahun reformasi, pada masa depan tampak jalan terjal berliku-liku begitu panjang terbentang.

Demokrasi yang baru secara prosedural, belum memberikan harapan cerah akan perbaikan bangsa ke depan, dan justru bangsa ini masih bergulat dan berjuang keras melawan penyakit korupsi yang semakin merajalela. Para koruptor sedikitpun tidak merasa canggung dan malu tampil di depan publik. Berdasarkan keputusan tetap pengadilan mereka dinyatakan bersalah, masuk jeruji tahanan mendapatkan fasilitas mewah, dan bisa jalan-jalan kemana mereka suka. Mereka tampil dengan begitu meyakinkan seolah-olah tidak bersalah. Tampil gagah kendatipun berbaju bertuliskan tahanan KPK, namun mereka tampak ramah sambil mengumbar senyum kepada siapa saja bak pahlawan.

IV. Pemerataan Pendidikan Menuju Keadilan Pendidikan

Penanaman nilai-nilai kultural positif yang kondusif untuk demokrasi, menjadikan implementasi demokrasi dalam praktik pendidikan merupakan suatu tuntutan sekaligus suatu keharusan. Implementasi demokrasi dalam pendidikan mencakup banyak aspek baik struktural maupun kultural. Aspek struktural menyangkut implementasi demokrasi dalam penataan dan pengadaan berbagai sarana kelembagaan

pendidikan, sementara aspek kultural menyangkut pembiasaan kehidupan sehari-hari masyarakat pendidikan, terutama dalam proses interaksi akademik.

Rohman (2013:135) mengatakan bahwa strukturisasi dan kulturisasi sistem kehidupan pendidikan menuju kehidupan yang demokratis akan mampu mendorong terwujudnya kehidupan yang kreatif, kritis, partisipatif, kohesif dan egaliter oleh aktor-aktornya dalam komunitas pendidikan, baik anak didik, guru, kepala sekolah maupun komite sekolah. Secara lebih luas dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya kualitas kehidupan pendidikan yang demokratis akan menjadi penopang praktik-praktik kehidupan demokratis yang lebih luas dalam masyarakat.

Apa yang dikemukakan Rohman di atas, tidak terlepas dengan perjalanan historis bangsa Indonesia membuktikan bahwa berdirinya Negara Republik Indonesia adalah diprakarsai oleh para intelektual yang pernah mengenyam pendidikan demokratis ala Barat. Atas dasar itu, maka implementasi demokrasi dalam pendidikan merupakan agenda penting dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan bagi masyarakat yang harus mendapat dukungan semua pihak

dalam kaitan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Demokrasi pendidikan menghormati, mengakui, menghargai, dan mengakomodasi hak setiap individu warga negara mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah telah berusaha mencari solusi agar pendidikan tidak hanya dimonopoli oleh sebagian warga negara yang memiliki kemampuan ekonomi lebih (kaya), tetapi pendidikan juga harus dapat dinikmati bagi mereka yang kurang mampu (miskin). Sebab *out put* dari proses pendidikan diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pembangunan agar Indonesia ke depan adalah Indonesia yang lebih maju dan lebih bermartabat. Hal ini sudah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 pasal 4 ayat (1) yang menekankan pentingnya pendidikan diselenggarakan secara demokratis, adil dan tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi hak asasi, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Begitu besarnya arus pemikiran yang mendorong semakin kuatnya keinginan agar demokrasi pendidikan benar-benar diimplementasikan, maka munculnya berbagai kebijakan pendidikan menjadi bagian penting

dalam otonomi daerah sebagai bentuk implementasi proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Munculnya Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang RI No.8 Tahun 2005, dan selanjutnya diubah kembali menjadi Undang-Undang RI No.12 Tahun 2008 merupakan suatu bentuk bagaimana demokrasi pendidikan dapat dilaksanakan.

Berbagai terobosan telah dilakukan dalam upaya merealisasikan demokrasi pendidikan, seperti melalui pemberlakuan Undang-Undang Pendidikan yang melahirkan berbagai instrumen kebijakan dalam wadah otonomi pendidikan. Diawali dengan munculnya Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003, disusul Undang-Undang RI No.9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang memuat tentang privatisasi Perguruan Tinggi Negeri menjadi berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sebagai pengesahan atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2000, selanjutnya lahir Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang didahului Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur sistem dan

pola pendidikan, pembiayaan pendidikan, serta kewenangan di sektor pendidikan antara pusat dan daerah.

Dengan konsep, sistem, dan pola pendidikan seperti itu sesungguhnya merupakan suatu upaya agar *out put* pendidikan dapat melahirkan insan-insan akademis dan intelektual yang diharapkan dapat membangun bangsa secara demokratis dalam persaingan global. Pendidikan harus diusahakan untuk melahirkan insan-insan cerdas yang beriman dan bertaqwa dengan harapan jangan sampai tercerabut dari akar budayanya. Pendidikan jangan sampai melahirkan insan berbudaya kkn (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Kalau hal itu terjadi berarti telah terjadi degradasi bangsa, artinya pendidikan nasional selama ini diselenggarakan bukan untuk melayani rakyat melainkan melayani kepentingan kekuasaan.

Penyelenggaraan pendidikan selama ini dikendalikan dengan irama regulasi kekuasaan. Konsep, sistem, dan pola pendidikan termasuk di dalamnya para pendidik dipaksa harus mengikuti irama kekuasaan, akibatnya penyelenggaraan pendidikan semakin jauh dari filosofi dasarnya. Menurut (Rohman, 2013:138) bahwa pendidikan yang demikian akan berimbas pada peserta didik, yakni mereka hanya memperoleh perlakuan

pendidikan dan pengalaman belajar yang tidak sesuai dengan filosofi dasarnya, begitu juga orientasi pendidikan menjadi superfisial, dan muatan isi pendidikan mengalami disproporsionalitas antara pendidikan moral keagamaan dengan pendidikan sains. Atas dasar itu, maka menjadi sangat mendesak pentingnya pemurnian kembali pendidikan menuju filosofi dasarnya, seperti salah satunya dengan mengimplementasikan demokrasi pendidikan.

Demokrasi pendidikan dewasa ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk menjadikan pendidikan sebagai instrumen dalam mewujudkan masyarakat demokratis. Kendati diakui bahwa membangun sekolah demokratis dalam upaya mewujudkan masyarakat demokratis memerlukan proses panjang.

Untuk mewujudkan sekolah demokratis memerlukan dukungan dari banyak aspek, termasuk di dalamnya dukungan ekonomi dan politik. Sebab demokratisasi dalam suatu negara tidak lepas dari dukungan ekonomi dan politik yang terjadi dalam negara yang bersangkutan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat berpengaruh dalam sektor pendidikan, terlebih lagi kondisi politik di negara yang bersangkutan.

Berpijak Pada komitmen global terhadap *Millennium Development Goals* (MDGs), seperti yang telah disinggung di atas adalah berdampak terhadap meningkatnya pemerataan pendidikan, namun yang menjadi masalah kemudian yaitu rendahnya pemerataan mutu pendidikan. Rendahnya pemerataan mutu pendidikan, menyebabkan terjadinya kesenjangan mutu antar lembaga pendidikan. Kesenjangan mutu antar lembaga pendidikan menyebabkan ketidakadilan dalam akses pendidikan.

Permasalahan ketimpangan mutu pendidikan yang dikemukakan di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan Rohman (2013:10) bahwa ketimpangan mutu pendidikan memunculkan aneka pengelompokan lembaga pendidikan, tenaga pendidik, dan siswa. Beberapa sekolah muncul sebagai sekolah favorit/unggulan, gurunya berstatus sebagai guru sekolah favorit/unggulan, siswanya berstatus sebagai siswa sekolah favorit/unggulan. Label seperti itu ternyata memunculkan elitisme pendidikan. Artinya praktek penyelenggaraan pendidikan bergerak dari sifat populis menuju elitis membuka peluang terjadinya diskriminatif terhadap pendidikan itu sendiri.

Munculnya elitisme pendidikan di Indonesia diperparah lagi dengan munculnya kebijakan

pemerintah berkaitan dengan pendirian Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 61 ayat (1) disebutkan “Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional”.

Selanjutnya peraturan ini diperkuat lagi dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 13 ayat (2), seperti berikut. “Pemerintah memfasilitasi perintisan program dan/ atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/ atau satuan pendidikan bertaraf internasional’.

Kebijakan pendirian Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pada kenyataannya telah membius masyarakat sekaligus menimbulkan pencitraan di masyarakat bahwa sekolah yang berstatus SBI adalah sekolah yang baik, dan menjelma menjadi anak emas pemerintah. Sekolah

seperti ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah, sementara sekolah yang tidak menyandang status baik seperti itu tidak jarang lepas dari pantauan pemerintah, bahkan pemerintah terkesan lepas dari tanggung jawab.

Melalui media (tv) dapat disaksikan ada sekolah yang bangku dan tempat duduknya sudah rusak, bahkan bangunannya hampir roboh, sehingga kurang layak sebagai ruang belajar. Ada sekolah yang status tanahnya tidak jelas, dan ketika digugat oleh yang empunya tanah anak-anaknya kemudian terpaksa belajar di emperan Mesjid, Surau, dan tempat-tempat lain milik masyarakat. Ironi sekolah-sekolah seperti itu, belum termasuk nasib sekolah yang ada di daerah-daerah terpencil, daerah terluar ataupun di daerah-daerah perbatasan, sarana prasarannya kurang, tenaga pendidiknyanya juga terbatas.

Di samping berpredikat sebagai sekolah baik, sekolah yang berstatus SBI ini juga diperbolehkan memunggut biaya pendidikan kepada masyarakat melebihi ketentuan dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Kebijakan atas pemberian pemunggutan biaya lebih inilah yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bagi mereka yang setuju tentu sangat mendukung kebijakan tersebut,

terutama bagi mereka yang berkepentingan terhadap kualitas bagi anak-anak mereka apalagi secara ekonomi mereka berkecukupan bahkan lebih.

Sementara bagi mereka yang tidak setuju walaupun mereka berharap kualitas baik, kebijakan itu dianggap sangat memberatkan, karena kondisi ekonomi mereka tidak sebaik mereka yang setuju. Jangankan membiayai kebutuhan sekolah anak-anak mereka, untuk bisa menyambung hidup saja mereka merasa susah. Dan sebagaimana telah diketahui, permasalahan sekolah SBI ini sampai dibawa ke ranah hukum (MK).

Model SBI ini kemudian sempat menjadi tren bahkan menjadi model beberapa sekolah lain untuk berlomba-lomba menirunya, sehingga dampak atau akibat yang mungkin terjadi adalah rendahnya motivasi dasar untuk perbaikan mutu, oleh karena lebih pada sekedar mengejar label sebagai sekolah baik.

Potret perkembangan sekolah seperti diuraikan di atas, tidak saja menimbulkan kesenjangan pendidikan dan pemerataan terhadap mutu pendidikan, namun secara perlahan tetapi pasti melegalkan maraknya pendidikan berbiaya mahal. Semula sekolah-sekolah berbiaya murah yang terjangkau oleh kalangan masyarakat kurang

mampu, oleh karena terdorong ingin dicitrakan sebagai sekolah favorit/unggulan menuju sekolah berlabel SBI, ikut-ikutan memasang tarif biaya yang tidak lagi dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat kurang mampu.

Dalam kondisi sekolah seperti itu, apakah proses pembelajaran untuk menghasilkan mutu pendidikan dapat berjalan. Atas dasar itulah demokratisasi pendidikan memerlukan dukungan politik yang dapat mengayomi upaya demokratisasi pendidikan menuju keadilan pendidikan. Secara yuridis formal, kebijakan desentralisasi pendidikan telah dilandasi oleh Undang-Undang RI No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang RI No.25 Tahun 1999 tentang pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya Undang-Undang tersebut memuat prinsip-prinsip dan arah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya dalam hal pengelolaan sektor pendidikan dengan mengacu baik pada permasalahan pembagian kewenangan maupun pada permasalahan pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara implisit di dalam Undang-Undang itu terimplikasi suatu pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dapat seiring

sejalan dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya pada tataran manajemen penyelenggaraan pendidikan saja, namun juga dalam hal pendanaan, penyediaan sarana pendidikan, membangun budaya akademik, termasuk di dalamnya menetapkan standar mutu baik standar proses maupun standar hasil proses pendidikan.

Payung hukum sebagai landasan ideal dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan sudah ada. Persoalannya sekarang adalah bagaimana merealisasikan ideasional itu, agar manfaat dari kebijakan itu dapat dirasakan bagi dunia pendidikan di seluruh pelosok negeri dalam wadah NKRI. Tidak ada anak emas dan tidak ada yang merasa termarginalkan. Di sinilah dituntut setiap komponen penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah sama-sama memiliki tekad dan komitmen membangun bangsanya melalui kebijakan pendidikan, untuk menghasilkan generasi emas pendidikan yaitu mencetak generasi bersih anti korupsi.

Pendidikan di Indonesia pasca reformasi lebih menonjolkan perspektif ekonomi. Pendekatan dalam perspektif ekonomi dipandang memiliki

peranan penting dan strategis dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa yang menjadi syarat mutlak dalam mengarungi arus percaturan global. Tersedianya SDM yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tolok ukur akan keberdayaan bangsa dalam persaingan global.

Atas dasar alasan itulah betapa pentingnya pendidikan yang menghasilkan *out put* dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya terjadi pengutamaan pendidikan yang menghasilkan insan-insan saintis dan cenderung mengabaikan pendidikan yang mengutamakan humanitas.

Berbicara masalah kebijakan mutu pendidikan pemerintah Indonesia banyak tantangan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Misalnya pelayanan pendidikan berkualitas dalam upaya meningkatkan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar untuk bisa lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurunkan jumlah angka buta aksara, memperkecil kesenjangan tingkat pendidikan antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan, antara penduduk yang tinggal di wilayah

maju dan penduduk yang tinggal di wilayah terbelakang.

Apabila dicermati ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa mutu pendidikan di Indonesia kurang mengalami peningkatan. *Pertama*, karena selama ini lembaga pendidikan lebih berfungsi sebagai pusat produksi dengan argumentasi apabila *infutnya* baik, maka *out put* yang diinginkan pasti terwujud. *Kedua*, pendidikan cenderung diselenggarakan secara birokratik sentralistik dengan menempatkan sekolah sangat tergantung pada putusan birokrasi panjang dan rumit dan pada kenyataannya sering tidak sesuai dengan kondisi sekolah. *Ketiga*, peran serta masyarakat masih sangat minim, walaupun ada hanya sebatas dalam hal dukungan dana. Artinya selama ini masyarakat lebih menuntut hasil daripada bagaimana proses pendidikan berlangsung.

Ada tiga strategi yang sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai modal dalam peningkatan mutu pendidikan. *Pertama*, strategi yang bersifat *top down* yaitu berasal dari pusat. Sasarannya jelas dan umum, terdapat pedoman, pedoman pengendalian, mekanisme kontrol, namun kelemahannya terjadi kesenjangan mutu antar sekolah cenderung semakin kuat. *Kedua*, strategi yang bersifat *buttom*

up dengan menempatkan sekolah sebagai sentra kegiatan, inisiatif dari sekolah, muncul atas potensi sekolah, namun kelemahannya terletak pada arah dan kualitas sekolah kurang seragam dan kesulitan meningkatkan kualitas secara nasional. *Ketiga*, merupakan sebuah strategi dengan menggabungkan antara strategi pertama dan kedua.

Tujuan nasional dicapai dengan berlandaskan pada kondisi lokal. Sekolah mempunyai peluang besar untuk merumuskan standar hasil yang diinginkan, dalam hal ini tentu dituntut berbagai inovasi kegiatan di sekolah. Pendekatan-pendekatan tersebut masing-masing mengandung unsur kelebihan dan kekurangan. Namun yang pasti semuanya sepakat menanti implementasi kurikulum 2013 agar dapat mendekati keadilan pendidikan.

V. Simpulan

Demokrasi pendidikan mengakui di samping mengakomodir hak setiap warga negara untuk memperoleh peluang dan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Demokrasi pendidikan tidak saja diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk menjadikan pendidikan sebagai

instrumen dalam mewujudkan masyarakat demokratis.

Demokrasi pendidikan menjadi salah satu wahana penting dalam mendinamisir penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam pemerataan mutu pendidikan. Demokratisasi pendidikan memerlukan dukungan ekonomi dan politik yang dapat mengayomi upaya demokratisasi pendidikan menuju keadilan pendidikan. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang telah beberapa kali direvisi merupakan landasan hukum penyelenggaraan demokrasi pendidikan. Di dalam Undang-Undang itu tersirat suatu prinsip dan arah baru dalam pengelolaan pendidikan. Melalui Undang-Undang tersebut sesungguhnya terimplikasi bagaimana koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, agar dapat seiring sejalan dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, sehingga keadilan pendidikan dapat dirasakan oleh semua pihak.

Daftar Pustaka

Brata, Ida Bagus. (2005). *Kearifan Subak dalam Menjaga Keseimbangan Ekologi: Studi Kasus pada Empat Subak di Desa Melinggih Kelod Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar*

- (Tesis). Denpasar: Pascasarjana Universitas Udayana.
- Brata, Ida Bagus. (2012). *Komodifikasi Telajakan dalam Era Globalisasi di Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar* (Disertasi). Denpasar: Pascasarjana Universitas Udayana.
- Rohman, Arif. (2013). *Membebaskan Pendidikan Refleksi Menuju Penyelenggaraan Demokrasi Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressinso.
- Suseno, Franz Magnis. (1995). *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Takwin, Bagus. (2009). *Akar-Akar Ideologi "Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato Hingga Bourdieu"*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Tilaar, H.A.R. (2007). *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. PT. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widja, I Gde. (2009). *Pendidikan sebagai Ideologi Budaya Suatu Pengantar ke Arah Pendidikan Kritis*. Denpasar: Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana bekerjasama dengan Sari Kahyangan Indonesia.
- Yustika, Ahmad Erani. (2003). *Negara vs. Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BAB II

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA: STRATEGI MENGHADAPI TANTANGAN ARUS BUDAYA GLOBAL

I. Pendahuluan

Pendidikan karakter dalam sistem pendidikan di Indonesia bukanlah sesuatu hal baru. Sejatinya pendidikan karakter yang dibangun dalam sistem pendidikan di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam misi pendidikan nasional bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini pendidikan karakter kembali menjadi wacana yang berkembang luas di masyarakat sebagai respons atas berbagai persoalan bangsa terutama yang berkaitan dengan masalah dekadensi moral seperti berbagai tindak kekerasan, begal, korupsi, perkelahian dan kekerasan pelajar, konflik etnis, perilaku seks bebas, perilaku lesbi, ketidakjujuran, perilaku merusak diri sendiri, penggunaan narkoba yang cenderung semakin meningkat.

Harus diakui, dari sekian banyak persoalan moral, yang tampaknya lebih memerhatikan adalah meningkatnya tindak kekerasan di kalangan remaja. Tindak kekerasan yang terjadi mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Bukan hanya siswa dan mahasiswa saja sebagai pelaku, namun justru

dilakukan oleh guru atau pendidik yang ikut menodai citra dunia pendidikan dengan melakukan tindak kekerasan atau pelecehan terhadap peserta didiknya.

Semakin berkembangnya penyakit korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan, skandal moral, dan penyimpangan yang dilakukan sebagian elit atau pejabat publik semakin terbuka di ruang publik menunjukkan betapa lemahnya karakter sebagai bangsa yang seharusnya memiliki jati diri yang kuat. Fenomena tersebut menurut Tilaar (1999) merupakan salah satu ekses dari kondisi masyarakat yang tengah berada dalam transformasi sosial menghadapi era globalisasi.

Alvin dan Heidi Toffler (1996) mengatakan bahwa dunia dewasa ini tengah dilanda gelombang perubahan kedua dan ketiga. Gelombang pertama telah terjadi sekitar 1000 tahun yang lalu dengan ditandai terjadinya revolusi pertanian yang menimbulkan perubahan dan transisi dari masyarakat dengan sistem mata pencaharian berburu dan meramu ke sistem bercocok tanam.

Gelombang perubahan kedua terjadi sekitar 300 tahun yang lalu, dengan diawali revolusi industri. Gelombang kedua ini telah dilalui oleh negara-negara Eropa, Amerika, dan negara-negara

di daerah Pasifik. Sementara itu justru gelombang kedua ini tengah melanda negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Hampir bersamaan dengan itu datang gelombang ketiga yang lazim dikenal sebagai arus budaya global yang telah merambah semua negara di dunia.

Di atas peradaban baru ini dituliskan sebuah aturan perilaku baru yang menyeret manusia di atas standarisasi, sinkronisasi, dan sentralisasi di atas konsentrasi energi, uang, dan kekuasaan. Gelombang keserakahan dan materialisme secara terus-menerus mengancam jati diri bangsa. Uang semakin menjadi sesuatu yang seakan-akan sebagai faktor penentu dalam menggerakkan budaya dan membentuk nilai-nilai dan tujuan hidup kalangan remaja.

Uang menjadi panglima dalam kehidupan manusia, tanpa uang seakan-akan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Uang menjadi segalanya, oleh karena begitu pentingnya fungsi uang, maka berbagai cara mereka lakukan untuk mendapatkan uang. Menurut Brata (2012) fenomena ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan terhadap karakter orang Bali akibat pengaruh proses moneterisasi. Uang di samping menjadi alat kegiatan ekonomi juga telah memasuki daerah budaya yang lebih luas. Uang sebagai produk

budaya memiliki makna simbolik dalam wujud nilai-nilai kualitatif.

Globalisasi dengan berbagai bentuk dan caranya berlangsung hingga jauh dan telah masuk ke sudut-sudut ruang dan tempat di seluruh pelosok negeri karena hadirnya industri, investasi individu, dan informasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Arjun Appadurai yang dikutip oleh Ritzer dan Goodman (2011:598); Ardika (2007:14); Brata (2012) bahwa arus kebudayaan global (*global cultural flow*) dapat diketahui, yakni dengan memperhatikan hubungan antara lima komponen dari ciri-ciri kebudayaan global, yaitu diistilahkan dengan: (a) *ethnoscape*, yaitu perpindahan penduduk atau orang dari suatu negara ke negara lain; (b) *technoscape*, yaitu arus teknologi yang mengalir begitu cepat dan tidak mengenal batas negara; (c) *mediascape*, media yang dapat menyebarkan informasi ke berbagai belahan dunia; (d) *Finanscape*, yakni aspek finansial atau uang yang sulit diprediksi pada era globalisasi; dan (e) *ideoscape*, yaitu komponen yang terkait dengan masalah politik seperti kebebasan, demokrasi, kedaulatan, kesejahteraan, dan hak seseorang.

Dengan adanya globalisasi permasalahan yang muncul menjadi lebih rumit dan kompleks. Kondisi ini membawa dampak positif sekaligus

dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Akibat globalisasi, kebudayaan barat yang lebih mengedepankan rasionalitas melahirkan corak kehidupan yang berorientasi materialistik-kapitalis, kesenangan (edonisme), sikap menerabas (pragmatisme), kehidupan serba bebas (liberalisme) berjumpa dengan budaya timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan spiritualitas keagamaan. Kenyataan ini merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi bagi dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini.

Apabila dicermati bahwa yang menjadi salah satu tujuan dari proses pendidikan yang diselenggarakan adalah upaya pewarisan nilai-nilai luhur bangsa yang bertujuan melahirkan generasi terdidik (generasi emas) dengan intelektualitas unggul namun tidak tercerabut dari akar budaya bangsanya. Artinya *out put* yang dihasilkan adalah *out put* yang berkeperibadian, berkarakter, dan beridentitas sebagai bangsa Indonesia. Hal ini tentu sangat sesuai dengan esensi dasar dari dua misi utama pendidikan yaitu mentrasper nilai (*transfer of values*) dan mentrasper pengetahuan (*transfer of knowledge*).

Sinergisitas tri pusat pendidikan (formal, non formal, dan informal) semestinya diberikan ruang dan tanggung jawab yang sama dalam membangun

karakter bangsa. Paradigma pendidikan berbasis masyarakat, dapat diartikan bahwa masyarakat tidak semestinya menyerahkan seluruh tanggung jawab pendidikan anak mereka kepada lembaga pendidikan formal, akan tetapi keluarga dan masyarakat wajib ikut memelihara dan bertanggung jawab terhadap proses pendidikan itu sendiri.

Ada kekhawatiran yang muncul adalah seringkali lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal dianggap kurang memiliki kemampuan menggali modal sosial dan budaya yang sebelumnya sudah tersedia sebagaimana terkandung di dalam sistem nilai, sistem norma, dan sistem budaya sebagai kearifan lokal. Namun pada kenyataannya kurang mendapat perhatian karena berbagai faktor seperti semakin pesatnya pengaruh informasi dan teknologi yang kurang dikembangkan sebagai bagian dari media pendidikan. Demikian juga ikatan-ikatan keluarga yang semakin melemah tergerus dengan perkembangan dan tuntutan jaman.

Disadari atau tidak dewasa ini sesungguhnya terdapat kekhawatiran akan merosotnya dunia pendidikan menjadi “bengkel” yang hanya menghasilkan “robot-robot” intelektual yang terampil bekerja dalam dunia industri

modern, namun kehilangan hati nurani manusia sejati. Pada hal pendidikan merupakan suatu upaya mewujudkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki keseimbangan segi intelektual dan segi watak keperibadian. Pendidikan lebih merupakan proses pembudayaan daripada proses pengalihan ilmu pengetahuan dan keterampilan semata.

Pendidikan dewasa ini dihadapkan pada situasi dimana proses pendidikan untuk pewarisan nilai-nilai kearifan lokal di satu sisi dihadapkan pada derasnya nilai global atau yang lazim disebut glokalisasi. Kondisi inilah yang menggugah kita untuk mencermati betapa penting dan urgennya memperhatikan kembali karakter bangsa Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai kebudayaan bangsa.

II. Kerangka Konseptual dan Teoretik

A. Pendidikan Karakter

Suatu komitmen untuk membumikan karakter merupakan refleksi dari instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Dalam prioritas bidang pendidikan, pemerintah memprogramkan penguatan metodologi dan kurikulum dengan tindakan

penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa.

Menurut Thomas Lickona (1992) pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya untuk membentuk keperibadian seseorang melalui pendidikan yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang berupa tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya.

Sementara itu Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (2010:2) menyatakan bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan (sekolah), dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

Selanjutnya Koesoema (2007) mengatakan pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan secara individu dan sosial dalam menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kebebasan individu itu sendiri. Atas dasar itu maka pendidikan karakter harus mampu memetakan dengan baik hubungan antara pendidikan karakter dengan pembentukan manusia ideal. Yang dikatakan sebagai manusia ideal adalah manusia yang baik secara moral, memiliki pribadi yang kuat dan tangguh secara fisik, mampu mencipta dan mengapresiasi seni, bersahaja, adil, cinta tanah air, bijaksana, beriman teguh pada Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang lazim dikenal UU Sisdiknas, merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Sejatinya tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Pendidikan budaya dalam kaitan ini diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (*belief*) manusia yang dihasilkan masyarakat. Budaya sebagai hasil cipta, rasa,, dan karsa manusia perlu dihargai, diakui, dan dilestarikan eksistensinya. Di samping itu budaya juga menandakan tentang tingkat peradaban manusia. Karakter sebagai suatu *moral excellence* atau akhlak dibangun di atas berbagai kebijakan yang pada gilirannya hanya memiliki makna ketika dilandasi atas nilai-nilai yang berlaku sebagai budaya bangsa.

Karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang dimiliki oleh warga negara bangsa Indonesia berdasarkan tindakan-tindakan yang dinilai sebagai suatu kebijakan berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan budaya dan karakter bangsa diarahkan pada upaya mengembangkan nilai-nilai yang mendasari suatu kebijakan sehingga menjadi suatu

keperibadian diri warga negara (Kemdiknas, 2011:7).

Pendidikan budaya dan karakter bangsa ini dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu pendidikan budaya dan karakter bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional (Depdiknas, 2010:7).

B. Modal Budaya

Dalam teori sistem sosial yang diajukan oleh Talcott Parson (Hamilton, 1990; Koentjaraningrat, 2008) jelas tergambar hubungan sibernetic antara sistem budaya, sistem sosial, sistem keperibadian, dan sistem organik. Sistem budaya menempati posisi sebagai supra sistem, berfungsi menata subsistem yang lain, seperti sistem sosial, sistem keperibadian, dan sistem organis.

Sebaliknya sistem organis yang menempati posisi sebagai basis sistem, berfungsi membangun sistem keperibadian, sistem sosial, dan sistem budaya. Relasi sebagai modal budaya berdimensi

abstrak mencakup unsur nilai berfungsi sebagai pola bagi maupun pola dari sikap dan perilaku manusia dalam masyarakat.

Teori tentang orientasi nilai yang dikemukakan oleh Kluckhohn (Koentjaraningrat, 2008:28) dapat dijadikan sebagai suatu modal budaya dalam memilah lima ranah atau lapangan untuk menjelaskan tentang pola-pola orientasi nilai budaya dalam suatu masyarakat. Kelima ranah atau masalah pokok itu adalah: 1) masalah hakikat orientasi manusia tentang hidup (MH); 2) masalah hakikat orientasi manusia tentang karya (MK); 3) masalah hakikat orientasi manusia tentang waktu (MW); 4) masalah hakikat orientasi manusia tentang alam sekitarnya (MA) dan; 5) masalah hakikat hubungan manusia antar sesamanya (MM). Masing-masing ranah atau lapangan mengembangkan tiga varian orientasi nilai, misalnya ada kebudayaan suatu etnis atau bangsa yang memandang hidup manusia itu pada hahikatnya suatu hal yang buruk dan menyedihkan, oleh karena itu harus dihindarkan.

Pierre Bourdieu menawarkan konsep modal budaya (Harker dkk, 2009) dengan diawali suatu pertanyaan bagaimana suatu pengetahuan dan unsur-unsur budaya disebarkan serta berpengaruh dalam suatu masyarakat. Dalam kaitan ini dengan

jelas dikemukakan terdapat keterkaitan antara modal, ranah, habitus, dan praktik.

Definisi modal bersifat sangat luas dan mencakup hal-hal material (dapat bernilai simbolik) dan abstrak, namun memiliki signifikansi secara kultural. Pierre Bourdieu secara tegas menyebut istilah modal sosial (*social capital*) dan modal budaya (*cultural capital*).

Modal sosial menunjuk pada sekumpulan sumberdaya yang aktual atau potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan saling mengenal dan saling mengakui yang memberi anggotanya dukungan modal yang dimiliki bersama. Modal sosial dapat diwujudkan dalam bentuk praktis seperti pertemanan dan dalam bentuk terlembagakan terwujud dalam keanggotaan kelompok seperti sekolah.

Sementara modal budaya merujuk pada serangkaian kemampuan atau keahlian individu, termasuk di dalamnya sikap, bertingkah laku, berpenampilan, cara bertutur kata, bergaul, dan sebagainya.

Pierre Bourdieu memaknai ranah adalah ruang sosial merupakan kekuatan yang bersifat otonom dan dinamis yang di dalamnya berlangsung perjuangan posisi-posisi yang dapat dipandang bersifat mentransformasi atau

mempertahankan kekuatan. Ranah selalu didefinisikan oleh sistem relasi obyektif kekuasaan yang terdapat diantara posisi sosial yang berkorespondensi dengan sistem relasi obyektif yang terdapat diantara titik-titik simbolik.

Habitus dapat dipahami sebagai sebuah sistem disposisi-disposisi (persepsi pikiran dan tindakan yang diperoleh dan bertahan lama). Habitus merupakan nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan bertindak atau pola berperilaku yang telah terbentuk dalam diri seseorang. Habitus juga mencakup pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang dunia yang memberikan kontribusi tersendiri pada realitas dunia itu.

Praktik sosial merupakan integrasi antara habitus dikalikan modal dan ditambahkan ranah. Praktik merupakan suatu produk dari relasi antara habitus sebagai produk sejarah dan ranah yang juga merupakan produk sejarah.

Hubungan relasional yaitu struktur obyektif dan representasi subjektif, agen dan pelaku, terjalin secara dialektik, saling memengaruhi, tidak saling menafikan, namun saling bertaut dalam sebuah praktik sosial (*social practice*) antara lain: (1) modal

ekonomi yang mencakup alat-alat produksi (tanah, buruh, mesin), materi (penghasilan) dan uang; (2) modal budaya (keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga); (3) modal sosial atau jaringan sosial; (4) modal simbolik (prestise, status, otoritas, legitimasi yang terakumulasi sebagai bentuk).

III. Pendidikan Karakter Masalah Kemanusiaan dan Kebudayaan

Para ahli ilmu sosial budaya berpandangan bahwa antara manusia dan kebudayaan terjalin hubungan yang sangat erat, sebab menjadi manusia itu sendiri merupakan bagian dari hasil kebudayaan. Hampir semua tindakan manusia merupakan produk kebudayaan, kecuali hal-hal yang bersifat naluriah.

Tindakan berupa kebudayaan itu dibiasakan dengan cara belajar melalui proses internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi atau pembudayaan. Hal ini memberikan indikasi bahwa masyarakat dan kebudayaan itu bukanlah sesuatu yang statis dan kaku, namun selalu mengalami perubahan sesjalan dengan perubahan sosial yang ada.

Hubungan antara manusia dan kebudayaan dapat dilihat dari kedudukan manusia terhadap

kebudayaannya. Dalam kaitan ini Tumanggor dkk (2014: 20-21) mengatakan bahwa manusia mempunyai empat kedudukan terhadap kebudayaan, yaitu: *pertama*, sebagai penganut kebudayaan; *kedua*, sebagai pembawa kebudayaan; *ketiga*, sebagai manipulator kebudayaan; dan *kempat*, sebagai pencipta kebudayaan.

Sebagai penganut kebudayaan seseorang hanya menjadi pelaku tradisi dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakatnya. Sebagai pembawa kebudayaan adalah pihak luar atau warga masyarakat sendiri yang membawa budaya asing atau budaya baru dalam tatanan masyarakat setempat. Hadirnya budaya baru di lingkungan mereka tentu tidak langsung dapat diterima oleh masyarakat. Sebagai manipulator kebudayaan adalah anggota masyarakat yang melakukan aktivitas kebudayaan atau mengatasnamakan budaya setempat tetapi tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Sementara sebagai pencipta kebudayaan, yaitu mendorong secara sadar maupun tidak sadar ke semua lapisan masyarakat untuk melakukan revitalisasi kebudayaan lama atau mencipta dan menemukan kembali kesepakatan baru terkait ide, aktivitas bermasyarakat, atau budaya baru yang dapat diterima secara masif.

Pada setiap rezim pemerintahan di Republik ini, sesungguhnya telah diciptakan gagasan besar yang dituangkan dalam kebijakan nasional dalam membangun karakter bangsanya. Namun dalam perjalanannya gagasan ini sering terputus dan tidak menjadi arus utama dalam pembangunan bangsa ini. Soekarno, sebagai presiden pertama republik ini menggelorakan "*Nation and Character Building*" dengan prinsip Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).

Gagasan "*Nation and Character Building*" ini begitu luarbiasa, namun karena tidak didukung strategi kebudayaan yang memadai, sehingga cenderung menjadi gagasan utopis belaka. Rezim Orde Baru dengan fokus pembangunan ekonomi dan stabilitas politik namun tidak diimbangi pembangunan karakter bangsa, bahkan terindikasi beberapa kebijakan justru memperlemah mentalitas atau karakter bangsa (pembangunan ekonomi tidak diimbangi pembangunan sumber daya manusia). Lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur ekonomi tanpa diimbangi pembangunan sektor pendidikan, akibatnya Sumber Daya manusia yang dihasilkan jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain.

Arah kebijakan yang lebih mengutamakan pembangunan ekonomi, dikhawatirkan dapat

menimbulkan kecenderungan kehidupan yang berorientasi pada materialistik, edonis, dan konsumeris yang dapat mendorong manusia hidup serakah karena cenderung dikendalikan oleh libido ekonominya. Pada konteks ini dapat dipastikan akan terjadi pergeseran sifat/karakter manusia dari *homo socius* menjadi *homo economicus* (Brata, 2012).

Dalam sistem ekonomi terdapat tiga aspek yang memainkan peranan penting bagi kehidupan manusia yaitu uang, komoditas, dan pasar. Kondisi seperti ini mengakibatkan manusia terjebak kepada pemujaan terhadap uang dan materi. Uang dijadikan panglima dalam kehidupan manusia. Tanpa uang seakan-akan manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Uang merupakan sarana ekonomi, saat digunakan dalam masyarakat difahami sebagai fenomena sosiologis, yakni cenderung kehilangan material dasarnya karena menjadi alat interaksi.

Hampir sebagian besar dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, di samping uang telah menjadi alat kegiatan ekonomi juga telah memasuki daerah budaya yang lebih luas. Moneterisasi mempengaruhi perubahan mental manusia dalam kehidupan sosialnya. Oleh karenanya uang dimaknai sebagai sebuah nilai yang dikejar oleh manusia, maka cenderung berubah fungsi dari alat menjadi tujuan.

Pada era reformasi nampaknya belum terlihat jelas kebijakan dan strategi kebudayaan untuk membangun mentalitas dan karakter bangsa. Kenyataan ini juga diperparah dengan situasi politik nasional Indonesia yang justru cenderung melahirkan manusia-manusia dengan kebudayaan menerabas atau bersifat pragmatis. Demi meraih kepentingan politik dan mobilitas diri, maka lahirlah perilaku yang menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan politik tadi. Ruang kebebasan di era reformasi ini bukannya dimanfaatkan untuk memperkuat nilai dan orientasi kebangsaan, namun cenderung dimaknai sebagai ruang ajimungpung. Ruang kebebasan itu benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan berbagai cara dan strategi untuk memenuhi segala kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Kenyataan ini secara akademik Koentjaraningrat (2008:47) pernah menyampaikan kritik terhadap kerapuhan mentalitas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dikatakan telah mengidap penyakit mentalitas, seperti meremehkan mutu, suka mengambil jalan pintas/menerabas, kurang percaya pada kekuatan diri sendiri, kurang berdisiplin murni dan suka mengabaikan tanggung jawab.

H.A.R. Tilaar (2002) menegaskan bahwa pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan landasan kebudayaan yang diwujudkan dalam nilai-nilai yang diharapkan dan berkembang dalam masyarakat. Kecenderungan masyarakat pendidikan yang mengabaikan prinsip tersebut menjadi pemicu timbulnya berbagai permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan dewasa ini. Terjadinya degradasi budaya di kalangan siswa atau remaja karena lemahnya hubungan afeksi, emosional orang tua terhadap anak-anaknya. Kenyataan ini dapat diduga sebagai salah satu penyebab hilangnya sifat keteladanan dalam meniru kelakuan etis dari orang tua atau orang dewasa dalam komunitasnya.

IV. Karakter Berbasis Budaya: Strategi Menghadapi Arus Budaya Global

Modal budaya seperti yang dipikirkan oleh Pierre Bourdieu (1987) pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai strategi edukatif dan strategi investasi simbolis karena bermaksud menghasilkan adanya perubahan perilaku sosial dalam memperbaiki suatu keadaan sebelumnya yang mengalami degradasi. Strategi edukatif dan investasi simbolis dengan memberikan peran yang nyata kepada simbol-simbol lokal untuk dapat

digunakan sebagai upaya melestarikan, meningkatkan pengakuan sosial dan legitimasi melalui reproduksi skema perencanaan yang berpihak pada kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Simbol-simbol yang dipergunakan dalam bentuk wacana keharmonisan dalam filosofi *Tri Hita Karana*, merupakan sikap hidup yang seimbang antara memuja Tuhan dengan mengabdikan pada sesama manusia, dan mengembangkan kasih sayang pada alam lingkungan. Ajaran tentang keseimbangan hidup sangat penting untuk menata kehidupan sekarang (*wartamana*) maupun untuk menata kehidupan di masa akan datang (*nagata*), yg selalu bercermin pd masa lampau (*atita*).

Mantra (1996) mengatakan disamping memiliki keunikan budaya, ada dua karakter mendasar yang menjadi keunggulan orang Bali yaitu: *taksu* dan *jengah*. *Taksu* dalam kebudayaan Bali merupakan keunggulan yang bersifat unik dan khas. Atas dasar itu, maka *taksu* dimaknai sebagai kekuatan dalam (*inner power*) dan kreativitas asli (*genuine creativity*) orang Bali. Adalah sebuah pengakuan bahwa orang Bali memiliki kreativitas yang bernilai tinggi, bahkan kreativitas yang diciptakan selalu menarik bagi orang lain (*metaksu*). Sementara itu *jengah* dalam kebudayaan Bali

dimaknai sebagai semangat untuk bersaing (*competitive pride*). Sebagai orang Bali akan merasa malu apabila tidak dapat melakukan apa yang orang lain mampu lakukan. Sifat *jengah* inilah yang mendorong orang Bali untuk selalu menciptakan karya yang lebih baik dari orang lain.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun secara kolektif. Secara personal kebudayaan berfungsi membentuk keperibadian dasar, kebanggaan diri, harkat dan martabat kemanusiaan dan makna batiniah. Secara kolektif kebudayaan berfungsi sebagai perekat solidaritas kelompok, pemberi identitas, bobot kualitatif dan wawasan dalam segenap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kebudayaan merupakan sarana manusia untuk hidup, berkembang, dan beradaptasi. Manusia menciptakan, mempelajari, mewariskan, dan mengembangkan kebudayaan sebagai sarana beradaptasi. Atas dasar itu maka kebudayaan berperan penting sebagai pola perilaku manusia dalam berbagai segi kehidupan sosial, ekonomi dan lain-lain.

Ki Hajar Dewantara (2004:172) mengatakan pendidikan dan pengajaran itu pada hakikatnya adalah usaha kultural, dengan maksud

mempertinggi hidup masyarakat pada umumnya. Sebagai usaha kebudayaan, maka pendidikan itu berusaha memberi tuntunan di dalam hidup tumbuhnya tubuh dan jiwa anak-anak, agar kelak hidup secara peribadi beserta lingkungannya mendapatkan kemajuan baik lahir dan batin menuju ke arah adab kemanusiaan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, kebudayaan merupakan dasar pendidikan. Rumusan yang diungkapkan oleh tokoh pendidikan di Indonesia ini begitu jauh ke depan. Kebudayaan yang menjadi dasar pendidikan tersebut haruslah bersifat kebangsaan sebagai buah budhinya bangsa Indonesia.

Di dalam mengajarkan nilai-nilai kearifan budaya di atas, menurut Lickona (1992) ada tiga komponen penting dalam membangun pendidikan karakter yaitu: pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*), dan perbuatan yang bermoral (*moral action*). Sasarannya adalah tiga ranah pendidikan menurut taxonomi Blum seperti berikut.

Pertama ranah kognitif yang akan membentuk kecerdasan intelektual, yaitu: mengisi otak, mengajari hal-hal yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, selanjutnya dibudayakan sehingga

menjadi kecerdasan intelegensia. *Kedua*, ranah afektif yang akan membentuk kecerdasan emosional, yaitu berkenaan dengan perasaan, emosional, pembentukan sikap di dalam diri pribadi seseorang dengan terbentuknya sikap, simpati, empati, antipati, membenci, mencintai dan lain-lain. *Ketiga*, ranah psikomotor yang akan membentuk kecerdasan psikomotorik, yaitu berkenaan dengan aksi, perilaku, dan perbuatan seseorang.

Sesungguhnya apa yang disampaikan di atas tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal dengan konsep trikonnnya, seperti: 1) kemajuan kebudayaan harus berupa keberlanjutan kehidupan kebudayaan sendiri (kontinuitet); 2) menuju adaptasi dengan kebudayaan dunia (konvergensi); dan 3) tetap mempunyai sifat keperibadian di dalam lingkungan kemauan (konsentrisitet).

Berdasarkan tiga ranah yang telah disampaikan maka alur dan proses pendidikan karakter sangat jelas diawali dengan penanaman pengetahuan tentang sesuatu, tumbuh dan dimilikinya sikap tentang sesuatu, selanjutnya bersikap dan berperilaku sesuai dengan apa yang telah diketahuinya. Dalam kaitan ini penting

disadari bahwa ketiga ranah ini tidak diartikan asal berpengetahuan, bersikap, dan berbuat.

Namun bagaimana seseorang dengan pengetahuan yang dimiliki mampu membedakan tentang yang baik dan yang buruk. Selanjutnya bagaimana seseorang menyikapi tentang yang baik dan buruk itu, sehingga tumbuh sikap mencintai yang baik dan menjauhi yang buruk. Pada tingkat berikutnya bertindak, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, sehingga terbentuklah akhlak dan karakter mulia.

Dalam bahasa Inggris dikenal istilah *The Humanities* dan *Basic Humanities*. *The Humanities* adalah pengetahuan budaya, yakni kepandaian dan keterampilan dalam bidang seni dan filsafat merupakan bagian dari upaya perwujudan cita-cita humanities pendidikan. Dengan kata lain bahwa peserta didik dididik untuk menjadi lebih manusiawi karena menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Sementara *Basic Humanities* lebih merupakan suatu upaya untuk menanamkan pengetahuan dasar dan pengertian umum dalam diri setiap peserta didik mengenai masalah-masalah kemanusiaan dan kebudayaan. Dengan pengetahuan dasar dan pengertian umum yang diperoleh melalui proses pendidikan, maka *out put*

yang diharapkan mampu mengkaji dan memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dan kebudayaan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks di atas penting untuk dipahami tentang kapital budaya seperti yang diungkapkan oleh Pierre Bourdieu (1987) yang menyebutkan tentang tiga bentuk kapital budaya, seperti: kapital budaya terdapat dalam kondisi yang berwujud (*embodied*) (gaya penampilan, model bicara, kecantikan dsbnya), dibendakan (*objectified*) (gambar-gambar budaya seperti gambar, buku mesin, bangunan dsbnya), dan yang dilembagakan (*institution-alized*) (seperti kualifikasi pendidikan)

Lebih lanjut Pierre Bourdieu, menekankan betapa pentingnya modal sosial dan modal kultural di dalam pembangunan individu maupun masyarakat. Individu dengan habitusnya menginternalisasikan kebiasaan-kebiasaan yang diberikan oleh kebudayaan terhadap individu. Kendatipun demikian individu bukanlah semata-mata duplikasi dari komunitasnya. Walaupun habitus-habitus itu sebagian besar bersifat irasional, namun habitus telah memberikan kepada individu suatu kemampuan untuk berpikir dan bereaksi

secara seponan yang sesungguhnya telah disiapkan oleh budaya bagi individu.

Namun tidak terbantahkan pada era kesejagatan dewasa ini melalui pendidikan telah melahirkan habitus-habitus baru yang memungkinkan seseorang untuk mengubah isinya ke dalam budaya industri dan komunitasnya sendiri. Dalam aktivitas individu berinteraksi dengan komunitasnya secara irasional lahir modal sosial yang memberi peluang kepada individu bekerjasama, berinteraksi, membangun kepercayaan dalam mencapai cita-cita bersama di dalam komunitasnya. Modal sosial dapat memperkuat kepercayaan dan toleransi dalam masyarakat pluralis. Inilah yang menjadi tuntutan di dalam kehidupan masyarakat demokratis yaitu berupa pengakuan terhadap adanya perbedaan dan persamaan di dalam hidup bermasyarakat.

Seperti yang telah disinggung di depan, bahwa kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari merupakan *mode for action* (pola bagi) tindakan dan sekaligus sebagai *mode of action* (pola dari) tindakan dalam kehidupan kolektif manusia, olehkarena itu maka akan terjalin antara apa yang seharusnya berproses dengan apa yang senyatanya ada baik dalam bentuk kesamaan maupun perbedaan.

Koentjaraningrat (1998) mengatakan bahwa kebudayaan itu berwujud dalam tiga bentuk, yaitu: 1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya; 2) wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat; dan 3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dengan pemaknaan dan memosisikan demikian pentingnya kebudayaan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, maka institusi-institusi sosial yang ada di masyarakat dapat dijadikan sebagai sarana dan media menanamkan nilai-nilai luhur bangsa sekaligus pembentukan karakter manusianya.

Derasnya arus budaya global dan modernisasi dikhawatirkan dapat mengakibatkan terkikisnya rasa kecintaan terhadap nilai-nilai kebudayaan bangsa. Kebudayaan yang merupakan warisan leluhur bangsa dikhawatirkan begitu mudah tergerus oleh budaya asing, terlupakan oleh pewarisnya, dan bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi semakin banyak generasi penerus bangsa yang tidak mengenali lagi budaya daerahnya sendiri. Banyak dikalangan mereka yang lebih bangga dengan karya-karya asing, bergaya hidup konsumeris, hedonis daripada dengan kearifan budaya bangsanya.

Pendidikan karakter sebagai bagian dari transformasi kebudayaan dapat dijadikan sebagai kekuatan potensial dan aktual dalam berinteraksi dengan kebudayaan global dan sekaligus untuk membangun bangsa yang berkeadaban. Pendidikan karakter berbasis kearifan budaya diharapkan dapat membangun wawasan kebangsaan dalam konteks multikultur kebudayaan Indonesia. Untuk terwujudnya hal itu, pendidikan menempati posisi sentral dalam menata kembali sistem sosial budaya yang fundamental.

Dalam perspektif psikologi budaya, bahwa proses transmisi budaya yang berlangsung melalui pendidikan mengindikasikan adanya cita-cita universal agar dalam proses pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda berlangsung adanya kesinambungan keperibadian dasar serta unsur-unsur pokok dari kebudayaan yang bersangkutan.

V. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas beberapa hal dapat disimpulkan seperti berikut.

- 1) Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Pendidikan merupakan produk kebudayaan. Kebudayaan yang menjadi dasar pendidikan haruslah bersifat

kebangsaan sebagai buah budhinya bangsa Indonesia. Melalui pendidikan kebudayaan diciptakan, dipelajari, diwariskan dan diteruskan dari generasi ke generasi.

- 2) Pendidikan berusaha mentransformasikan nilai-nilai budaya untuk kemajuan baik individu maupun masyarakat menuju arah adab kemanusiaan.
- 3) Pada era keterbukaan dan dinamika masyarakat baik dinamika lokal, nasional, dan global timbulnya berbagai dampak tidak mungkin dihindari. Dalam hal ini pelaksanaan pendidikan karakter berbasis budaya dapat dijadikan strategi edukatif dan strategi investasi simbolis dengan disertai upaya-upaya mewujudkan lingkungan sosial yang kondusif baik di keluarga, sekolah maupun di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ardika, I Wayan. (2007). *Pusaka Budaya & Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Brata, Ida Bagus. (2012). *Komodifikasi Telajakan pada Era Globalisasi di Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar* (Disertasi). Denpasar: Pascasarjana Universitas Udayana.

- Geriya, I Wayan. (2000). *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*. Denpasar : Unit Percetakan Bali.
- Harker, Richard, Cheelen Mahar, dan Chris Wilkes (ed)(2009). *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik Pengantar paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu* (Penerjemah Pipit Maizier). Yogyakarta: Jalasutra.
- Ki Hajar Dewantara. (1994). *Kebudayaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Ki Hajar Dewantara. (2004). *Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Koentjaraningrat. (2008). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koesoema, Doni A. (2007). *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Lickona. Thomas. (1992). *Educating for Character. How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: A Bantam Book.
- Mantra, I B. (1996). *Bali Masalah Sosial dan Modernisasi*. Denpasar: PT Upada Sastra.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2011). *Teori Sosiologi Modern* (Dialihbahasakan oleh Alimandan). Jakarta: Kencana.

- Tilaar, H.A.R. (2007). *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

BAB III

MEMBANGUN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM WADAH NKRI

I. Pendahuluan

Dalam konteks sejarah republik tercinta ini dibangun sebuah negara merdeka yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri republik ini sesungguhnya telah menyadari bahwa ada kemajemukan sebagai sebuah realitas sosial budaya yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya. Ratusan jumlah etnis, budaya, adat istiadat, stratifikasi sosial, bahasa maupun agama yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menjadi aset bangsa dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jauh sebelum Negara Republik Indonesia diproklamkan, bangsa-bangsa di nusantara ini telah mengakui dan merayakan perbedaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika sebagai manifesto politik kebudayaan bangsa Indonesia merupakan bukti adanya pengakuan dan penghargaan bangsa Indonesia atas kemajemukan, pluralitas, dan perbedaan tersebut.

Indonesia tercinta adalah wujud sebuah negara yang memayungi masyarakatnya yang

majemuk, multi etnis, multikultur, dan multidimensional. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang satu dalam kemajemukan, eka dalam kebhinekaan, terjalin dalam kesatuan yang utuh dalam satu wadah yang dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selama lima dasa warsa, bangsa ini boleh dibilang aman-aman saja, walau di sana sini terdapat gesekan-gesekan yang dinilai tidak menjurus kepada terpilah dan terbelahnya keutuhan/disintegrasi bangsa. Namun setelah terbebas dari keterpasungan selama lebih kurang tiga dasa warsa dalam kungkungan “Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto yang sentralistik dan otoriter” (Bagus, 2003).

Lebih lanjut Bagus mengatakan dengan dibukannya kran demokrasi (keterbukaan) dalam era reformasi, keadaan NKRI menjadi lebih banyak berubah. Di sana sini muncul raja-raja kecil yang gigih dan gagah berani mengklaim wilayah kekuasaannya dalam semua lini kehidupan. Klaim putra daerah, kaum pendatang, kaum imigran, etnis itu dan ini, suku, agama ini dan itu menjadi diskursus yang menarik untuk disimak. Bahkan kasus konkrit yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia saat ini adalah masalah perlindungan atas hak-hak kaum minoritas, baik minoritas

eksternal (Kristen, Hindu, dan Budha) atau minoritas internal (sekte Ahmadiyah, siyah).

Pluralisme yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sesungguhnya harus disyukuri sebagai rahmat Tuhan yang membentuk mozaik ke-Indonesia-an yang sangat unik, menarik, mempesona, dan menakjubkan. Namun apa yang terjadi, Indonesia dalam kekiniannya tengah bergelut dengan situasi yang carut marut. Kebhinekaan seakan tidak lagi terikat dalam simpul keikaan.

Belum hilang dari ingatan sebagian besar rakyat Indonesia, kasus demi kasus muncul silih berganti, mulai dari Aceh, Poso, Ambon, Sampit, Papua, Lombok, Lampung, Madura semuanya larut dalam konflik yang sangat memprihatinkan. Belum lagi tindakan anarkis lainnya seperti peledakan bom di Legian Bali, Jakarta, Ujung Pandang, amuk massa, penjarahan, demo atau unjuk rasa dan lain-lainnya. Demikian juga bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa, tanah longsor, ekuipaksi dan tsunami kerap melanda bagian-bagian wilayah Indonesia tercinta.

Tidak itu saja, pelaksanaan pemilihan umum kembali menorehkan catatan buruk. Ajang yang seharusnya menjadi tempat memilih calon pemimpin secara demokratis, justru berubah

menjadi kerusuhan. Disinyalir ada beberapa faktor yang memicu konflik pemilu. *Pertama*, penyelenggara pemilu terkadang tidak netral. *Kedua*, daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah. *Ketiga*, para elit yang bertarung dalam pemilu masih menganggap politik hanya sebagai sarana untuk meraih kekuasaan pribadi. Padahal sejatinya pemilu seharusnya menjadi mekanisme demokratis untuk mencari pemimpin terbaik.

Dalam meraih simpati masyarakat pemilih digunakan berbagai cara. Etika berpolitik cenderung diabaikan, karena yang ada padanya adalah meraup suara sebanyak mungkin untuk mengalahkan lawan. Siasat politik representasi, simbol dan identitas agama dipergunakan untuk meraih kemenangan. Berita bohong (hoaks), fitnah dijadikan senjata ampuh memengaruhi publik. Akibatnya nilai-nilai kearifan lokal terancam dan prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika diabaikan (Brata, 2016).

Pada hakikatnya era reformasi itu lahir dengan mendambakan sebuah harapan akan terjadinya proses inovasi dan dinamika sistem dalam segala lini kehidupan. Namun peluang keterbukaan itu disalahgunakan ke arah tindakan yang destruktif, liberalis, anarkis, kekerasan fisik yang kesemuanya menjurus kepada disintegrasi

dan ketercabikan bangsa. Indonesia adalah negeri yang luar biasa, negeri yang kaya akan suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya.

Budaya merupakan suatu unsur penting pembentuk identitas suatu bangsa. Keperibadian suatu bangsa akan tercermin melalui budayanya. Karena kekayaan yang dimiliki, maka masyarakat Indonesia sering disebut sebagai masyarakat yang plural, majemuk, multikultural namun tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun berbagai permasalahan yang kerap muncul merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menjaga dan merawat pluratitas bangsanya ke depan.

Dewasa ini mengapa wacana multikulturalisme menjadi isu penting dalam upaya pembangunan kebudayaan di Indonesia. Terdapat beberapa alasan penting seperti: *Pertama*, manusia diciptakan dalam keanekaragaman kebudayaannya, atas dasar itu maka pembangunan manusia wajib memperhatikan keanekaragaman kebudayaan tersebut. Dalam konteks ke-Indonesiaa-an maka menjadi kewajiban bahwa dalam pembangunan manusia Indonesia harus didasarkan atas multikulturalisme sebab negara Indonesia berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan.

Kedua, pada dasawarsa terakhir di berbagai wilayah nusantara ini sering dilanda konflik sosial

yang bernuansa sara (suku, agama, ras, dan antargolongan) tidak terlepas dengan permasalahan kebudayaan. Berbagai konflik sosial yang timbul disebabkan oleh kurangnya kemauan untuk menerima, mengakui kesederajatan, dan menghargai perbedaan ide, gagasan atau pendapat yang lain.

Ketiga, bahwa dewasa ini setiap individu dituntut memiliki pemahaman multikulturalisme merupakan kebutuhan bagi setiap individu, terutama dalam menghadapi tantangan arus budaya global. Globalisasi dengan berbagai bentuk dan caranya berlangsung hingga jauh dan telah masuk ke sudut-sudut ruang dan tempat di seluruh pelosok negeri karena hadirnya industri, investasi individu, teknologi, dan informasi.

Perkembangan ilmu, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang kian semakin hebat, pada akhirnya membawa bangsa Indonesia kepada hal-hal yang tidak selalu menguntungkan. Bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya, bahwa kemampuan IPTEKS negara ini masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan pencapaian IPTEK di negeri Barat, dan kalau itu dipaksakan untuk dikejar, maka bangsa Indonesia bisa-bisa kehabisan nafas.

Dalam penelitian Brata (2012) menemukan bahwa Teknologi berpengaruh cukup signifikan

terhadap tata ruang tradisional dalam bentuk dan fungsinya. Pengaruh yang terjadi adalah untuk menyesuaikan bentuk terhadap perubahan aktivitas manusia yang ditampungnya. Teknologi yang membawa nilai-nilai baru sering menimbulkan konflik yang semakin tajam pada berbagai sektor budaya. Kehadiran teknologi dengan nilai-nilai baru yang menyertai, dalam pertemuannya dengan tata ruang tradisional, dapat menimbulkan berbagai permasalahan, akibatnya transportasi, trotoarisasi, listrik, telepon, dan warnet masuk desa dengan seperangkat elektroniknya serta pelayanan dalam industri pariwisata menampilkan berbagai tuntutan baru dalam ruang-ruang tradisional, yang sebelumnya memang tidak disediakan untuk itu. Tuntutan akan pelayanan dalam industri pariwisata sangat berpengaruh terhadap terjadinya perubahan pada tata ruang, terutama perubahan terhadap tata ruang terbuka tradisional.

Bertolak dari suatu realita yang ada, maka bangsa Indonesia harus kembali kepada satu-satunya yang telah dimiliki dan yang selalu dibangga-banggakan selama ini, yaitu kebudayaan yang tidak kalah bila dibandingkan dengan kebudayaan Barat. Apabila hal itu disepakati, maka adalah tugas dan tanggungjawab seluruh komponen bangsa ini untuk secara bersama-sama

menggali, menemukan, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan Indonesia yang multikulturalisme.

Betapapun canggihnya teknologi dalam menunjang proses terjadinya modernisasi dalam membangun masyarakat, maka nilai-nilai kemanusiaan harus tetap terpelihara dari kekuasaan teknologi, oleh karena menyerah pada teknologi memudahkan manusia terperosok pada dehumanisasi. Dalam kenyataan yang demikian, maka manusia cenderung ditempatkan sebagai suku cadang saja.

Dalam kaitan inilah ada baiknya ditampilkan suatu semboyan klasik yang sering dilontarkan tokoh-tokoh pemikir, budayawan, cendekiawan Indonesia "*kenalilah kebudayaan sendiri*", artinya bahwa di samping kita paham terhadap kebudayaan sendiri, maka sebaiknya kita harus mengerti dan paham kebudayaan lain. Semboyan ini sangat beralasan, karena kenyatannya bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang bersifat majemuk, pluralistik, multietnis, multikultur yang masing-masing mempunyai bentuk sendiri-sendiri karena dipengaruhi oleh ruang dan waktu.

Di samping itu harus disadari pula bahwa bangsa Indonesia berada di tengah-tengah

kebudayaan masyarakat dunia dengan visi dan misinya masing-masing saling berkompetisi dalam upaya saling mendominasi dengan IPTEKS yang mereka bangga-banggakan sebagai hasil aktivitas dan kreativitas manusia. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia selama ini lebih mengutamakan pengembangan intelektual dan pemikiran rasional.

Secara makro dimaksudkan untuk membentuk manusia Indonesia agar mampu besaring di tataran dunia global. Artinya pendidikan yang di kembangkan di Indonesia selama ini adalah pendidikan yang lebih mengutamakan pendidikan sains dan teknologi dan cenderung mengabaikan pendidikan yang bersifat humaniora. Arah atau orientasi pendidikan yang demikian mampu membentuk manusia-manusia yang cerdas dan saintis, tetapi jauh dari akar budayanya, ditambah lagi dengan pemahaman modernisme dengan pendekatan monokulturalisme di atas kenyataan masyarakat Indonesia yang multikulturalisme.

Mencuatnya isu-isu global terkini, seperti: demokrasi, penyelenggaraan HAM, realitas multibudaya, etnis dan multi agama, perdamaian, lingkungan hidup, membuka mata-hati setiap orang untuk berupaya membangun suatu strategi

menata ulang potensi, agar eksistensi kemanusiaan tidak punah. Salah satu kawasan yang harus dicermati adalah sektor pendidikan, terutama pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.

Pendidikan multikultural menjadi begitu penting, sebab pendidikan multikultural mempunyai tanggungjawab besar yaitu: mempersiapkan setiap komponen bangsa ini untuk siap menghadapi arus budaya luar di era globalisasi. Di samping itu bangsa ini harus mempunyai komitmen untuk menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam kebudayaan. Aspek yang perlu dicermati adalah keterbukaan dan ketulusan masyarakat sekolah dalam melihat, mengakui dan menerima perbedaan yang dikemas sedemikian rupa dalam rangka pengakuan bahwa semua orang memiliki kedudukan dan hak yang sama (sederajat) untuk memperoleh pendidikan.

II. Pengertian Pendidikan Multikultural

Parsudi Suparlan (2002) mengatakan bahwa akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep

keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.

Kajian mengenai multikulturalisme, maka secara langsung akan mengkaji berbagai permasalahan yang mendukung ideologi tersebut, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak-hak komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika, moral, produktivitas dll.

Azyumardi Azra (2003) mengatakan adalah kenyataan yang sulit diingkari bahwa negara bangsa Indonesia terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain, sehingga negara bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat "multi-kultural". Multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaan. Untuk dapat memahami multikulturalisme dibutuhkan landasan pengetahuan dan konsep-konsep yang relevan untuk mendukung fungsi multikulturalisme dalam kehidupan manusia.

Parsudi Suparlan (2002), Fay (1996), Jary dan Jary (1991), Watson (2000) menyebutkan bahwa

multikulturalisme ini akan menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural, karena multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individu maupun secara kebudayaan.

Diskursus multikulturalisme menurut Hardiman (2002:x-xi) juga muncul dalam konteks penanganan aspirasi minoritas kultural dari sekelompok orang yang di dalam *politic of recognition* dipahami sebagai sekelompok orang yang menuntut hak untuk menentukan diri sebagai sebuah minoritas kultural, pengakuan atas identitas kolektif, atas kepentingan kelompok dan orientasi nilai.

Multikulturalisme dapat dimaknai sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan menghormati budaya orang lain. Multikulturalisme juga merupakan sebuah formasi sosial yang membukakan jalan bagi dibagunnya ruang-ruang bagi identitas yang beragam dan sekaligus jembatan yang menghubungkan ruang-ruang itu untuk sebuah integrasi (Sparingga, 2003).

Multikulturalisme adalah ideologi yang mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individu maupun secara kebudayaan. Berbagai unsur yang ada dalam masyarakat dipandang dan ditempatkan dalam kedudukan yang sejajar dan setara, sehingga dengan demikian tercipta keadilan di antara berbagai unsur/budaya yang berbeda itu (Lubis 2006:169). Sementara Liliweri (2005:70) mengatakan multikulturalisme adalah doktrin atau "isme" tentang penyadaran individu atau kelompok atas keragaman kebudayaan yang pada gilirannya mempunyai kemampuan untuk mendorong lahirnya sikap toleransi, dialog, kerjasama diantara etnik dan ras yang ada.

Bagus (2003) mengatakan multikulturalisme sebagai pluralisme kebudayaan sebagaimana yang dikemukakan William A.Haviland (1988:289-290). Pluralisme kebudayaan merupakan interaksi sosial dan politik antara orang-orang yang berbeda cara hidup dan berpikirnya dalam masyarakat yang sama. Secara ideal, pluralisme berarti penolakan kefanatikan, purbasangka, dan rasisme, serta menerima sikap menghargai kebudayaan tradisional lainnya. Kehidupan multikulturalisme tidak sama dengan analogi *melting pot* atau *juice*. Di mana unsur-unsur saling melebur dan cair menjadi

sebuah satu kesatuan. Namun lebih tepat dianalogikan sebagai gado-gado.

Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi kehidupan manusia (sosial, politik, ekonomi, budaya, bisnis dll) dalam kehidupan masyarakat. Interaksi ini berakibat terjadinya perbedaan persepsi tentang multikulturalisme. Perbedaan itu akan berimplikasi terhadap perbedaan sikap dan perilaku dalam menyikapi kondisi multikultural tersebut. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme wajib diperjuangkan sebagai landasan tegaknya sistem demokrasi, HAM dalam membangun kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu upaya yang sangat mungkin dapat dilakukan untuk memperjuangkan multikulturalisme adalah melalui pendidikan yang multikultural.

Gerakan reformasi di Indonesia dengan berbagai tuntutan dengan prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan dengan pendidikan ternyata tuntutan itu berdampak terhadap terjadinya perubahan Sistem Pendidikan Nasional dalam upaya memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan Nasional.

Pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan (Andersen dan Cusher, 1994). Pendapat ini dapat dipahami bahwa keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari dan berstatus sebagai objek studi. Artinya, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang wajib diperhatikan oleh para ahli pengembang kurikulum, terutama oleh para pendidik untuk disampaikan kepada peserta didik.

Apabila dicermati, pendidikan multikultural terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran,, pelatihan, proses, perbuatan dan cara-cara yang mendidik. Sesuai dengan dua misi utama pendidikan yaitu mentrasper nilai (*transfer of values*) dan mentrasper pengetahuan (*transfer of knowledge*).

Sementara istilah multikultural secara etimologis berasal dari kata multi dan kata *culture*. Multi berarti banyak, beragam dan *culture* bermakna budaya, tradisi kesopanan. Pendidikan multikultural secara terminologi adalah suatu proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya

sebagai konsekwensi keragaman etnis, budaya, suku dan sistem kepercayaannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I, pasal 1 ayat 16 disebutkan pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sementara pada Bab II tentang dasar, fungsi, dan tujuan, terutama pada pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan Nasional adalah berfungsi : mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Setiap berbicara tentang permasalahan pendidikan, maka yang terjadi adalah timbul kecendrungan untuk mengulangi pernyataan tentang adanya diskrepansi (kesenjangan) antara harapan dan kenyataan. Artinya bahwa banyak hal yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan,

namun ternyata belum tampak apa yang ingin diwujudkan (kualitas) dan apa yang nyatanya berkembang dalam praktik pendidikan di lapangan.

Menurut I Gede Widja (2002:1) bahwa setiap kali tidak puas dengan realitas yang dihadapi dibidang pendidikan, selalu saja yang menjadi sorotan adalah kurikulum yang dianggap kurang /tidak mendukung, karena itu perlu segera dirubah. Hal senada juga diungkapkan antara lain oleh: Asis Wahab (2002); Warman Adam (2003); Soegito (2002); dan Saafroedin Bahar (2002).

Kurikulum hampir selalu dijadikan kambing hitam setiap kekurangberdayaan proses pendidikan, pada hal kurikulum hanyalah salah satu komponen (alat) dari proses pendidikan tersebut. Banyak faktor lain yang ikut menyumbang bahkan lebih menentukan proses, seperti orang yang mengimplementasikannya, di samping iklim atau budaya serta sistem yang berlaku ketika itu.

III. Kebhinekaan dalam Bingkai NKRI.

Sesungguhnya konsep multikulturalisme itu telah digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk mendesain kebudayaan Indonesia. Namun harus disadari bahwa konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep

keanekaragaman atas dasar kesukubangsaan atau kebudayaan suku bangsa yang tersebar di seluruh nusantara.

Konsep di atas hampir sama dengan yang dipahami Brata (2016) yang mengatakan bahwa multikulturalisme dapat dimaknai sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) yang tersebar di seluruh nusantara ini dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan menghormati budaya lain. Seperti yang dirumuskan dalam kata-kata bijak “di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung”.

Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Pancasila secara ideal normatif telah mengakui kehidupan ke-Indonesia-an yang sangat plural. Namun, menurut Bagus (2003:25) pelaksanaan sesanti ini cenderung berfokus pada “ke-tunggal-an” atau uniformitas tanpa memperhatikan “ke-bhinneka-an” yang merupakan situasi empirik Indonesia.

Multikulturalisme sebagai ideologi mempunyai peran yang begitu penting dalam pembangunan bangsa. Sebagaimana telah diketahui bahwa negara Indonesia ini berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan meniscayakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi

inspirasi sekaligus sebagai potensi dalam membangun bangsa akan memudahkan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Proses homogenisasi atau penyeragaman pada masa Orde Baru telah memarginalisasikan peran budaya-budaya lokal/daerah dan dipaksakan menjadi budaya yang satu yakni budaya nasional (monokulturalisme). Akibatnya, budaya-budaya daerah tidak berkembang secara wajar. Multilingualisme yang seharusnya menjadi kekayaan Indonesia dan tunduk pada bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia yang cenderung mengarah pada monolingualisme.

Dalam upaya membangun masa depan bangsa, paham multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana melainkan sebagai ideologi yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup bagi warga masyarakatnya. Bila dicermati Multikulturalisme bukanlah sebuah ideologi yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan ideologi-ideologi lain. Untuk memahami multikulturalisme dibutuhkan seperangkat konsep-konsep untuk dijadikan sebagai acuan di dalam

memahaminya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Implementasi multikulturalisme di Indonesia tentu bukan perkara mudah, terlebih lagi jika proses interaksi sosial ini ditujukan untuk politik integrasi. Latar belakang budaya yang rumit (kompleks) dari berbagai etnis dan ras dapat menjadi berkah yang harus dirayakan sebagai manifestasi penghargaan atas perbedaan. Namun pada sisi yang lain, perbedaan itu dapat menjadi penghambat untuk mencapai tujuan, yakni memberikan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembahasan pada materi ini ditujukan untuk memahami karakter multikulturalisme di Indonesia dan mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi untuk mendapatkan sebuah jalan keluar untuk mengatasi beberapa faktor penghambat proses integrasi bangsa.

Bhineka Tunggal Ika adalah sebuah sesanti yang sederhana dan diyakini benar oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah cita-cita, namun di dalamnya melekat sebuah persoalan besar yaitu : Komunitas bangsa ini sesungguhnya mengetahui perbedaan itu, tetapi kurang memahami dan menghayati perbedaan itu dengan baik, atau dengan kata lain bahwa refleksi pemahaman dan

implementasi masyarakat akan arti keikaan dalam kebhinekaan itu dinilai sangat rendah.

Nasikun (2001: 4) dengan menyitir pandangan beberapa ahli ilmu kemasyarakatan bangsa asing yang menganggap semboyan “ Bhineka Tunggal Ika” sesungguhnya masih lebih merupakan suatu cita-cita yang masih harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia daripada sebagai kenyataan yang benar-benar hidup di dalam masyarakat.

Budayawan Bali, Ngurah Bagus menyoroti bahwa melalui sentralisme Orde Baru, kehidupan sosial yang sangat beragam di Indonesia dipaksakan menjadi seragam. Peran budaya daerah dikesampingkan dan dipaksa menjadi budaya nasional. Kerumitan yang dialami oleh bangsa ketika Orde Baru digantikan Orde Reformasi di mana program reformasi (desentralisasi dan otonomi daerah) etik, multikultur di Indonesia ternyata masih sekedar wacana, artinya belum mengarah kepada kehidupan yang bersifat praktis.

Struktur masyarakat Indonesia yang multidimensional merupakan suatu kendala bagi terwujudnya konsep integrasi secara hoorizontal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang dapat dikenali sebagai sifat dasar dari suatu

masyarakat majemuk sebagaimana yang telah dikemukakan oleh van den Berghe yakni : (1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok yang sering kali memiliki kebudayaan atau lebih tepat sub kebudayaan, yang berbeda satu sama lainnya; (2) memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi kedalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer; (3) kurang mengembangkan konsesus diantara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar; (4) secara relatif seringkali terjadi konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya; (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta (6) adanya dimensi politik oleh suatu kelompok di atas kelompok-kelompok yang lain.

III. Merancang Pendidikan Multikultur Bingkai NKRI

Suatu hal akhir-akhir ini sedang hangat diwacanakan adalah masalah ke-Indonesia-an dan masalah ke-nusantara-an. Ke-Indonesia-an lebih menekankan kepada masalah paham kebangsaan dalam upaya memperkokoh identitas kebangsaan

itu sendiri. Sementara masalah ke-nusantara-an lebih memfokuskan pada pluralitas etnik yang mendiami kepulauan nusantara, dan karena ikatan historisnya membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ernest Renan mengemukakan bahwa nasion tidak dapat disamakan dengan kesatuan manusia yang didasarkan atas kesamaan ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi atau atas dasar kepentingan bersama. Nasion adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari manusia-manusia yang saling merasa bersetiakawan dengan satu sama lain (Bachtiar, 2002 : 32-33).

Akar nasionalisme Indonesia sejak awal justru didasarkan pada tekad yang menekankan cita-cita bersama di samping pengakuan sekaligus penghargaan pada perbedaan sebagai pengikat kebangsaan. Kesadaran itu sangat jelas dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, adalah prinsip dengan penekanan bahwa pluralitas merupakan perekat kebangsaan.

Bangsa atau Nasion Indonesia tidak didasarkan atas persamaan kelahiran, kesukuan, asal-usul, keturunan, kedaerahan, ras ataupun keagamaan, namun didasarkan atas persamaan perasaan kebangsaan Indonesia, serta kehendak

untuk hidup bersatu di tanah air Indonesia sebagai suatu bangsa untuk bersama-sama berjuang mencapai cita-cita kebangsaan. Kebangsaan Indonesia tidak berkonotasi etnis, melainkan berkonotasi etis/politis. Pada kenyataannya kemerdekaan Indonesia tergapai karena adanya faktor persatuan bangsa yang begitu kuat (Silalahi, 2002: 5).

Di samping persatuan, masalah pluralisme merupakan substansi utama paham kebangsaan. Kebangsaan Indonesia sangat mengakui adanya pluralisme. Fakta menunjukkan bahwa warga negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, golongan, keturunan dengan ciri, keperibadian, dan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Inilah yang lazim disebut sebagai kebhinnekaan Indonesia, dimana persatuan tidak menghancurkan atau menghilangkan kebhinnekaan atau keberagaman, melainkan mengembangkan dan melestarikan kebhinnekaan atau keberagaman itu sebagai dasarnya.

Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Pancasila secara ideal normatif telah mengakui kehidupan ke-Indonesia-an yang sangat plural. Namun, menurut Bagus (2003:25) pelaksanaan sesanti ini cenderung berfokus pada “ke-tunggal-an” atau uniformitas tanpa memperhatikan “ke-bhinneka-

an” yang merupakan situasi empirik bangsa Indonesia.

Proses homogenisasi atau penyeragaman pada masa Orde Baru telah meminggirkan peranan budaya-budaya daerah dan dipaksakan menjadi budaya yang satu yakni budaya nasional. Budaya-budaya daerah kurang mendapat perhatian, akibatnya tidak dapat berkembang secara wajar. Multilingualisme yang seharusnya menjadi kekayaan Indonesia dan tunduk pada bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia yang cenderung mengarah pada monolingualisme.

Dengan mengutip pendapatnya Furnivall, Azyumardi Azra (2003) dalam artikelnya “Identitas dan Krisis Budaya Membangun Multikulturalisme Indonesia” mengemukakan bahwa yang dimaksud masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat-masyarakat Asia Tenggara, khususnya Indonesia akan terjerumus ke dalam anarki, jika gagal dalam menemukan formula federasi pluralis yang memadai.

Pada hakikatnya konflik itu merupakan suatu gejala sosial yang biasa melekat di dalam

kehidupan masyarakat. Konflik sosial dalam masyarakat memiliki pola yang bervariasi sesuai dengan pola hidup yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Semakin plural masyarakat yang berkonflik maka ada kecenderungan akan semakin bervariasi pula pola dan jenis konfliknya. Indonesia dalam keragaman budayanya tentu memiliki potensi yang beragam pula dalam masalah konflik.

Dalam era Orde Baru, sentralisme kekuasaan dalam pola kehidupan politik dan ekonomi yang distorsif, berbagai bentuk penyeragaman kultural, sikap represif aparat keamanan dalam pengendalian konflik, tidak adanya peluang untuk membuka wacana dialog dalam setiap konflik berpotensi meletus dalam berbagai bentuk aksi kekerasan massa.

Aksi kekerasan yang menghiasi wajah multikulturalisme Indonesia merupakan fakta empirik kuatnya perspektif etnosentrisme (juga rasisme). Ini terjadi karena belum berkembangnya sistem-sistem hak, etos demokrasi, proseduralisme legal, dan netralisme politis dalam tradisi kehidupan bernegara (Hardiman, 2002).

Dengan demikian dibutuhkan implementasi etika multikulturalisme menghadapi tantangan internal dan eksternal. Secara internal, tantangan

multikulturalisme sangat berkaitan dengan penataan dan pengelolaan monejerial negara. Sedangkan tantangan eksternal dalam konteks ini berkaitan dengan relasi antarnegara berkaitan dengan penyelesaian konflik perbatasan dan pengelolaan atas asset negara dan bangsa.

Distorsi kebijakan khususnya dalam pengelolaan negara (seperti praktik korupsi dan kolusi), sentralisme kekuasaan, ketimpangan ekonomi dan kemajuan pembangunan, merupakan faktor-faktor pemicu munculnya disintegrasi bangsa dalam sentimen yang mengarah pada tuntutan otonomi yang semakin mekanistik, meletupnya kekerasan seperti kerusuhan antaretnik (juga pribumi dan non pribumi, lokal dan pendatang), demikian juga permasalahan separatisme.

Separatisme politis merupakan suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok *separatis* sendiri karena mereka menganggapnya kasar, dan memilih istilah yang lebih netral seperti *determinasi diri*. Motivasi gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius. Selain itu,

separatisme juga bisa terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu kelompok (Wikipedia,2015).

Kekerasan rasial juga dilakukan oleh para aparaturnegara khususnya oknum-oknum birokratis. Contoh yang paling sering terjadi, misalnya perlakuan diskriminatif aparat terhadap warga domestik dan wisatawan masih marak terjadi di institusi birokratik. "Uang rokok", "oleh-oleh", "hadiah", uang pelicin" dan proses pengurusan administrasi "surat berharga", "*mark up price*" cukup menguras tenaga, waktu, uang, emosi dan tidak jarang menguras air mata".

Demikianlah pelayanan keamanan tanpa kenyamanan yang diberikan oleh aparaturnegara. Hal semacam ini telah terjadi secara mekanistik sehingga dianggap hal yang biasa dan sepele dalam mentalitas dan etos kerja para birokrat. Citraan buruk semacam ini tentunya secara cepat disebarkan, membentuk stereotip negatif.

Stereotip negatif yang diuraikan di atas tentunya tidak dapat disangkal begitu saja. Sebagian mengandung kebenaran akan realitas pemberitaan konflik dan kekerasan antarkelompok etnis, agama, kelompok pelajar dan mahasiswa, buruh dan pengusaha yang secara intensif dipublikasikan oleh para "kuli tinta" di tanah air.

Koentjaraningrat seorang antropolog, sekitar tahun 1980-an pernah menyampaikan tentang proses untuk mengembangkan hubungan yang selaras tidaklah mudah, oleh karena harus diperhatikan beberapa hal dalam menganalisis hubungan antar suku bangsa dan golongan seperti: 1) mengenali sumber-sumber konflik; 2) potensi untuk toleransi; 3) sikap dan pandangan dari suku bangsa atau golongan terhadap sesama suku bangsa atau golongan; 4) akhirnya harus diperhatikan tingkat masyarakat dimana hubungan dan pergaulan antar suku bangsa atau golongan tadi berlangsung.

Fenomena konflik yang terjadi di wilayah nusantara setiap hari dapat kita saksikan atau dibaca di berbagai masmedia baik cetak maupun elektronik (medsos), mulai dari konflik yang berskala kecil dari tingkat lokal, regional sampai tingkat nasional. Konflik kekerasan antar etnik, klaim penduduk asli dengan pendatang, politik identitas membawa citra budaya harmoni, adiluhung dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika tengah mendapatkan tantangan yang cukup hebat.

I Wayan Geriya (2003) mengidentifikasi paling tidak ada enam kecenderungan yang memengaruhi mental dan perilaku manusia Indonesia yang berpotensi mendorong terjadinya

konflik yaitu: 1) Tata ruang ekologis yang cenderung mulai padat, serak, semerawut lebih memacu ketegangan sosial dibandingkan kedamaian; 2) Struktur demografi yang makin padat, heterogen, stratifikatif cenderung mendorong konflik horizontal daripada solidaritas sosial; 3) Kehidupan ekonomi yang semakin timpang, eksploitatif, materialistik dan konsumerisme; 4) Kehidupan sosial yang cenderung mendominasi kelompok tertentu dan cenderung memarginalkan kelompok-kelompok lain; 5) terjadinya proses dehumanisasi secara berkelanjutan yang sangat merapuhkan dasar-dasar etika, estetika dan kehalusan hati nurani publik; 6) terjadinya politisasi pragmatis dalam hampir seluruh ranah kehidupan dari ekonomi, hukum, seni, birokrasi yang sarat dengan politik uang, cenderung menghadirkan paradoks, kontroversial dan antagonisme.

Cita-cita kehidupan harmoni dalam masyarakat yang pluralis, tentu menuntut berbagai macam persyaratan seperti kejujuran, ketulusan hati, saling percaya, saling menghargai, bisa saling menerima, kesediaan membantu yang lemah, serta menegakan keadilan sesuai dengan cita-cita membentuk masyarakat madani (*civil society*).

Apabila berbagai persyaratan itu berusaha dicermati, maka sebagian dapat di upayakan melalui jalur pendidikan yang harus dilakukan dengan kesabaran, berkelanjutan dan konsisten serta disertai dengan keteladanan. Sementara sebagian yang lain dapat diupayakan dengan membangun mekanisme dan institusi sesuai dengan tuntutan untuk mewujudkan cita-cita membentuk masyarakat madani (*civil society*)

Berbicara masalah pendidikan di Indonesia, maka tidak bisa lepas dengan sejarah pendidikan di masa lampau. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia praktis baru dikenal oleh rakyat Indonesia, ketika Van de Venter seorang tokoh "*Politik Etis*" mengajukan tuntutan terhadap pemerintah jajahan (kerajaan Belanda), agar penduduk pribumi diberi sedikit pengetahuan sebagai bentuk "balas budi" atas kekayaan yang telah diambil di bumi Indonesia.

Berdasarkan tuntutan itu, maka lahirlah politik balas budi (politik etis) dengan tiga tuntutan, salah satu di antaranya adalah bidang edukasi (pendidikan). Namun bila dicermati secara lebih mendalam, ternyata politik etis hanyalah sebagai kedok belaka, oleh karena dibalik itu tersembunyi maksud-maksud lain yang jelas-jelas merugikan rakyat Indonesia. Sebab pendidikan yang

diselenggarakan ketika itu, tidak lebih hanya sekedar memberikan keterampilan kepada sebagian kecil orang Indonesia agar sekedar bisa membaca, menulis, dan menghitung (calistung) yang sejatinya untuk kepentingan pemerintah jajahan sendiri.

Hasil produksi bidang pertanian dalam arti luas melimpah ruah, membutuhkan tenaga banyak untuk mengangkutnya di samping harus menghitung besaran jumlah dari hasil-hasil produksi mereka. Hanya untuk kepentingan yang terakhirlah pendidikan di Indonesia diadakan, dengan tujuan utamanya adalah untuk membantu orang-orang (perusahaan) Belanda untuk menghitung jumlah hasil produksinya untuk segera dikirim kenegeri asalnya Nederland.

Pemberlakuan pendidikan ketika itu sangat diskriminatif, terbatas hanya untuk golongan-golongan tertentu saja, seperti untuk orang Cina, keturunan atau anak-anak pribumi setingkat Wedana (camat). Namun demikian masing-masing golongan mengembangkan sistem pendidikan atas dasar ideologi-ideologinya sendiri.

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, terjadi perubahan besar terkait dengan politik Jepang pada waktu itu, yaitu untuk memenangkan perang *Asia Timur Raya*, dengan berbagai bentuk propaganda melalui gerakan Tiga A (cahaya,

pelindung, pemimpin) Asia Nipon. Dalam merealisasikan cita-citanya itu, maka pemerintah jajahan Jepang mengadakan beberapa perubahan dalam kebijakan pendidikan, terutama diijinkannya memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah.

Berdasarkan penggambaran singkat di atas, terlihat secara jelas bahwa sebelum Indonesia menjadi bangsa dan negara yang merdeka, bahwa di wilayah jajahan (koloni) terdapat berbagai sistem pendidikan, masing-masing dengan orientasi maupun ideologi tersendiri. Artinya masing-masing penguasa (penjajah) mengembangkan sistem pendidikan sesuai dengan kemauan politik penguasa.

Kondisi yang demikian sangat tidak mendukung persatuan dan kesatuan penduduk di kepulauan Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa, agama maupun rasnya. Berpegang pada kondisi nyata penduduk di kepulauan ini, maka nampaklah adanya perbedaan-perbedaan yang cukup besar pada penduduk ini, terutama berkaitan dengan ras, suku bangsa maupun agama yang diperkuat oleh cara penyelenggaraan pendidikannya.

Adanya perbedaan-perbedaan ras, suku bangsa, agama adalah keadaan yang tidak dapat

diubah, oleh sebab itu haruslah diusahakan pengaturan hubungan antar ras, antar suku bangsa, dan antar umat beragama yang berbeda-beda itu tanpa merugikan satu sama lain. Bahkan bangsa ini harus berusaha agar dapat menciptakan suatu keadaan umum dimana golongan-golongan penduduk yang berbeda-beda ini justru bersedia saling mendukung dan menguatkan satu sama lain sebagai golongan tersendiri dan bersama sebagai satu masyarakat, satu bangsa dan satu negara.

Dalam rangka membangun kesadaran bagi perkembangan Indonesia dewasa ini maka dibutuhkan pendidikan multikultural. Melalui pendidikan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pembentukan “keikaan” di tengah-tengah “kebhinnekaan” bangsa sebagai sebuah realita, sehingga tidak lagi hanya sebatas selogan.

Mengingat begitu pentingnya pemahaman multikulturalisme dalam pembangunan bangsa, maka diperlukan upaya-upaya konkrit dalam merealisasikannya. Pemahaman seperti ini penting untuk disebarluaskan untuk mendidik masyarakat akan betapa pentingnya pendidikan multikultural bagi kehidupan masyarakat dan bangsanya ke depan. Dengan kata lain, bahwa bangsa Indonesia sangat membutuhkan pendidikan multikultural

yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pendidikan multikultural perlu ditumbuhkembangkan, mengingat potensi yang dimiliki Indonesia secara kultural, tradisi, dan lingkungan geografi serta demografi yang tiada tara. Pendidikan multikultural dapat diterapkan di sekolah-sekolah, seiring dengan penerapan kurikulum yang berlaku dewasa ini. Oleh karena kurikulum itu sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan.

Pentingnya pendidikan multikultural diterapkan, tentu bukan hanya menjadi tanggungjawab sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan formal saja, melainkan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan institusi-institusi lainnya. Salah satu contoh institusi yang dimaksud seperti perpustakaan. Sebab perpustakaan sebagai institusi memiliki berbagai fungsi seperti fungsi pendidikan, sosial, informasi, dan pelestarian kebudayaan.

Menurut Noeng Muhadjir (2001) bahwa era modernisme hanya mengenal satu kepentingan, yaitu kepentingan teknis, yang direduksi menjadi

kepentingan ekonomik dan direduksi lebih lanjut menjadi pragmatik. Pada akhir era modernisme Habermas menawarkan pencerahan rasional dengan menunjukkan tiga kepentingan: 1) kepentingan teknis (dimensi kerja) yaitu kehendak untuk mengontrol alam dan manusia; 2) kepentingan interaktif, yang menampilkan hasrat saling memahami antar manusia lewat komunikasi bahasa dan budaya; 3) kepentingan emansipasi, yaitu upaya manusia membebaskan diri dari dominasi rasial maupun dominasi sistem sosial budaya.

Hal senada juga diungkapkan oleh I Gusti Ngurah Bagus (2003) bahwa pendidikan multikulturalisme dapat diuraikan ke dalam tiga subnilai, yaitu: a) Penegasan identitas kultural seseorang; b) Penghormatan dan keinginan untuk memahami dan belajar tentang (dan dari) kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaan sendiri, dan; c) Penilaian dan perasaan senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri yaitu pandangan terhadap keberadaan kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat seseorang sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara.

Realita Indonesia yang multikultural berhadapan dengan berbagai permasalahan pada

masa reformasi dan di eraglobalisasi dewasa ini, maka nampak adanya kebutuhan yang amat mendesak untuk merekonstruksi kembali kebudayaan nasional Indonesia menjadi kekuatan perekat keragaman etnis dan budaya tersebut. Kebudayaan nasional diberdayakan sebagai perekat dengan tetap memberikan ruang kebebasan dalam pengembangan kebudayaan daerah/lokal.

Globalisasi dapat diartikan sebagai keterbukaan, menolak ketaatan pada satu otoritas dan semakin menyadari bahwa kebenaran memang terlalu besar untuk dimonopoli satu sistem dan keragaman pandangan itu jauh menjadi lebih indah dibandingkan keseragaman yang pada kenyataannya sering membelenggu bahkan memasung kebebasan manusia.

Cita-cita reformasi yang akhir-akhir ini tampaknya mengalami kemacetan dalam pelaksanaannya, ada baiknya digulirkan kembali. Alat penggulir bagi proses-proses reformasi sebaiknya secara model dapat dioperasionalkan dan dimonitor, yaitu dengan memformat model pendidikan multikulturalisme untuk meninggalkan masyarakat majemuk dan secara bertahap memasuki masyarakat multikultural Indonesia.

Sebagai model, maka masyarakat multikultural Indonesia adalah sebuah masyarakat

yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau Bhinneka Tunggal Ika yang multikultural, yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat lokal dan nasional. Artinya menyadarkan masyarakat, bahwa tidak cukup hanya mengakui perbedaan namun juga menghargai dan menghormatinya. Dalam pengakuan, penghargaan, dan menghormati tersebut terkandung makna kesederajatan.

Bila pengguliran proses-proses reformasi yang terpusat pada terbentuknya masyarakat multikultural Indonesia itu berhasil, maka tahap selanjutnya adalah mengisi struktur-struktur atau pranata-pranata dan organisasi-organisasi sosial yang tercakup dalam masyarakat Indonesia. Isi dari struktur-struktur atau pranata-pranata sosial tersebut mencakup reformasi dan pembenahan dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada, dalam nilai-nilai budaya dan etos, etika, serta pembenahan dalam hukum dan penegakan hukum bagi keadilan.

Dalam upaya ini harus dipikirkan adanya ruang-ruang fisik dan budaya bagi keanekaragaman kebudayaan daerah setempat atau pada tingkat lokal maupun pada tingkat nasional dengan berbagai corak dinamikanya. Upaya ini dapat dimulai dengan pembuatan pedoman etika

dan pembakuannya sebagai acuan bertindak sesuai dengan adab dan moral dalam berbagai interaksi yang terserap dalam hak dan kewajiban dari pelakunya dalam berbagai struktur kegiatan dan manajemen pemerintahan. Pedoman etika ini akan membantu upaya-upaya pemberantasan KKN secara hukum.

Bersamaan dengan upaya-upaya tersebut di atas, sebaiknya sistem pendidikan nasional juga mengadopsi model pendidikan multikultural untuk diberlakukan dalam pendidikan sekolah, dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah. Multikulturalisme sebaiknya termasuk dalam kurikulum sekolah, dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kurikuler atau menjadi bagian dari kurikulum sekolah.

Permasalahan penting lain yang perlu dibangun adalah menumbuhkan integrasi nasional melalui revitalisasi gagasan (mutualisme, musyawarah dan mufakat, kesetaraan) dan nilai-nilai agama (kasih sayang, toleransi, damai, keadilan dan persatuan) dalam ruang lingkup pergaulan sesama warga bangsa. Namun harus disadari bahwa membangun integrasi bukan perkara mudah bagi bangsa Indonesia yang masyarakatnya begitu pluralistik dan

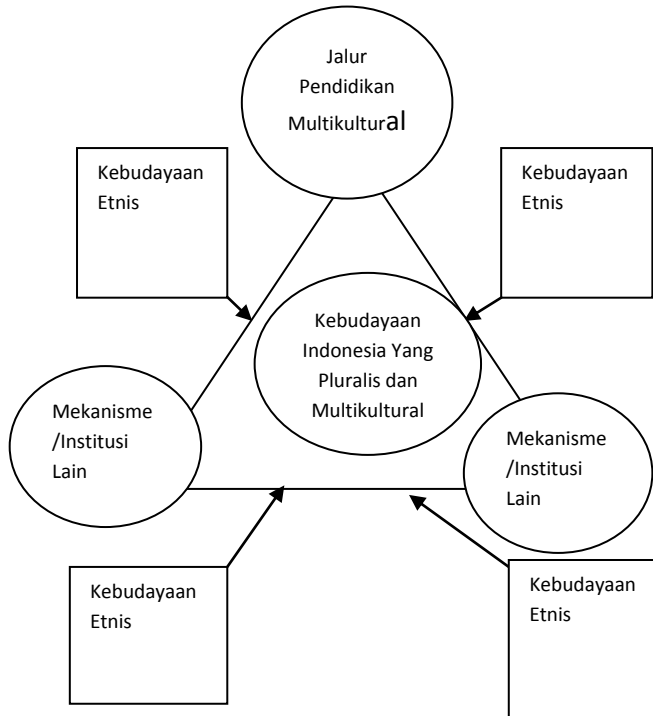
multikultural. Untuk itu bangsa ini tidak boleh menyerah harus senantiasa diusahakan dan diperjuangkan.

Dalam menjaga integrasi nasional, ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti: *Pertama*, meningkatkan pemahaman setiap warga bangsa ini tentang multikulturalisme Indonesia. Dalam kaitan ini perlu dilakukan upaya bagaimana cara meningkatkan rasa saling memiliki aset-aset nasional yang berasal dari nilai-nilai kearifan bangsa Indonesia, khususnya dari suku-suku bangsa, sehingga mendorong terbentuknya *shared property* dan *shared entitlement*. Artinya upaya membuat seseorang dari kawasan Barat Indonesia dapat menghargai, menikmati dan merasakan sebagai milik sendiri berbagai unsur kebudayaan yang terdapat di kawasan Timur Indonesia, dan demikian pula sebaliknya.

Kedua, Setiap program pembangunan hendaknya mengemban misi menciptakan dan menyeimbangkan mutualisme sebagai wujud doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan (*mutualism and brotherhood*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian strategi dan kebijakan pembangunan, khususnya strategi dan kebijakan budaya, harus bertolak dan berorientasi pada upaya memperkokoh persatuan

Indonesia melalui upaya menumbuhkan mutualisme antar komponen bangsa dari di tingkat *grass-roots* (akar rumput).

Bagan : Model Pendidikan Multikulturalisme



Keterangan :

Kebudayaan Indonesia dibangun atas keragaman kebudayaan-kebudayaan etnis (suku bangsa), sehingga terbentuklah kebudayaan Indonesia yang plural dan multikultural. Dalam upaya merevitalisasi kebudayaan Indonesia yang plural dan multikultural dalam bingkai NKRI sesuai tuntutan reformasi dan penguatan global, dapat ditempuh melalui berbagai

mekanisme/institusi. Salah satu jalur yang paling strategis adalah lewat jalur pendidikan, yaitu pendidikan multikulturalisme.

IV. Simpulan

Berangkat dari uraian di atas, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Modernisme yang membawa kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh besar terhadap dinamika masyarakat dan kebudayaannya.
2. Sesuai dengan tuntutan reformasi dan pengaruh global, terdapat perubahan orientasi dari sentralistik menjadi desentralistik dalam pemberdayaan kearifan-kearifan lokal.
3. Semakin carut-marutnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ditandai dengan berbagai gejala disintegrasi bangsa, maka perlu ada upaya nyata merevitalisasikan kembali paham kebangsaan Indonesia.
4. Jalur pendidikan, terutama lewat pendidikan multikulturalisme adalah salah satu jalur strategis dalam upaya merekat kebhinnekaan dalam bingkai NKRI.

Daftar Pustaka

- Azis Wahab. (2002). *Guru Profesional dan PIPS yang Kuat, Prasyarat bagi Keberhasilan Implementasi Kurikulum Sekolah Berbasis Kompetensi*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
- Azyumardi Azra. (2003). *Identitas dan Krisis Budaya Membangu MultikulturalismeIndonesia*. Dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya “ Poestaka “*, No. 6 Tahun XIV Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Bahctiar, Harsja W. (2002). *Integrasi Nasional Indonesia*. (Penyunting: Pilliang dkk).Jakarta : Centre For Strategic and International Studies (CSIS).
- Bagus, I Gusti Ngurah. (2003). *Hidup Bersama dan Etik Multikultural : Peluang danTantangannya dalam Hidup Berbangsa. Disampaikan Pada Forum Rektor Indonesia Simpul Jawa Timur*. Universitas Surabaya.
- Brata, Ida Bagus. (2012). *Komodifikasi Telajakan dalam Era Globalisasi di Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar (Disertasi)*. Denpasar: Pascasarjana Universitas Udayana.
- Brata, Ida Bagus. (2016). *Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa*. Denpasar: Jurnal Bakti Saraswati (JBS).

- Fay, B. (2002). *Filsafat Ilmu Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela.
- Geriya, I Wayan. *Potensi dan Solusi Konflik dari Perspektif Sosial Budaya (Menanti Keadilan dan Character Building Manusia Indonesia)*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Solusi Konflik dari Sudut Pandang Budaya dan Hukum. Forum Perguruan Tinggi Sebeli, Kuta-Bali.
- Koentjaraningrat. (1980). *Aneka Warna Manusia dan Kebudayaan Indonesia dalam Pembangunan*. Dalam *Manusia dan Kebudayaan Indonesia* (Koentjaraningrat : ed). Jakarta : Jambatan.
- Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78. 2003. Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Liliweri, A. (1992). *Dasar-Dasar Komunikasi Periklanan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhadjir, Noeng. 2001. *Filsafat Ilmu Positivisme, Post Positivisme, dan Post Modernisme*. Yogyakarta : Rakesarasin.
- Soegito, H. A. T. (2002). *Strategi Proses Belajar Mengajar Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Nilai*. Disampaikan dalam Rapat Kerja Kelompok Pendidikan Pancasila

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Jakarta.

----- (2002). *Peranan Pancasila di Era Reformasi (Dipandang sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional)*. Disampaikan Dalam Penataran

Dosen Pancasila. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Surabaya.

Wija, I Gde. (2002). *Pokok-pokok Pikiran Mengenai Strategi Pengembangan Kurikulum Baru Pendidikan IPS Di LPTK*. Disampaikan Dalam Seminar Nasional Fakultas Pendidikan IPS IKIP Negeri Singaraja.

BAB IV
MEGEGURITAN: MEDIA PENDIDIKAN
KARAKTER GENERASI MUDA
DALAM MENGHADAPI ARUS BUDAYA
GLOBAL

I. Pendahuluan

Dewasa ini ada anggapan sebagian masyarakat, bahwa kelakuan kaum remaja begitu memprihatinkan. Untuk menghadapinya, dituntut membangun ketangguhan nasional di segala bidang. Salah satu tuntutannya yaitu upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, iman, dan taqwa sehingga tercipta sumber daya manusia cerdas berakhlak mulia dan tidak tercerabut dari nilai-nilai budaya bangsanya.

Akhir-akhir ini kembali pendidikan menjadi wacana publik (*public opinion*) dalam mengatasi berbagai persoalan krisis moral/dekadensi moral yang begitu masif di tengah-tengah kehidupan masyarakat, mulai dari pelajar hingga pejabat negara. Melihat potret buram yang demikian, banyak kalangan mengklaim karena gagalnya dunia pendidikan.

Serangkaian kasus kekerasan sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia begitu meresahkan

dan sangat kompleks oleh karena terjadi pada hampir semua aspek dan institusi sosial yang ada. Seperti kekerasan yang terjadi dari jenjang pendidikan dasar, menengah bahkan telah masuk ke kampus-kampus. Bukan hanya siswa, orang tua, dan mahasiswa saja sebagai pelaku, namun justru dilakukan oleh pendidikannya sendiri.

Pendidikan merupakan wadah/tempat pendidik memproses peserta didik untuk melahirkan generasi unggul/generasi emas yang mampu membawa masa depan bangsanya agar terhindar dari jurang keterpurukan akhlak dan moral. Atas dasar itu, maka tugas yang diemban oleh institusi pendidikan di era globalisasi ini semakin kompleks dan semakin berat.

Dewasa ini beberapa kalangan mengeluh tentang kualitas dan perilaku peserta didik atau masyarakat. Hal itu berarti mungkin ada yang salah dalam pelaksanaan pendidikan selama ini. Terhadap hal itu lazimnya secara mudah yang disalahkan karena kecanggihan IPTEKS atau akibat dampak *four T revolution (telecommunication, transportation, trade, dan tourism)* dan intensifnya sentuhan peradaban global. Ataukah memang karena kegagalan kita dalam mendidik atau memahami hakikat dari pendidikan itu sendiri.

Globalisasi telah menciptakan dunia semakin terbuka dan saling ketergantungan antarbangsa dan antarnegara. Bagi negara maju tentu sangat menguntungkan, karena mereka dapat bertindak sebagai subyek, namun bagi negara berkembang, seperti Indonesia tentu akan memberikan dampak yang merugikan sebab negara berkembang lebih cenderung dijadikan sebagai sasaran atau obyek globalisasi. Namun yang pasti bangsa Indonesia tidak mungkin menghindar atau sembunyi dari arus globalisasi. Untuk itulah dibutuhkan berbagai bentuk antisipasi, salah satunya adalah melalui dunia pendidikan.

Dalam dunia pendidikan berlaku semboyan “proses pendidikan berlangsung sepanjang hayat”. Namun di balik semboyan bijak itu sesungguhnya terimplikasi makna bahwa dalam proses pendidikan itu tidak hanya menekankan pada membangun intelektual, namun lebih pada membangun watak, karakter yang tangguh, takwa dan santun dalam bentuk habitus baru. Membangun masyarakat dapat dimulai dari satuansatuan sosial yang terkecil seperti keluarga dengan prinsip hidup sederhana, rendah hati, jujur yang ditanamkan sejak anak usia dini sebagai dasar pembentukan karakter bangsa.

Pada hakikatnya anak didik itu adalah manusia yang membutuhkan pertolongan, tuntunan, arahan, bimbingan, dan motivasi dari orang dewasa (pendidik) untuk mencapai kedewasaannya. Pendidikan karakter yang dibangun melalui sistem pendidikan di Indonesia telah menjadi bagian strategis dalam misi pendidikan nasional bangsa Indonesia.

Pendidikan karakter dalam sistem pendidikan di Indonesia bukanlah menjadi tanggungjawab pendidik semata. Dukungan publik sangat dibutuhkan guna menambah proses kualitas pendidikan karakter yang lebih baik, oleh sebab itu keterlibatan orang tua (keluarga), sekolah (pendidik), dan masyarakat (komunitas sosial) merupakan sebuah gerakan nasional. Masa depan bangsa adalah tanggung jawab bangsa Indonesia seluruhnya.

Persoalan moral yang dihadapi bangsa ini cukup memprihatinkan. Perilaku generasi muda di luar kepatutan begitu sering dilakukan dengan mengatasnamakan kebebasan, mencari identitas diri, dan berbagai alasan lainnya sebagai pembenar. Dari sekian banyak persoalan moral yang tampaknya cukup memprihatinkan adalah semakin meningkatnya tindak kekerasan di kalangan remaja. Perilaku anak-anak remaja yang demikian

dapat dijumpai baik di lingkungan sekolah, di keluarga maupun di masyarakat.

Perilaku anak-anak remaja yang demikian patut diduga akibat kurang meresapi pendidikan budi pekerti dan ajaran agama untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran agama sesungguhnya tidak semata-mata dapat ditemukan pada buku-buku teks agama, namun ajaran tentang kesusilaan sebagai bagian penting ajaran keagamaan banyak didapat dalam karya-karya sastra para pujangga.

Namun karya-karya besar itu sering tersimpan rapi diberbagai perpustakaan pribadi maupun umum, kurang diminati oleh kalangan remaja karena kalah dengan teknologi modern yang bercitra trendi. Generasi muda sekarang yang akrab dikenal sebagai generasi milenial (Y) dan generasi Z lebih tertarik berkoneksitas dengan memainkan pitur-pitur komputer, *gadget*, *berwhatsApp*, *instagram* atau *ber-facebook* ria dan sejenisnya daripada membaca, memahami, serta mempraktikan dalam kehidupan nyata berkenaan dengan makna yang terkandung dalam karya-karya sastra besar itu.

Untuk tujuan itulah kajian ini dilakukan, dalam upaya memahami lebih dalam berkaitan dengan makna-makna yang terkandung dalam

karya sastra itu sebagai pegangan bagi generasi muda dalam menghadapi semakin derasnya pengaruh arus budaya global.

II. Kerangka Teori

A. Pengertian Pendidikan

Pendidikan secara umum berasal dari bahasa Yunani "*paedagogie*", yaitu suatu perkataan yang berasal dari akar kata "*pais*" yang artinya anak, dan "*gogie*" berarti suatu ilmu. Paedagogie berarti suatu ilmu yang berhubungan dengan anak. Dalam perkembangan selanjutnya "*paedagogie*" juga berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang lain atau oleh kelompok orang di dalam membawa perkembangan anak ke tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.

Danilov (1978) mengatakan paedagogi sebagai proses interaksi terus menerus dan saling berasimilasi antara pengetahuan ilmiah dan pengembangan siswa. Asimilasi yang dimaksud adalah pengetahuan oleh siswa berkaitan dengan antusiasme mereka untuk mengetahui diverifikasi dalam proses kerja yang intensif dan aktif.

Perlu diperhatikan adanya penekanan pada aspek pengajaran terus menerus dari proses asimilasi yang merupakan upaya intelektual yang intensif pada diri siswa. Menjaga proses pendidikan dan pengajaran secara keseluruhan dan bermuara pada pembentukan keperibadian siswa adalah fungsi dari paedagogi.

Dalam Undang-Undang Pendidikan No.20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat (1) disebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lebih lanjut dijelaskan potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal.

Dalam kaitan ini perlu disadari, anak bukanlah orang dewasa yang berwujud kecil, oleh karena itulah anak memiliki sifat kodrat kekanak-kanakan yang jauh berbeda dengan sifat kedewasaan. Dengan alasan itulah maka perlu pendidikan, sebab di balik sifat kodrat sebagai anak

terselip makna dibutuhkannya pertolongan, bimbingan, petunjuk, dan motivasi baik lahir maupun batin dari seorang yang telah dewasa (pendidik).

Berkaitan dengan itu, pendidik dapat dipahami sebagai orang dewasa yang berusaha memberikan pengaruh kepada anak didik, di mana saja dan kapanpun untuk mencapai kedewasaan anak didik. Atas dasar itu, maka pendidik tidak terbatas pada *transfer of knowledge* namun juga *transfer of value*. Pendidik akan selalu memberikan motivasi, bimbingan, arahan, dan petunjuk demi kedewasaan anak didiknya.

B. Pendidikan Menurut Agama Hindu

Sebelum menjelaskan pendidikan dalam perspektif Hindu, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang tujuan dari agama Hindu. Dalam *Upedesa* (1980:81) disebutkan bahwa tujuan agama Hindu adalah untuk mencapai kedamaian rohani dan kesejahteraan hidup jasmani. Di dalam *Bhagawad Gita* (Puja, 1981:32) disebutkan:

“Moksartham jagadithaya ca iti dharma”, yang artinya *dharma* atau agama itu adalah untuk mencapai moksa (*moksartham*) dan mencapai kesejahteraan hidup makhluk (*jagadhita*). Moksa juga disebut *“mukti”*, artinya

mencapai kebebasan *jiwatman* atau kebahagiaan rokhani yang langgeng. "*Jagadhita* juga disebutkan dengan istilah "*Bhukti*", yaitu membina "*abhyudaya*" atau kemakmuran kehidupan masyarakat dan negara.

Berdasarkan tujuan agama Hindu, maka tujuan pendidikan agama Hindu sesungguhnya sama dengan tujuan pendidikan nasional, seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pendidikan, yaitu dasarnya adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, artinya membangun secara lahiriah atau wujud nyatanya dan membangun rokhaniahnya yang selaras dengan ajaran *dharma* dan kaedah-kaedah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan pendidikan agama tidak semata-mata hanya menanamkan pengetahuan keagamaan sebanyak-banyaknya, namun yang paling penting yang harus diperhatikan apakah pengetahuan yang telah diberikan mampu dipahami, diresapi, dihayati, dan direfleksikan di dalam kehidupan nyata sehari-hari oleh peserta didik.

Dalam kitab *Dharmapada Attakata* Sang Budha bersabda:

“Meskipun ia hafal banyak seloka kitab suci, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan sila, ia dapat diibaratkan sebagai gembala yang bertugas menjaga sapi orang lain. Sebenarnya ia tidak mempunyai bagian untuk mencapai tingkat kesucian. Tetapi meskipun ia hafal sedikit seloka kitab suci, tetapi perilakunya sesuai dengan sila, ia bebas dari semua ikatan nafsu, bersih dari kebencian dan semua ikatan, ia memiliki bagian dari kesucian” (Warta Hindu Dharma, 1983:14).

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan menurut agama Hindu pada hakikatnya memiliki dasar konsep yang sama dengan pendidikan nasional. Namun pendidikan dalam perspektif Hindu lebih menekankan pada aspek sikap, artinya lebih mengutamakan pembentukan budi pekerti luhur dibandingkan dengan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang lebih banyak.

Dalam konsep pendidikan menurut agama Hindu dikenal istilah “*catur guru*”, yaitu:

1. *Guru rupaka*, yaitu orang tua yang melahirkan kita
2. *Guru pengajian*, artinya guru yang memberikan pendidikan rohani dan

pengetahuan suci untuk mendapat kesempurnaan

3. *Guru wisesa*, artinya pemerintah yang menjadi abdi kesejahteraan rakyat, tempat masyarakat bernaung diwaktu kesusahan
4. *Guru swadyaya*, artinya *Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Kuasa) Sang pencipta dunia beserta segala isinya, termasuk manusia di dalamnya.

C. Media

Media berasal dari bahasa Latin "*medium*" yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Di dalam proses belajar mengajar, media berarti sarana yang berfungsi menyalurkan pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat memengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran.

Pada awalnya media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu bagi guru untuk mengajar yang digunakan adalah alat bantu visual. Namun belakangan alat bantu visual itu telah dilengkapi alat bantu audio, sehingga lahirlah alat bantu *audio-visual*. Dari sini pengertian media lebih

berkembang menjadi alat, metode atau teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dengan murid dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Berdasarkan pengertian tentang media, maka dapat dikemukakan bahwa media merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengefektifkan pesan atau informasi baru kepada murid sebagai penerima pesan, sehingga bagi penerima pesan atau informasi dapat dengan mudah memahami dan menginterpretasikan pesan tersebut. Atas dasar itu maka peranan media dalam proses pembelajaran sangat penting.

Proses belajar itu tidak hanya berlangsung dalam pendidikan formal atau hanya berlangsung di sekolah saja, namun pendidikan itu juga dapat berlangsung di luar sekolah seperti di masyarakat, yang lazim dikenal sebagai pendidikan nonformal, dan juga dapat berlangsung di dalam keluarga yang lazim dikenal sebagai pendidikan informal.

Ditinjau dari sifat media, *megeguritan* itu dapat dimasukkan ke dalam media audio yaitu media atau alat bantu yang dipergunakan dengan cara mendengarkan. Oleh karena *megeguritan* itu adalah aktivitas *matembang* yang pelaksanaannya

tidak terbatas pada kelompok orang saja, melainkan dapat diikuti oleh setiap orang.

Atas dasar itulah, *megeguritan* merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan karakter baik dalam pendidikan formal di sekolah maupun dalam pendidikan informal di keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat.

D. Pendidikan Karakter

Dalam membangun negara dan bangsa yang lebih bermartabat dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang demikian, pendidikan menempati posisi sentral dan sangat strategis. Melalui proses pendidikan yang berkualitas akan lahir Sumber Daya Manusia yang cerdas, unggul, dan kompetitif dalam persaingan global.

Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia: yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2005:506) karakter diartikan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain. Sementara itu Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (2010:2) menyatakan bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan (sekolah), dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

Thomas Lickona (1992) menyampaikan beberapa alasan mengapa pendidikan karakter diperlukan, seperti berikut: 1) banyaknya generasi muda saling melukai karena lemahnya kesadaran nilai-nilai moral; 2) memberikan nilai-nilai moral pada generasi muda yang merupakan salah satu fungsi peradaban yang paling utama; 3) peran sekolah-sekolah sebagai wahana pendidikan

karakter menjadi semakin penting ketika banyak anak-anak memperoleh sedikit pengajaran moral dari orang tua, masyarakat atau lembaga keagamaan; 4) adanya nilai-nilai moral yang secara universal masih diterima di tengah masyarakat seperti: perhatian, kepercayaan, rasa hormat, dan tanggung jawab; 5) demokrasi memiliki kebutuhan khusus untuk pendidikan moral karena demokrasi merupakan peraturan dari, untuk, dan oleh masyarakat; 6) komitmen pada pendidikan karakter menjadi sangat penting ketika kita mau dan terus menjadi guru yang baik; dan 7) pendidikan karakter yang efektif membuat sekolah lebih beradab, peduli pada masyarakat.

Alasan yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa pendidikan karakter sangat perlu ditanamkan sedini mungkin untuk mengantisipasi persoalan di masa depan yang semakin kompleks seperti semakin rendahnya perhatian dan kepedulian anak terhadap lingkungan sekitarnya, tidak memiliki rasa tanggung jawab, rendahnya kepercayaan diri dan lain-lain.

Sementara itu Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (2010:2) menyatakan bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap

individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan karakter perlu disikapi dan diperlakukan sebagai suatu gerakan nasional dan harus menjadi komitmen seluruh lapisan masyarakat dalam membangun karakter bangsa.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan (sekolah), dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

Ahli lain mengatakan pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan secara individu dan sosial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kebebasan individu itu sendiri (Koesoema, 2007).

Berpijak pada beberapa pemahaman di atas, maka pendidikan karakter harus mampu memetakan dengan baik hubungan antara pendidikan karakter dengan pembentukan manusia ideal. Yang dikatakan sebagai manusia ideal adalah manusia yang baik secara moral, memiliki pribadi yang kuat dan tangguh secara fisik, mampu mencipta dan mengapresiasi seni, bersahaja, adil,

cinta tanah air, bijaksana, beriman teguh pada Tuhan Yang Maha Esa.

E. *Megeguritan*

Di dalam Kamus Bali - Indonesia (1991:254) kata "*megeguritan*" berasal dari kata "*gurit*" yang berarti "gubah, karang, sadur", yang mendapatkan akhiran (*pengiring - an*) menjadi *guritan* yang berarti gubahan, saduran, karangan. Apabila kata *gurit* direduplikasi dalam bahasa Indonesia dan mendapat sufik "an", maka akan menjadi kata "*geguritan*". *Geguritan* berarti saduran cerita yang berbentuk *tembang* atau *pupuh*.

Dalam seni karawitan Bali, *geguritan* adalah *pupuh* yang digubah untuk menceritakan suatu kisah cerita rakyat. Kata *geguritan* yang mendapatkan awalan (*pengater - ma*), maka menjadilah "*megeguritan*" yang secara sederhana dapat dirumuskan bahwa "*megeguritan*" mengandung pengertian memahami isi sebuah cerita lewat melagukan (*matembang*).

Dalam tulisan yang berjudul "*Geguritan Sebuah Bentuk Karya Sastra Bali*" (Agastia, 1980) menyebutkan *geguritan* adalah suatu karya sastra tradisional (klasik) yang mempunyai sistem konvensi sastra tertentu. *Geguritan* sebagai karya sastra yang konvensio di dalam membacanya

tidaklah seperti membaca prosa. Hal ini disebabkan karena *geguritan* itu dibentuk oleh “*pupuh*”, yang mana *pupuh* itu diikat oleh beberapa syarat. Syarat-syarat *pupuh* disebut *padalingsa*, yaitu banyaknya baris dalam tiap-tiap *pada* (bait), banyaknya suku kata dalam tiap-tiap *carik* (baris), dan bunyi akhir pada tiap-tiap baris menyebabkan *pupuh* itu harus dilagukan.

Dengan adanya keterikatan seperti itu, maka *geguritan* itu sifatnya masih sederhana, sebab di dalam membaca *geguritan* dilaksanakan dengan melagukan. Adapun jumlah tembang yang sudah lumrah dipakai dalam *megeguritan* seperti *sekar rare*, *sekar alit*, *sekar madya*, dan *sekar agung*. Dari masing-masing tembang ini ada bagian-bagian tersendiri, seperti: *sekar rare* adalah gending-gending *macepat*, *sekar alit* adalah *pupuh-pupuh*, *sekar madya* adalah kidung-kidung, dan *sekar agung* adalah kekawin.

Bila ditinjau dari arti katanya, *geguritan* itu berasal dari bahasa Bali yang artinya “*gubah*”, karang, sadur dalam kata benda karangan, gubahan dan saduran. Selanjutnya kata *gurit* ini digabungkan dengan vokal maupun konsosnan akan menjadi “*gurit*”, dalam bahasa Bali berarti *ngurit*, artinya mengubah bentuk kata kerja.

Apabila kata *gurit* mendapatkan awalam me, maka akan menjadi kata "*magurit*", yang menyatakan bahwa sesuatu itu telah digubah. Apabila kata *gurit* mendapat akhiran an akan menjadi "*guritan*" artinya gubahan, saduran karangan, dan apabila kata *gurit* dididwipurwayang atau direduplikasikan (Bahasa Indonesia) dan mendapat sufik "*an*" maka menjadi kata "*gaguritan*", artinya orang yang melakukan kegiatan *matembang*. *Geguritan* itu adalah *pupuh* yang digubah untuk menceritakan, mengisahkan suatu kisah atau cerita rakyat (Mandra, 1982:12).

Atas dasar pengertian di atas, *megeguritan* dalam penelitian ini dimaksudkan gubahan, saduran cerita-cerita rakyat yang sarat dengan nilai-nilai keteladanan, etika dan estetika yang disusun dalam bentuk *tembang* atau *pupuh* yang kalau membacanya dilakukan dengan melagukan atau *matembang* (*mageguritan*), dalam upaya membangun pendidikan karakter di tengah semakin derasnya arus budaya global.

III. Tujuan Megeguritan dan Pendidikan Karakter

A. Tujuan Megeguritan

Agastya (1980:16) mengatakan bahwa *geguritan* itu merupakan karya sastra tradisional dan klasik yang memiliki sistem konvensi sastra

tertentu. *Geguritan* itu sesungguhnya merupakan salah satu wujud kebudayaan, khususnya kebudayaan yang berbentuk karya sastra Bali. Oleh karena itu sebuah karya sastra itu terwujud adalah didasari oleh cipta, rasa, dan karsa manusia.

Karya sastra ini di dalamnya banyak mengandung unsur-unsur pendidikan yang sangat baik bagi manusia khususnya kalangan generasi muda. Sebagai sebuah karya sastra maka harus diketahui oleh setiap manusia semenjak ia dilahirkan sampai menjelang akhir hayat hidupnya. Atas dasar itu, maka aktivitas *megeguritan* yang dilakukan akan dapat melestarikan salah satu wujud kebudayaan.

Dengan adanya aktivitas *megeguritan* maka dapat dipastikan bahwa karya sastra tradisional tinggalan/warisan nenek moyang yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etika dan estetika yang amat tinggi ini akan dapat dilestarikan, dan bahkan ke depan akan selalu digali makna-makna yang ada di balik karya sastra itu.

Oleh karena setiap *pupuh* yang digunakan untuk melagukan karya sastra itu terimplikasi sebuah watak, karakter atau jati diri sang tokoh. Hal ini tentu sangat positif dijadikan sebagai pola anutan bagi generasi muda dalam rangka

memaknai hidup yang senantiasa mengalami dinamika secara terus-menerus.

Dalam setiap aktivitas *megeguritan* orang akan memilih sebuah karya sastra tertentu yang di dalamnya menggambarkan sebuah kejadian atau peristiwa. Untuk melukiskan suatu kejadian atau peristiwa yang ada dalam karya sastra itu dipilihlah *pupuh/tembang* yang akan menggambarkan peristiwa tersebut. Dalam kaitan ini Agastya (1980:18) menyebutkan sebagai berikut.

- 1) *Pupuh sinom*, biasanya dipakai untuk menggugah hal-hal keindahan, kebahagiaan, kesenangan, keceriaan, kegiatan mudamudi, pendeknya hal-hal yang bersifat menggembirakan.
- 2) *Pupuh durma*, dipakai untuk menceritakan hal-hal mengenai kekacauan, peperangan, kemarahan, permusuhan, dan hal-hal seperti itu.
- 3) *Pupuh semarandana*, biasanya dipakai untuk menggugah diseputar asmara, kasih sayang, tangis, kesedihan, pendeknya hal-hal yang mengharukan.
- 4) *Pupuh pucung*, dipakai menceritakan hal-hal yang lucu-lucu, nasehat-nasehat, teka-teki, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa *megeguritan* itu bukan hanya dilakukan oleh kalangan tua-tua saja, namun ada *geguritan* yang cocok untuk kalangan muda-mudi. Sementara di masyarakat sering kali masalah *megeguritan* diidentikkan dengan orang tua. Artinya bahwa aktivitas *megeguritan* itu hanya cocok dilakukan oleh golongan tua saja. Namun faktanya bahwa *megeguritan* itu terutama dilihat dari *pupuh* yang digunakan bisa dilakukan oleh generasi muda.

Kenyataan ini diperkuat hasil penelitian Brata (2015) bahwa aktivitas *megeguritan* bukan lagi monopoli dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua-tua (lanjut usia), namun *megeguritan* itu dapat dilakukan oleh kalangan muda bahkan oleh semua lapisan masyarakat.

Atas dasar kenyataan itulah, maka aktivitas *megeguritan* dapat dijadikan sebagai salah satu media pendidikan karakter terutama bagi generasi muda. Sebab melalui aktivitas *megeguritan* banyak hal dapat disampaikan, seperti: pesan-pesan moral, nasehat-nasehat, kasih sayang, keindahan dan sebagainya.

B. Tujuan Pendidikan Karakter

Sebelum lebih lanjut dibahas tentang tujuan pendidikan karakter, terlebih dahulu akan

dipahami tentang pengertian etika. Etika mempunyai kaitan yang sangat erat dengan karakter. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani "etos", yang berarti adat, kebiasaan, peraturan perilaku, sama dengan istilah moralitas yang diartikan sebagai perilaku manusia dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Secara umum etika dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Etika sebagai kesusilaan, moral, akhlak atau disebut juga sebagai filsafat moral adalah dasar untuk pembentukan sikap ilmiah ; 2) Etik merupakan norma sopan santun yg mengatur tata pergaulan lahiriah. Kedua istilah ini, selanjutnya mengandung makna: (1) acuan berperilaku baik terpuji, misalnya jujur dan berkata yang benar; (2) watak pribadi terpuji, misalnya bersifat patriotik, solider; (3) nilai praktis, misalnya kelogisan, fungsional; dan (4) nilai moral kehidupan manusia, misalnya adil dan teguh pada kebenaran.

Sementara Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat (sekolah), bangsa dan negara. Oleh karena itu karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan (masyarakat), dan kebangsaan

yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, sangat jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang (termasuk pendidikan nonformal di masyarakat), harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Hal ini berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik dan generasi muda sebagai penerus bangsa sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun, dan berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan

karakter peserta didik/generasi muda sangat penting untuk ditingkatkan.

Atas dasar itulah maka pendidikan karakter menjadi sangat penting, sebab melalui pendidikan karakter harus mampu memetakan dengan baik hubungan antara pendidikan karakter dengan pembentukan manusia ideal. Karakter dapat menuntun dan mengarahkan perilaku etis manusia yang cenderung bersifat permanen. Karakter menampakkan diri dalam perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan.

Thomas Lickona (1992) tokoh pendidikan dari Cortland University yang begitu konsisten menganjurkan betapa pentingnya pendidikan budi pekerti mengungkapkan bahwa ada sepuluh tanda jaman dewasa ini terjadi, namun harus diwaspadai karena dapat membawa suatu bangsa menuju ambang kehancuran. Kesepuluh tanda jaman tersebut meliputi: 1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja/masyarakat; 2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk/tidak baku; 3) pengaruh *peer group* (geng) dalam tindak kekerasan, menguat; 4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan sex bebas; 5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk; 6) menurunnya etos kerja; 7)

semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; 8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok; 9) membudayanya kebohongan/ketidakjujuran, dan; 10) adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama.

Dalam upaya membentengi generasi muda agar tidak mudah terseret dalam arus budaya global maka diperlukan pembangunan karakter yang kuat. Membangun karakter yang kuat dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Dengan adanya pendidikan karakter yang semula generasi muda dengan begitu saja menerima informasi dan budaya yang masuk tanpa memfilternya terlebih dahulu tentu dapat dihindarkan sehingga menjadi lebih selektif dalam menerima informasi/pengaruh yang masuk.

Megeguritan sebagai salah satu media pendidikan karakter dapat dijadikan sebagai filter penyaring masuknya berbagai informasi dalam budaya global. Dalam *Megeguritan* banyak hal yang dapat diperoleh, tidak terbatas orang dapat melagukan, namun yang paling penting bahwa dalam setiap bait-bait *geguritan* itu tertanam nilai-nilai kearifan yang dapat dijadikan sebagai suri tauladan bagi generasi muda dalam menghadapi gempuran budaya global (Brata, 2016).

C. Peranan *Catur Guru* dalam Pendidikan Karakter

Dalam ajaran agama Hindu dikenal ajaran *catur guru*, seperti: guru *rupaka*, guru *pengajian*, guru *wisesa*, dan guru *swadhyaya*. Selama ini yang sering dibahas adalah bagaimana seseorang wajib menghormati keempat guru yang ada. Jarang dibahas bagaimana sesungguhnya peranan dari *catur guru* dalam kehidupan manusia. Bagaimana seharusnya seorang guru mengajarkan pengetahuan atau membimbing murid-murid/anak didiknya.

1. Peranan *Guru Rupaka*

Sejak kecil setiap anak diajarkan bagaimana caranya menghormati kepada orang tua yang melahirkan kita. Ayah dan ibu yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya sehingga menjadi seperti sekarang. Kedua orang tua yang melahirkan kita disebut sebagai *guru rupaka*. Sebagai orang tua, beliau mengajarkan berbagai hal, terutama tentang nilai dan norma dalam kehidupan, oleh karena itu sudah sepatutnya kita hormat kepada mereka.

Orang tua (*guru rupaka*) memang sudah sepatutnya menjadi guru bagi anak-anaknya. Sebagai guru, orang tua seharusnya menjadi

contoh, suri tauladan bagi anak-anaknya. Setiap gegar-gerik sebagai tingkah laku orang tua cenderung akan ditiru oleh anak-anaknya, maka sesuai dengan pepatah lama mengatakan “kalau orang tuanya jagung, anaknya pasti jagung”, namun dalam konteks kehidupan global apakah pepatah itu dapat dijamin kebenarannya pasti seperti itu? Kenyataan ini perlu dikaji ulang.

Berpijak dari konsep *guru rupaka*, maka orang tua seharusnya menjadi panutan bagi anak-anaknya. Orang tua harus mampu menjadi role model dalam kehidupan anak-anaknya. Setiap perbuatan yang dilakukan di hadapan anak-anaknya akan menjadi contoh bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Ketika orang tua menyuruh anaknya untuk rajin membaca buku, sementara orang tuanya jarang bahkan tidak pernah terlihat membaca buku di hadapan anak-anaknya, lalu bagaimana orang tua dapat mengharapkan kepada anak-anaknya menjadi rajin membaca buku.

Dalam hal ini, yang dibutuhkan anak-anak dari orang tuanya adalah panutan, bukan sekedar ucapan apalagi disertai bentakan. Anak-anak membutuhkan figur yang dapat dijadikan suri tauladan bagi kehidupannya. Apabila orang tua menginginkan agar anak-anaknya mau

mempelajari ajaran-ajaran agama Hindu di rumah, maka sebagai orang tua wajib memberi contoh membaca karya-karya sastra dan mempelajari buku-buku keagamaan. Dalam urusan pendidikan agama orang tua tidak boleh hanya menyerahkan tanggung jawab kepada bapak/Ibu guru di sekolah. Orang tua sesungguhnya dapat berperan sebagai guru agama di rumah.

2. Peranan *Guru Pengajian*

Memasuki usia sekolah anak-anak mulai berkenalan dengan Bapak/ Ibu guru di sekolah. Guru di sekolah akan mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anaknya. Mulai dari belajar membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Di samping itu juga diajarkan berbagai pengetahuan sosial kemasyarakatan, pengetahuan alam, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan agama dan budipekerti.

Tanpa peranan guru pengajian, rasanya tidak mungkin anak-anak sebagai generasi muda bangsa ini ada pada posisi seperti dewasa ini, oleh karena itu sudah sepatutnya generasi muda patuh dan hormat kepada guru pengajian.

Peranan guru di sekolah sangatlah besar dalam mendidik putra-puteri bangsa sebagai

generasi muda penerus cita-cita bangsa. Ditangan para gurulah sesungguhnya tumpuan nasib bangsa ini disandarkan di masa-masa mendatang. Guru pasti menyadari, bahwa semua anak didiknya memiliki potensi diri yang luar biasa, bahkan tanpa batas.

Batas-batas yang ada pada diri mereka sesungguhnya diciptakan oleh dirinya sendiri melalui sistem keyakinan yang dianut, yang ditanamkan sejak kecil. Oleh karena itulah guru di sekolah diharapkan dapat membantu mereka dalam mengikis batas-batas tersebut.

Guru harus mampu merangsang dan memotivasi tumbuh dan berkembangnya kreativitas peserta didik. Di samping itu, guru juga dituntut mampu mengembangkan kreativitas yang telah dimiliki peserta didik. Untuk kepentingan itulah guru harus ramah, jangan lagi menjadi guru yang ditakuti murid, tetapi jadilah sosok guru yang dirindukan dan dicintai oleh anak didiknya.

Agar dapat menjadi peribadi yang demikian, seorang guru pertama-tama harus memiliki jiwa terpenggil untuk mencintai pekerjaannya sebagai guru. Keterpenggilan yang menumbuhkan rasa mencintai pekerjaan inilah akan melahirkan sikap totalitas, penuh pengabdian. Guru seperti ini akan merasa bangga apabila anak didiknya berhasil

bahkan melampaui kemampuan dirinya sendiri sebagai gurunya.

3. Peranan *Guru Wisesa*

Kita hidup dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agar kehidupan suatu negara dapat berjalan secara aman dan teratur, maka mutlak dibutuhkan suatu pemerintahan. Dalam ajaran agama Hindu, pemerintahan disebut sebagai *guru wisesa*. Sebagai warga suatu masyarakat, baik dalam ikatan Banjar Dinas/Adat, Pakraman/Desa Adat, maka wajib hukumnya untuk patuh dan taat kepada pemerintahan yang ada.

Pemerintah sebagai *guru wisesa* adalah orang-orang yang dipilih sehingga benar-benar dapat memerintah rakyatnya, karena mereka memiliki kompetensi yang baik sebagai pemimpin. Pemerintah wajib menjadi inspirator bagi rakyat yang dipimpinnya. Di samping sebagai inspirator, pemerintah juga wajib menjadi suri tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Segala sepak terjang sebagai pemimpin harus mencerminkan sikap mental yang dapat disuritaauladani masyarakatnya. Pemerintah harus bisa menjadi sosok yang dicintai dan sekaligus dapat mencintai rakyatnya, tanpa membedakan

suku, agama, ras, antar golongan, dan status sosial warga masyarakatnya.

4. Peranan *Guru Swadhyaya*

Berdasarkan ajaran agama Hindu, tidak ada keraguan sedikitpun bahwa *Sang Hyang Widhi* (Tuhan Yang Maha Esa) sangat diyakini sebagai pencipta dunia ini beserta isinya. Oleh karena itu, umat manusia wajib menjunjung dan menghormati sebagai *Sang Sangkan Paraning Dumadi*. Tanpa *Sang Hyang Widhi* manusia dan segala isi dunia ini tidak akan pernah ada termasuk dunia inipun tidak mungkin ada. Untuk itulah umat wajib menghormati, bhakti, dan senantiasa memuja kebesaran-Nya.

Guru Swadhyaya juga disebut sebagai guru sejati karena beliau adalah *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Dinyatakan sebagai guru karena Tuhan merupakan pembimbing utama umat manusia yang tiada bandingannya. Tuhan adalah mahasempurna, mahatahu, mahakuasa, dan mahasakti. Atas dasar itulah manusia wajib mewujudkan rasa bhakti secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas kepada sang pencipta dunia ini beserta isinya.

a. Megeguritan sebagai Media Pendidikan Karakter

Dalam perspektif sosiologi, manusia dikatakan sebagai makhluk *homo socius* yaitu makhluk berteman. Manusia tidak dapat hidup sendirian, manusia selalu ingin bersama-sama dengan orang lain atau dengan sesamanya. Manusia hanya dapat hidup dengan sebaik-baiknya, dan bahkan manusia baru akan berarti apabila manusia hidup secara bersama-sama dengan sesamanya dalam wadah masyarakat.

Pernyataan di atas sesungguhnya menegaskan bahwa pada hakikatnya dalam hidupnya manusia selalu memerlukan bantuan antar sesamanya. Artinya manusia tidak dapat dan tidak mungkin dapat hidup seorang diri, namun manusia akan selalu tergantung antar sesamanya.

Ketergantungan manusia antar sesamanya disebabkan karena manusia di dalam hidupnya memiliki berbagai macam kebutuhan untuk menopang hidupnya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan itulah manusia membentuk relasi, menjalin kerjasama satu dengan yang lainnya.

Pada garis besarnya kebutuhan manusia ada dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani misalnya kebutuhan akan rumah sebagai tempat berteduh, beristirahat,

dan bersenda gurau, pakaian, makan, dan pendidikan. Kebutuhan rohani seperti kebutuhan akan kasih sayang dari orang-orang terdekat, harga diri, hiburan, dan sebagainya.

Seiring dengan dinamika masyarakat, kebutuhan manusia juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Dalam pemenuhan kebutuhan yang beranekaragam itu manusia melakukan usaha-usaha, namun dalam pemenuhan kebutuhan yang semakin kompleks itu terkadang manusia lupa dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam hidup bermasyarakat.

Agar perjuangan manusia di dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, maka perlu adanya pengendalian diri agar apa yang dilakukan/dikerjakan tidak sampai melanggar nilai, norma, dan aturan-aturan yang dimaksud.

Apabila manusia mampu mengendalikan diri untuk menjauhi dan menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai, norma, dan aturan di masyarakat, maka manusia yang demikian dapat dikatakan manusia yang telah memiliki karakter.

Dalam Kitab Sarasmuscaya seloka 41 tentang pelaksanaan *dharma* dijelaskan sebagai berikut.

“Na tata parasya sandadhyat

*Pratikulum yadatmanah
Esa samsepto dharma
Kamadnyat prapartate"*

Artinya:

"Adapun yang engkau perhatikan adalah hal yang ditimbulkan oleh perbuatan, perkataan, dan pikiran yang tidak menyenangkan dirimu sendiri, malahan menimbulkan kesusahan yang menyebabkan sakit hati, yang demikian itu janganlah engkau lakukan kepada orang lain, jangan tidak mengukur baju dibawa sendiri perilaku demikian itu singkatnya itulah *dharma* namanya. Penyimpangan dalam melaksanakan *dharma* yang demikian hendaknya jangan engkau lakukan" (Puja, 1979 :29).

Apa yang tersurat dalam seloka agama itu sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kearifan-kearifan lokal yang ada di masyarakat yang disampaikan dengan menggunakan berbagai bahasa simbol (Brata, 2016). Misalnya bagaimana cara manusia mengendalikan diri dalam hidup bermasyarakat yang disampaikan lewat tembang dalam *pupuh Pucung* sebagai berikut.

*"Eda caluh
Nyalanang bikase sigug
Brangti lobangkra
Ento sutsutin di hati*

Pang de ngliput

Ngawe saranta di jalan"

Apabila *pupuh* di atas dicermati secara saksama, di dalamnya mengandung pesan yang begitu dalam bahwa jangan sampai kita berbuat yang kurang baik atau tidak terpuji, seperti *momo angkara* (loba atau selalu ingin bagian yang lebih), sebab hal itu akan dapat mengakibatkan manusia tersesat dalam hidup ini.

Berpijak pada dua kutipan *pupuh* di atas maka sangat jelas tersirat sebuah makna bahwa suatu etika atau karakter dapat menyangkal yang ditimbulkan oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan. Atas dasar itu, maka dapat dikatakan bahwa *megeguritan* itu memang benar dapat dijadikan sebagai salah satu media dalam menanamkan pendidikan karakter di kalangan generasi muda. Merupakan suatu fakta bahwa di dalam syair-syair *geguritan* itu banyak tersembunyi nilai-nilai karakter yang sangat bermanfaat baik bagi pembaca syair-syair sendiri maupun bagi mereka yang menikmati/mendengarkannya.

Geguritan itu tidak hanya indah ketika dilagukan, namun ternyata di dalamnya begitu kaya dengan pesan-pesan moral yang amat berguna sebagai pegangan dalam mengarungi kehidupan ini. Kegiatan *megeguritan* berdampak positif

terhadap keperibadian seseorang. Sebab melalui kegiatan *megeguritan* seseorang dapat mengekspresikan seninya dengan cara melagukan (guru lagu), di samping itu di dalam syair-syair yang sedang dilagukan di dalamnya banyak terkandung pedoman/petunjuk tentang kebenaran, sehingga mereka dapat membedakan mana perbuatan yang dibenarkan dan mana perbuatan yang harus dihindarkan dan bila perlu jangan dilakukan. Misalnya petunjuk tentang perbuatan baik dapat ditunjukkan dalam sebuah *pupuh durma* seperti berikut:

*“Sang nyidayang ngeret indriya lan manah
Panjang yusa to kapanggih
Langgeng jroning yoga
Luput saking papa klesa
Nyama braya
Sami asih tulus bhakti”*

Apabila dicermati lebih saksama, sesungguhnya pesan moral yang terkandung di dalam *geguritan* itu bahwa siapa saja yang mampu dan berhasil mengendalikan indria (pengendalian diri), pasti orang itu berusia panjang, tidak akan kekurangan apa-apa termasuk teman semuanya akan bersikap baik.

Aktivitas *megeguritan* itu merupakan salah satu cara di antara berbagai cara yang lain untuk menuntun sikap. Sebab di dalam syair-syair

geguritan banyak contoh-contoh tentang pikiran, perkataan, dan perbuatan terpuji atau yang pantas untuk dilakukan dan yang kurang pantas untuk dilakukan. Contoh tentang cara berpikir, berkata, dan berbuat dapat ditunjukkan lewat se bait syair *geguritan* dengan *pupuh pangkur* sebagai berikut.

“Manut bawos sang pradnyan

Ne kacatur

Patut baktinin tindihin

Tan lian sang catur guru

Guru rupaka pertama

Ne ping rua

Guru pengajian bagus

Ne ping telu kesinahang

Guru wisesa utami”

Dalam kaitan dengan *geguritan* yang disampaikan, *sekaa santhi/kidung* meyakini bahwa di dalam kehidupan ini siapapun tidak dapat lepas dari *sang pradnyan*. *Sang pradnyan* menyebutkan bahwa dalam hidup ini ada empat (4) guru yang harus dan wajib dihormati. Menghormati guru bukan karena usianya atau karena jabatannya, namun menghormati guru mengandung makna mengikuti semua petunjuk yang diberikan.

Disebut sebagai guru, karena mereka yang patut untuk digugu dan ditiru atau diteladani, dari cara berpikirnya, bersikapnya, perkataannya, dan perbuatannya. Dalam arti mereka yang memiliki

kharisma dan wibawa sehingga patut untuk ditiru dan diteladani.

Mereka menyandang predikat sebagai guru, karena rata-rata kemampuan yang dimiliki sangat dibutuhkan oleh yang lain sebagai pedoman berpikir, berkata, dan berperilaku. Dalam pemahaman yang sederhana guru adalah mereka yang memberikan ilmu pengetahuan kepada yang lain. Dalam pandangan masyarakat, guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu (sekolah, di rumah, masyarakat dll).

b. Generasi Muda dalam Pusaran Arus Budaya Global

Arus globalisasi yang begitu cepat masuk ke dalam masyarakat membawa pengaruh yang begitu kuat, terutama di kalangan generasi muda. Pengaruh globalisasi itu telah membuat kalangan generasi muda kehilangan keperibadian dan jati diri mereka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Kehilangan keperibadian dan jati diri, ditunjukkan melalui gejala-gejala yang timbul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya cara berpakaian serba minim yang ditampilkan generasi muda lebih cenderung mengikuti penampilan budaya barat.

Pemuda kerapkali diidentikkan dengan golongan yang memiliki sifat progresif, inovatif, memiliki sensitivitas, social-politik yang sangat peka terhadap perubahan, dan berbagai predikat lainnya. Sejarah negeri inipun mencatat betapa besar peranan pemuda sebagai perintis, penggalang, penggerak, dan pendobrak menuju cita-cita kemerdekaan. Selanjutnya pemuda juga telah menunjukkan dirinya sebagai penegak bahkan mampu sebagai pelopor untuk memformat ulang kehidupan kebangsaan sesuai cita-cita proklamasi yang harus disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman.

Globalisasi telah membentuk peradaban jaman dengan menyertakan gaya hidup praktis dan pragmatis. Bahkan globalisasi oleh sebagian generasi muda telah dijadikan sebagai “isme” baru dengan menderivat paham-paham kepraktisan hidup seperti materialisme, hedonisme hingga sifat konsumtif (Brata, 2012). Kondisi inilah yang terkadang memosisikan generasi muda ke suatu ruang yang memasung mereka ke dalam kenyamanan peradaban kapitalisme.

Dampak globalisasi di kalangan generasi muda di Bali telah menimbulkan situasi kegelisahan, sehingga masyarakat Bali merasa perlu mengadakan reorientasi kembali terhadap

kebudayaan Bali itu sendiri untuk menanggulangi atas kekhawatiran itu. Masyarakat Bali sangat meyakini Bali memiliki keunggulan lokal, Bali memiliki kearifan lokal yang sekiranya dapat dijadikan sebagai rujukan bagi generasi muda Bali dalam menghadapi semakin derasnya arus budaya global (Brata, 2016).

Kekhawatiran serupa juga ditunjukkan oleh berbagai kalangan seperti oleh seniman, budayawan, cendekiawan, politisi, dan tokoh adat pada masyarakat Bali. Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang wajar, mengingat daerah Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata Indonesia bagian tengah. Sebagai destinasi pariwisata, Bali akan kedatangan berbagai wisatawan mancanegara dengan berbagai karakter.

Kehadiran mereka tidak hanya secara fisik, namun mereka hadir dengan kebudayaan mereka masing-masing. Kebudayaan yang mereka bawa inilah yang dikhawatirkan dapat memengaruhi kalangan generasi muda di pulau ini. Budaya asing yang masuk terbungkus rapi oleh globalisasi terkadang mereka konsumsi dalam arti diterima mentah-mentah, mereka lupa sebagai orang Bali yang memiliki karakter sebagai bangsa ketimuran.

Budaya asing yang mereka saksikan lewat media sosial (TV, internet, dll) atau yang mereka

dapatkan melalui interaksi secara langsung dengan wisatawan sering kali mereka tidak dicermati terlebih dahulu. Apa yang mereka saksikan dan rasakan langsung mereka adopsi tanpa pernah berpikir apakah hal itu cocok bagi dirinya yang beridentitas sebagai orang Bali.

Dalam upaya untuk mengantisipasi dampak negatif dari arus budaya global di kalangan generasi muda, maka dibentuklah *sekaa-sekaa santhi* di masing-masing *banjar/desa pakraman* di Bali. Dalam wadah *sekaa-sekaa santhi/pesanthian* ini dilibatkan anak-anak muda/generasi muda. Pada awalnya anak-anak muda sangat enggan ikut kelompok *pesanthian*. Mereka punya alasan bahwa *sekaa santhi* itu identik dengan orang-orang yang sudah sepuh-sepuh (tua).

Dengan memberi pemahaman yang secara terus menerus dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh-tokoh *sekaa santhi* akhirnya membuahkan hasil, dengan ditunjukkan beberapa anak-anak muda desa mulai ikut dalam kegiatan *megeguritan*. Pada awalnya mereka ragu-ragu dan bahkan canggung, namun lama kelamaan akhirnya menjadi terbiasa tampil pada saat-saat upacara piodalan di pura atau di rumah warga apabila ada upacara-upacara tertentu.

Para generasi muda sadar bahwa *megeguritan* itu ternyata penting bagi kehidupan sosial budaya masyarakat Hindu Bali. Sebab *megeguritan* itu memiliki beberapa fungsi, seperti: 1) fungsi ketuhanan, artinya lewat *megeguritan* mereka tahu bermacam-macam sebutan dari Tuhan dan bagaimana cara mengagungkan Tuhan; 2) fungsi pendidikan moral (etika), artinya mereka memahami bahwa dalam teks *geguritan* terdapat tokoh-tokoh yang mengajarkan etika, agama yang patut dicontoh dan diteladanin; 3) fungsi upacara (ritual), artinya mereka memahami bahwa kidung, nyanyian (sebagai bagian dari *panca gra*) yang wajib ada untuk mengiringi sebuah *yadnya*; 4) fungsi pendidikan, artinya mereka memahami bahwa dalam *megeguritan* itu ada metode pendidikan seperti cara membacanya, bahasa dan artinya serta makna yang terkandung di dalamnya; 5) fungsi estetika, artinya mereka dapat mengetahui kemampuan, suasana hati atau perasaan pengarang ketika menciptakan syair dalam *geguritan* itu.

Berdasarkan fungsi-fungsi di atas, maka sangat diyakini aktivitas *megeguritan* dapat dijadikan sebagai salah satu media pendidikan karakter di kalangan generasi muda dalam upaya mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh arus budaya global. Nilai-nilai yang

terkandung di dalam karya sastra yang adiluhung tersebut terkandung nilai-nilai luhur bangsa sebagai kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai mekanisme kontrol atau sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, bertuturkata, bagi tingkah laku masyarakat terutama bagi generasi muda, agar tumbuh dan berkembang sebagai sosok generasi cerdas yang unggul dan tidak tercerabut dari akar budayanya.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. *Megeguritan* dapat dijadikan sebagai salah satu media pendidikan karakter bagi generasi muda terutama di dalam menghadapi semakin derasnya arus budaya global. Melalui perkumpulan *sekaa santhi*, anak-anak muda sebagai penerus bangsa diajarkan *megeguritan* yang di dalam karya sastra itu ternyata terkandung berbagai nilai-nilai karakter yang sangat cocok bagi generasi muda yang sedang mengalami berbagai gejolak sosial.
2. Aktivitas *megeguritan* dapat dijadikan sebagai filter penyaring untuk mengantisipasi dampak negatif dari arus

budaya global. Melalui *megeguritan* diyakini dapat menekan atau mengurangi dampak negatif dari arus budaya global, sebab aktivitas *megeguritan* mengandung fungsi: 1) fungsi ketuhanan; 2) fungsi pendidikan moral; 3) fungsi upacara (ritual); 4) fungsi pendidikan; dan 5) fungsi estetika. Fungsi-fungsi ini tentu sangat efektif di dalam mengantisipasi dampak negatif arus budaya global.

Daftar Pustaka

- Agastia, Ida Bagus Gede. (1980). *Geguritan sebagai Bentuk Karya Sastra Bali*. Panitia Pelaksana Pesta Kesenian Bali.
- Brata, Ida Bagus. (2015). *Megeguritan sebagai Media Pendidikan Karakter Bagi Generasi Muda dalam Menghadapi Arus Budaya Global (Studi Kasus di Desa Adat Bresela Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar)*. Penelitian tidak diterbitkan.
- Brata, Ida Bagus. (2016). *Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa*. Denpasar: Jurnal Bakti Saraswati (JBS).
- Dewantara, Ki Hajar. (2004). *Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

- Kemenuh, Ida Pedanda Putra. (1983). *Geguritan Dharma Prawerti*. Seksi Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama Kabupaten Buleleng.
- Koentjaraningrat. (2008). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koesoema, Doni A. (2007). *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Konta, Anak Agung Alit dan Putra. Tt. *Bandana Wandana Yuda*. Penerbit Proyek Penelitian Buku dan Sastra Indonesia.
- Lickona. Thomas. (1992). *Educating for Character. How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York A Bantam Book.
- Mantra, I B. (1996). *Bali Masalah Sosial dan Modernisasi*. Denpasar: PT Upada Sastra.
- Pudja, Gede dan Sudharta. Tt. *Menawa Dharma Sastra*. Proyek Pengadaan Penelitian Kitab Suci Hindu dan Budha Departemen Agama RI.
- Pudja, Gede. Tt. *Sarassmuscaya*. Proyek Pengadaan Buku Kitab Suci Hindu Departemen Agama RI.
- Tilaar, H.A.R. (2007). *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia Tinjauan dari*

Perspektif Ilmu Pendidikan. PT. Jakarta: Rineka Cipta.

Tilaar, H.A.R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

BAB V
PENDIDIKAN SEJARAH SEBAGAI
PENGUAT KARAKTER
DALAM MEMBANGUN MASA DEPAN
BANGSA

I. Pendahuluan

Para ahli sosial budaya berpendapat tidak ada masyarakat dan kebudayaan yang bersifat statis, melainkan selalu ada dalam sebuah dinamika. Masyarakat dan kebudayaan Indonesia telah menunjukkan sebuah dinamika dan perubahan yang sangat pesat. Pendorong utama perubahan yang terjadi adalah faktor internal yang sangat berpengaruh dalam mentransformasi masyarakat yang pada awalnya bersifat agraris kini beralih menuju masyarakat industri dan jasa.

Di samping faktor internal, fenomena eksternal juga ikut mendorong sehingga terjadi percepatan perubahan dalam masyarakat. Faktor eksternal yang dimaksud yaitu dampak dari *four T revolution* (*Telecommunication, Transportation, Trade, dan Tourism*). Percepatan ini terjadi adalah sejalan dengan sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang bersifat terbuka. Oleh karena itu pengaruh dari *four T revolution* itu sangat mustahil untuk dihindari.

Faktor eksternal ini membawa perubahan yang mencolok, cepat, dan begitu tajam pada era globalisasi. Revolusi pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Integritas dari *four T revolution* yang semakin cepat memaksa dunia pendidikan untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat intelektual. Oleh karenanya penguasaan kecakapan hidup di era global sangat diperlukan oleh generasi masa kini dan mendatang seiring dengan dinamika masyarakat.

Pengetahuan tentang dunia dan teknologi di era global berubah dan berkembang sangat pesat. Setiap negara maju maupun negara berkembang saling berlomba-lomba untuk menemukan pengetahuan baru untuk menciptakan produk baru. Seiring dengan berbagai temuan baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, menuntut perubahan cara mengajar dan cara belajar siswa.

Perubahan pengetahuan dan proses belajar, tentunya akan berpengaruh terhadap pengembangan bahan ajar, perancangan kurikulum, program pembelajaran termasuk penilaiannya. Namun di samping yang telah diuraikan di atas, tantangan yang menghadang dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini yaitu

tingkat pendidikan masyarakat, perekonomian yang belum menggembirakan, pemerataan pendidikan, dan mulai luntarnya nilai-nilai moral.

Sampai sejauh ini pendidikan sejarah di Indonesia masih dipahami sebagai pendidikan untuk memahami masa lampau, belum terkait dengan kehidupan masa kini, masih berkuat pada kemampuan hafalan fakta dan cerita sejarah untuk diceritakan kembali pada saat menjawab soal-soal ujian.

Pendidikan sejarah belum ditempatkan untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan, baik secara personal peserta didik maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Belum menjadi sejarah yang hidup atau sejarah yang dialami oleh peserta didik itu sendiri.

Sesungguhnya pembelajaran sejarah tidak hanya berfungsi memberi pengetahuan sejarah sebagai kumpulan fakta dan informasi peristiwa sejarah semata, namun setiap peristiwa yang terjadi harus dipahami secara selektif. Suatu peristiwa sejarah dapat bermakna secara langsung bagi peserta didik dan masyarakat apabila peristiwa sejarah itu dipahami secara objektif, mengapa peristiwa sejarah itu terjadi.

Melalui pembelajaran sejarah setidaknya tidaknya peserta didik dan masyarakat dapat

mengetahui keteladanan atau kelemahan pelaku sejarah. Keteladanan yang diwariskan harus diteruskan dalam membangun bangsa dan negara, sementara kelemahan yang ditunjukkan jangan sampai diulang atau ditiru bahkan bila dimungkinkan menghindari kelemahan yang dilakukan.

Belajar sejarah merupakan suatu bentuk pembelajaran dengan menjelaskan berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau yang akan dikaji di masa kini, dan sebagai pembanding di masa depan. Belajar sejarah sesungguhnya memiliki peranan penting, karena lewat peristiwa yang dipelajari peserta didik dapat mendekatkan diri dengan masa lampau sebagai pelajaran masa kini dan sebagai pembanding masa depannya.

Pendidikan sejarah dalam konteks kebangsaan merupakan upaya penyadaran setiap warga negara akan identitas/jati diri sebagai warga bangsanya. Pendidikan sejarah dalam dimensi nasional diarahkan pada pembentukan jati diri setiap individu sebagai warga bangsa. Atas dasar itu, maka pendidikan sejarah memiliki peranan strategis dalam penguatan bangsa, sebagai bangsa yang tangguh karena memiliki jati diri yang kokoh. Jati diri yang kokoh merupakan modal dasar pembangunan bangsa di masa depan.

Pendidikan dalam pembelajaran sejarah harus mampu mengarahkan peserta didik berpikir kritis dalam mengingat peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Tidak cukup hanya mengingat, namun peserta didik harus diarahkan dan diajak memahami peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Untuk mengingat dan memahami peristiwa masa lampau, berarti peserta didik telah diarahkan keterampilan berpikir kritis.

Keterampilan berpikir kritis peserta didik sesungguhnya bertujuan agar peserta didik lebih memahami konsep dan memaknai pembelajaran. Peserta didik tidak bersifat pasif, tidak hanya menerima apa yang disampaikan guru, namun mereka akan berusaha mencari kebenaran atas informasi yang mereka dapatkan. Atas dasar pemahaman ini, maka daya kritis peserta didik akan tampak dalam hal: berani mengemukakan pendapatnya, ketegasan dalam memutuskan sesuatu, dan bijaksana dalam menarik kesimpulan.

Daya kritis seperti ini tentunya tidak hanya ada pada saat proses pembelajaran sejarah terjadi, namun daya kritis ini mereka dapat praktikkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Keteladanan tokoh sejarah dapat dijadikan contoh

bagi peserta didik di dalam memahami setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupannya.

II. Kerangka Konseptual

A. Pengertian Sejarah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah diartikan sebagai riwayat kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi atau riwayat asal-usul keturunan (terutama raja-raja yang memerintah). Pengertian sejarah sesungguhnya cukup banyak, misalnya: Kuntowijoyo (1995:15) mengatakan sejarah adalah rekonstruksi masa lampau yang mempunyai makna sosial. Sementara menurut Carr (2014:4) berpendapat sejarah merupakan dialektika antara masa sekarang dan masa lampau.

Dalam bukunya yang berjudul Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Sartono Kartodirdjo (1988) membagi pengertian sejarah pada pengertian subjektif dan objektif. Sejarah dalam arti subjektif merupakan konstruk yaitu bangunan yang disusun penulis sebagai uraian atau cerita. Uraian atau cerita tersebut merupakan kesatuan atau unit yang mencakup fakta-fakta yang dirangkai untuk menggambarkan gejala sejarah, baik proses maupun struktur.

Disebut dengan subjektif karena sejarah memuat unsur-unsur dan isi subjek (pengarang, penulis). Gambaran sejarah tersebut merupakan penggambaran atau rekonstruksi dari pengarang sehingga memuat sifat-sifatnya, gaya bahasanya, struktur pemikirannya, pandangannya, dan lain-lain. Artinya setiap sejarawan memiliki kekhasan masing-masing dalam menginterpretasikan sebuah peristiwa sejarah.

Adapun, sejarah dalam arti objektif menunjuk pada kejadian atau peristiwa, yaitu proses sejarah dalam aktualitasnya. Suatu kejadian yang pernah terjadi tidak dapat diulang atau terulang lagi. Bagi orang yang mengalami suatu kejadian, ia hanya dapat mengamati sebagian dari totalitas kejadian tersebut. Jadi, tidak mungkin mempunyai gambaran umum seketika. Oleh karena itu, pendapat bahwa "sejarah berulang" tidaklah salah karena masuk pada pengertian subjektif, sedangkan pendapat bahwa "kita perlu belajar sejarah" termasuk pengertian objektif.

Bertolak dari beberapa pendapat tersebut di atas, berarti sejarah dapat diartikan bukan hanya memperbincangan masa lalu, melainkan aktivitas manusia baik secara individu maupun kelompok dan ketika berinteraksi selalu dilandasi oleh gagasan dalam dimensi ruang dan waktu.

Dialektika dalam pemikiran Carr sesungguhnya dapat diartikan bahwa sejarawan selalu berdialog secara terus-menerus dengan sumber sejarah.

B. Pendidikan Sejarah.

Pendidikan sejarah mempunyai tujuan untuk menanamkan dan mengembangkan kesadaran sejarah dalam diri peserta didik. Pendidikan sejarah dalam kaitan ini tentu lebih menekankan pada aspek pembelajaran, guna terbentuknya peserta didik yang memiliki kesadaran sejarah, yaitu menjadikan pengalaman historis sebagai referensi dalam menyikapi kehidupan masa kini dan membangun masa depannya.

Sartono Kartodirdjo (1988) memandang bahwa sejarah nasional sebagai tuangan pengalaman kolektif bangsa merupakan karakteristik pokok bagi bangsa Indonesia. Artinya bahwa identitas kolektif menunjukkan kepada keberibadian nasional. Oleh karenanya kesadaran sejarah akan memperkokoh eksistensi dan identitas serta keberibadian suatu bangsa dalam upaya mewujudkan *character building* bangsanya yang dapat direpresentasikan melalui rasa bangga akan sejarah dan nilai-nilai budaya bangsanya.

Hal inilah yang menjadi alasan mendasar betapa pentingnya pemahaman terhadap sejarah

bangsa ditanamkan kepada setiap individu sejak dini, sehingga siapapun di antara mereka dapat memahami makna dari peristiwa masa lampau sehingga dapat digunakan sebagai landasan sikap dalam menghadapi kenyataan pada masa sekarang serta menentukan masa yang akan datang. Atas dasar itu pendidikan sejarah menjadi penting dan sangat strategis dipelajari oleh setiap individu maupun masyarakat baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Menurut Sartono Kartodirdjo (1999:33) pendidikan sejarah merupakan suatu proses enkulturasi dalam rangka *national building*, dan proses pelebagaan nilai-nilai positif, seperti nilai-nilai warisan leluhur, nilai-nilai *heroism* dan nasionalisme, nilai-nilai masyarakat industri, maupun nilai-nilai ideologi bangsa. Nilai-nilai seperti ini diharapkan berkembang pada tingkat individu maupun kolektif bangsa yang tercermin dalam etos budaya bangsa.

Pembelajaran merupakan jantung dari proses pendidikan dalam suatu institusi pendidikan. Pendidikan sejarah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk keperibadian bangsa, kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencapaian kualitas pembelajaran di satu sisi menjadi tanggungjawab

profesionalitas seorang guru, sementara untuk menciptakan sistem pembelajaran yang berkualitas, lembaga pendidikan bertanggungjawab terhadap terbentuknya tenaga pengajar yang berkualitas.

Tanggung jawab profesional guru dapat ditunjukkan misalnya melalui penciptaan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Dalam proses pembelajaran peserta didik membutuhkan suasana yang kondusif, misalnya dengan menyediakan fasilitas untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Terbentuknya tenaga yang berkualitas, sangat berpengaruh terhadap perkembangan intelektualitas, sikap, dan moral peserta didik.

Pembelajaran pada era globalisasi membutuhkan pengetahuan dan berbagai kecakapan hidup, agar peserta didik mampu memberdayakan dirinya untuk menemukan, menafsirkan, menilai, dan menggunakan informasi, sehingga mampu melahirkan gagasan kreatif untuk menentukan sikap dalam pengambilan keputusan.

Mengajarkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah secara efektif kepada peserta didik di era dewasa ini menjadi sangat penting. Belajar berpikir kritis memberi peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan lain seperti tingkat konsentrasi yang lebih tinggi,

kemampuan analisis yang lebih mendalam, dan alur berpikir yang lebih baik.

Menurut Hamid Hasan (2007:7) terdapat beberapa pemaknaan terhadap pendidikan sejarah. *Pertama*, secara tradisional pendidikan sejarah dimaknai sebagai upaya untuk mentransfer kemegahan bangsa di masa lampau kepada generasi muda. Dalam posisi yang demikian maka pendidikan sejarah adalah wahana bagi pewarisan nilai-nilai keunggulan bangsa. Dengan posisi seperti ini pendidikan sejarah ditujukan untuk membangun kebanggaan bangsa dan sekaligus sebagai wahana untuk melestarikan keunggulan tersebut.

Kedua, pendidikan sejarah berkenaan dengan upaya memperkenalkan peserta didik terhadap disiplin ilmu sejarah. Oleh karena itu kualitas yang meliputi cara berpikir kronologis, pemahaman sejarah, kemampuan analisis, dan penafsiran sejarah, kemampuan penelitian sejarah, kemampuan analisis isu dan pengambilan keputusan (*historical issues-analysis and decision making*) menjadi tujuan penting dalam pendidikan sejarah.

Peranan pendidikan sejarah dalam pembentukan sikap nasionalisme guna mengantisipasi tantangan di era global dan

termasuk berbagai konflik dan gejolak sosial yang melanda Indonesia akhir-akhir ini sangat dibutuhkan. Pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa sikap nasionalisme mampu membangkitkan dinamika sosial di masa lalu. Sikap nasionalisme yang dimiliki rakyat Indonesia terbukti mampu menghantarkan bangsa menuju kemerdekaan di tengah-tengah kondisi bangsa yang berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, persatuan dan kesatuan masih relatif rendah.

Dewasa ini peran pendidikan sejarah patut dipertanyakan, sikap nasionalisme yang dimiliki bangsa menunjukkan kerapuhan. Konflik antar suku dan agama karena perbedaan cara pandang, dan timbulnya berbagai gejolak sosial di tengah-tengah kehidupan berbangsa merupakan bukti bahwa kesatuan nasional yang sudah cukup lama dibangun oleh pendiri negara ini ternyata masih rapuh.

Materi sejarah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen Diknas) No.22 Tahun 2006 sbb:

1. Mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses

pembentukan watak dan keperibadian peserta didik.

2. Memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan.
3. Menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa.
4. Sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
5. Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggungjawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Apabila penjelasan di atas dicermati secara lebih seksama, maka pada hakikatnya ada dua tujuan pembelajaran sejarah yaitu: tujuan yang bersifat ilmiah akademik sebagaimana disajikan dalam pendidikan profesional di perguruan tinggi, dan tujuan pragmatis yang digunakan sebagai

sarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

C. Nilai-Nilai Karakter Pelaku Sejarah

Dalam kajian-kajian sosial budaya manusia sering dibedakan dengan makhluk lainnya. Manusia disebut sebagai makhluk paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk lainnya, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Manusia sejak dilahirkan ke dunia ini telah dibekali potensi kodrat berupa cipta, rasa, dan karsa.

Cipta yang dimiliki oleh manusia merupakan kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan tentang nilai kebenaran. Rasa merupakan kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan tentang nilai keindahan (estetika). Sementara karsa adalah kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan nilai kebaikan/kebajikan.

Dengan cipta, rasa, dan karsa sebagai potensi yang dimiliki oleh manusia inilah, sehingga manusia selalu terdorong untuk ingin tahu tentang nilai-nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan yang terkandung dalam segala sesuatu yang ada.

Karakter sesungguhnya istilah lain dari *personality*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan watak atau jati diri. Watak sejatinya

merupakan sifat alami individu yang direfleksikan dalam pola tingkah laku yang baik dan terpuji dalam merespon situasi. Thomas Lickona (1992) menyebutkan ada tiga komponen karakter yang baik seperti pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*action moral*).

Apabila dikaitkan dengan nilai-nilai karakter pelaku sejarah, maka akan muncul pertanyaan buat apa belajar sejarah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka harus diingat apa kegunaan dari sejarah. Kuntowijoyo (1995:19-34) menjelaskan tentang kegunaan sejarah yaitu berguna secara intrinsik dan ekstrinsik atau *liberal education*. Guna sejarah secara intrinsik adalah bertalian dengan ilmu sejarah sendiri dan profesi. Sementara guna sejarah secara ekstrinsik adalah bertalian dengan pendidikan moral, karakter, kebijakan perubahan, ilmu bantu, rujukan dan bukti.

Dalam ilmu sejarah ada beberapa nilai baik dan tinggi untuk ditanamkan atau dikembangkan dalam rangka pendidikan nilai pada peserta didik atau generasi penerus bangsa. Nilai-nilai yang dimaksud seperti: rasa nasionalisme, jiwa patriotisme, rasa cinta tanah air, keteladanan yaitu rela berkorban tanpa pamerih.

D. Permasalahan Ilmu Sejarah dalam Pengajaran Sejarah.

Mencermati apa yang disampaikan sejarawan Hamid Hasan di atas, bahwa pendidikan sejarah mengandung dua makna esensial yaitu sejarah sebagai mata pelajaran dan sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai mata pelajaran tentu mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Sejarah sebagai ilmu harus dipadukan dalam konsep yang jelas tanpa mengorbankan prinsip-prinsip salah satu atau dari keduanya. Hal ini sangat penting untuk menghilangkan kekhawatiran tentang subyektifitas sejarah dalam pembelajaran sejarah tidak mengorbankan ilmu sejarah.

Hal senada juga diungkapkan oleh sejarawan Taufik Abdullah (1996:8) yang mengatakan bahwa sejarah sebagai alat pemupuk ideologi, betapapun luhurnya mempunyai resiko yang bisa meniadakan validitas dari apa yang akan disampaikan.

Pemisahan kurikulum antara sejarah kognitif (pengetahuan) dengan yang afektif (perasaan) yang pernah dilakukan, bukan saja artifisial, tetapi juga memperlihatkan kemandulan dalam pemikiran kesejarahan. Seakan-akan sejarah yang diketahui tidak bertolak dari keingintahuan yang subyektif, demi didapatkan kearifan yang afektif.

Pakar pendidikan sejarah maupun sejarawan memiliki pandangan yang hampir sama berkenaan dengan fenomena pembelajaran sejarah yang ada di Indonesia. Pembelajaran sejarah di Indonesia masih mengalami masalah dalam pembelajaran seperti masalah model pembelajaran sejarah, kurikulum sejarah, materi dan buku ajar, dan profesionalisme guru sejarah.

Permasalahan dalam pembelajaran sejarah, adalah kenyataan bahwa pembelajaran sejarah masih jauh dari harapan untuk memungkinkan peserta didik melihat relevansinya dengan kehidupan masa kini dan masa depan. Pembelajaran sejarah dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, cenderung hanya menampilkan fakta-fakta sejarah sebagai materi utama. Akibatnya pendidikan sejarah terasa kering, kurang menarik, membosankan, dan tidak memberi ruang kebebasan kepada peserta didik untuk mencoba menggali makna dari sebuah peristiwa sejarah.

Strategi paedagogis pembelajaran sejarah masih dinilai lemah. Materi sejarah yang diajarkan di sekolah masih berkutat pada pendekatan *chronicle* dan cenderung menuntut anak agar mampu menghafal suatu peristiwa (Taufik Abdullah, 2017). Dalam kesempatan ini peserta didik tidak

dibiasakan untuk mengartikan dan memaknai sebuah peristiwa, sehingga dengan demikian mereka akan dapat memahami dinamika suatu perubahan.

Sistem pembelajaran sejarah yang telah mengakar dan sulit dirubah, seperti model pembelajaran yang bersifat satu arah dengan menempatkan guru sebagai sumber pengetahuan utama. Artinya bahwa dalam proses pembelajaran guru dijadikan satu-satunya sumber pengetahuan (guru centris).

Pembelajaran seperti ini cenderung mengabaikan peran peserta didik sebagai pelaku sejarah jamannya. Pengalaman yang telah dimiliki peserta didik sebelumnya yang berasal dari lingkungan sosialnya cenderung tidak dijadikan sebagai bahan pembelajaran di kelas. Pembelajaran seperti ini cenderung menempatkan peserta didik sebagai peserta pembelajaran sejarah yang pasif.

Sebagaimana sudah dipahami, bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen yang dijadikan sebagai acuan untuk terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan rencana tertulis dan dilaksanakan dalam suatu proses pendidikan guna mengembangkan potensi peserta didik menjadi lebih berkualitas. Kurikulum biasanya memuat komponen-komponen seperti:

tujuan, konten, proses, dan asesmen hasil belajar peserta didik.

Sejak Indonesia merdeka, beberapa kali telah terjadi perubahan kurikulum. Namun materi sejarah yang diberikan dalam kurikulum sering mendapat kritikan dari masyarakat maupun pemerhati sejarah baik dari pemilihannya, teori pengembangannya, dan implementasinya yang seringkali digunakan untuk mendukung kekuasaan (Alfian, 2007:3).

Ketika berbicara permasalahan pendidikan, maka tampak terdapat kecenderungan untuk mengulang pernyataan tentang adanya diskrepansi (kesenjangan) antara harapan dan kenyataan. Artinya bahwa selama ini dunia pendidikan sudah banyak hal yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, namun ternyata belum nampak hasil yang ingin diwujudkan sesuai rencana.

Menurut Wija (2002:1) bahwa setiap kali tidak puas dengan realitas yang dihadapi dalam dunia pendidikan selalu saja yang menjadi sorotan adalah kurikulum yang dianggap kurang/tidak mendukung, karena itu perlu segera dirubah. Hal senada juga diungkapkan oleh Asis Wahab (2002), dan Warman Adam (2003) yang mengatakan bahwa

ketika dunia pendidikan mengalami permasalahan maka yang dipermasalahkan adalah kurikulum.

Kurikulum hampir selalu dijadikan kambing hitam apabila terjadi kekurangberdayaan proses pendidikan. Padahal kurikulum hanyalah salah satu komponen (alat) dari proses pendidikan tersebut. Sesungguhnya masih banyak faktor lain yang ikut menyumbang bahkan lebih menentukan proses pembelajaran, misalnya guru yang akan mengimplementasikan dan buku teks/buku sumber, di samping iklim atau budaya serta sistem yang berlaku pada waktu tersebut.

Masalah profesionalisme guru sejarah juga sering dipertanyakan oleh berbagai kalangan di masyarakat. Masih berkembang kesan, terutama oleh pemegang kebijakan di sekolah bahwa pelajaran sejarah dalam pengajarannya tidak menuntut keprofesian guru. Artinya pelajaran sejarah dapat disampaikan oleh guru yang tidak berlatar belakang pendidikan sejarah. Hal ini adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri.

Akibatnya, guru ketika menyampaikan materi sejarah cenderung mengulang seperti apa yang tertulis di buku, peserta didik tidak diberi kesempatan untuk memaknai peristiwa sejarah. Selain itu, masih banyak sekolah yang memosisikan guru sejarah sebagai orang buangan dan

memandang pelajaran sejarah sekedar sebagai pelengkap.

E. Pendidikan Sejarah sebagai Penguat Pendidikan

Karakter untuk Membangun Masa Depan Bangsa

Pemahaman sejarah perlu dimiliki setiap orang sejak dini agar mereka mengetahui dan memahami makna suatu peristiwa masa lampau. Melalui pemahaman tersebut mereka dapat dijadikan sebagai landasan sikap dalam menghadapi kenyataan pada masa sekarang, serta menentukan masa yang akan datang. Sejarah perlu dipelajari oleh setiap individu sejak dini baik secara formal maupun nonformal.

Keterkaitan individu dengan masyarakat dan bangsanya memerlukan terbentuknya kesadaran betapa pentingnya sejarah, terutama yang berkaitan dengan persoalan seperti: nasionalisme, persatuan, solidaritas, dan integritas nasional. Terwujudnya cita-cita suatu masyarakat atau bangsa sangat ditentukan oleh generasi penerus yang mampu memahami sejarah masyarakat atau bangsanya.

Sejarah juga mengajarkan hal-hal yang penting seperti: keberhasilan dan kegagalan dari pemimpin, hubungan pemimpin dengan masyarakatnya, cara membangun sistem perekonomian masyarakatnya, bentuk-bentuk

pemerintahan dan hal-hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah. Sejarah memberi pengetahuan tentang apa yang memengaruhi kemajuan dan kejatuhan sebuah negara atau sebuah peradaban.

Orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Namun kenyataan bahwa sejarah terus ditulis orang di semua peradaban dan sepanjang waktu. Kenyataan ini menjadi bukti bahwa sejarah ternyata sangat dibutuhkan manusia. Penting untuk dipahami bagaimana sejarah yang diajarkan di sekolah bisa memiliki peran strategis di dalam menanamkan nilai-nilai di dalam diri peserta didik sehingga memiliki kesadaran terhadap eksistensi bangsanya ke depan.

Dalam pembangunan bangsa, pengajaran sejarah memiliki dua fungsi penting. *Pertama*, berfungsi untuk memberi pengetahuan sejarah sebagai kumpulan informasi tentang fakta sejarah yang telah terjadi. *Kedua*, pengajaran sejarah berfungsi menyadarkan peserta didik sehingga mereka memiliki kesadaran akan sejarahnya. Artinya peserta didik harus menyadari bahwa dirinya sesungguhnya juga merupakan bagian dari sejarah jamannya.

Mata pelajaran sejarah sesungguhnya menempati posisi strategis dalam pembentukan

watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pembentukan keperibadian nasional beserta identitas dan jati diri tidak akan terwujud tanpa adanya pengembangan kesadaran sejarah sebagai sumber inspirasi dan aspirasi.

Kontribusi setiap mata pelajaran untuk mengembangkan nilai-nilai yang mendasari pendidikan karakter berbeda satu sama lain. Dalam aspek keteladanan, mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah menyajikan keteladanan yang tidak tertandingi dari mata pelajaran manapun baik dalam banyaknya keteladanan tokoh-tokoh maupun keteladanan dalam ruang dan waktu (Hamid Hasan, 2017).

Setiap peristiwa sejarah dilakukan oleh pelaku sejarah yang berdasarkan pandangan tertentu dinamakan pahlawan dan pada dasarnya pelaku sejarah adalah mereka yang memiliki kualitas keteladanan yang sangat tinggi. Pelaku sejarah dalam posisinya sebagai pemimpin memperlihatkan keteladanan dalam kepemimpinan yang mampu menyebabkan banyak orang percaya dan mendukung cita-cita mulia yang sedang diperjuangkannya.

Pelaku sejarah umumnya memiliki kemampuan dan tingkat kecerdasan tinggi dalam membaca persoalan kehidupan masyarakatnya. Pelaku sejarah mampu membaca situasi atau masalah dan merumuskan masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakatnya menjadi suatu isu atau cita-cita. Mereka mampu menghimpun kekuatan untuk mendukung hasil rumusan tersebut, dan mampu mengkoordinasikan gerakan dalam mencapai cita-cita tersebut, walaupun kadang-kadang upaya yang dilakukan belum mencapai hasil.

Pendukung suatu peristiwa sejarah menunjukkan karakter yang sangat kuat dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan cita-cita bersama. Mereka merasakan suka-duka/pahit getir, kerjasama dan kebersamaan, toleransi terhadap perbedaan, semangat pengorbanan yang tulus ikhlas, dengan disertai tingkat kejujuran yang tinggi.

Tanpa sifat-sifat itu semua, perjuangan mereka akan sia-sia di tengah jalan dan cita-cita bersama tidak mungkin terwujud atau tidak akan pernah menjadi sebuah kenyataan. Walaupun dalam mencapai cita-cita bersama terkadang mengalami kegagalan, namun keteladanan tetap terungkap dalam berbagai perilaku pelaku sejarah

dalam memperjuangkan cita-cita bersama yang mereka bangun.

Dalam upaya tetap menjaga nilai-nilai karakter dalam pembelajaran sejarah, maka buku-buku teks sebagai sumber pembelajaran sejarah perlu diperkaya dengan nilai-nilai yang diteladankan/diwariskan dan dipertunjukkan oleh pelaku sejarah. Apa yang ada dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan tindakan keseharian pelaku sejarah perlu menjadi acuan nilai untuk memperkaya dan menghidupkan narasi suatu peristiwa sejarah.

Narasi yang lebih menonjolkan nama peristiwa, jalannya sebuah peristiwa tanpa menggali pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan tindakan mereka menjadikan narasi sejarah kering dan sulit memperlihatkan keteladanan kepada masyarakat.

Dalam pembelajaran sejarah peranan dan kompetensi guru sejarah sangat penting. Guru sejarah harus mempunyai kemampuan untuk mengajak peserta didik untuk menggali nilai-nilai para pelaku sejarah. Melalui buku teks atau buku sumber, guru dapat mengajak peserta didik menemukan nilai dan keteladanan yang terimplisit di dalam narasi-narasi sejarah tersebut.

Untuk menemukan nilai-nilai itu perlu bimbingan guru. Namun bimbingan oleh guru tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Ketika tingkat kemampuan peserta didik semakin baik dan semakin tinggi apalagi telah mencapai tingkat kemandirian.

Tugas selanjutnya seorang guru sejarah adalah membimbing peserta didik mengapresiasi nilai-nilai yang ada pada pelaku sejarah, mengkaji dan mempraktekan dalam kehidupan kekinian, mengembangkannya sebagai nilai yang telah dimiliki peserta didik, menjadikannya nilai baru yang berpengaruh terhadap cara berpikir, cara bersikap, cara bertuturkata, dan berperilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Perilaku heroik, semangat nasionalisme, dan cinta tanah air yang telah diperjuangkan para pelaku sejarah tidak boleh hanya menjadi pengetahuan hafalan tanpa makna. Nilai-nilai patriotik, cinta tanah air, keteladanan, tanggung jawab, rela berkorban, setia kawan, kesetaraan, toleransi dan yang lainnya harus tumbuh dan hidup pada diri setiap peserta didik. Nilai-nilai seperti ini harus menjadi nilai-nilai yang mendominasi cara berpikir, cara bersikap, cara bertuturkata, dan cara bertindak peserta didik melalui proses pembelajaran sejarah.

Apabila dicermati secara saksama, bahwa pembangunan karakter bangsa melalui jalur pendidikan formal sesungguhnya telah dimulai sejak Taman Kanak-Kanak. Pada jenjang ini, anak-anak sudah mulai diperkenalkan dengan perayaan hari-hari besar nasional seperti Tujuh Belas Agustusan, warna bendera kebangsaan Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu wajib, nama-nama pahlawan bangsa dan sebagainya. Anak-anak pada jenjang ini belum diperkenalkan dengan peristiwa sejarah formal hasil rekonstruksi sejarawan.

Pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI), peserta didik mulai diperkenalkan dengan peristiwa sejarah yang terjadi di sekitarnya dalam kurun waktu/periode tertentu. Sejak pendidikan dasar, peserta didik mulai diajarkan berpikir kronologis dan apresiasi terhadap perjuangan para pelaku sejarah.

Dalam kaitan ini, pemahaman terhadap sejarah nasional Indonesia terus dikembangkan dengan narasi yang lebih formal, mulai dari peristiwa yang terjadi di sekitarnya selanjutnya mencakup peristiwa-peristiwa penting dalam setiap periode sejarah untuk membangun semangat kebangsaan.

Dengan model pendekatan demikian peserta didik akan dapat mengenal dan memahami keteladanan pelaku sejarah di daerahnya maupun pelaku sejarah di tingkat nasional. Keteladanan para pelaku sejarah menjadi sebuah acuan penting dalam membangun karakter bangsanya. Sebab karakter yang baik dapat dijadikan sebagai modal berharga dan mempertebal komitmen dalam melaksanakan pembangunan bangsanya di masa depan.

Pada jenjang pendidikan menengah pertama dan yang sederajat (SMP/MTs), peserta didik mulai diajarkan untuk memahami keterkaitan antara sejarah lokal, nasional, dan dunia. Kehidupan masa kini dijadikan dasar pijakan untuk mengembangkan sikap kebangsaan. Semangat kebersamaan, kemampuan berpikir kronologis dan kausalita yang lebih mendalam, kerjasama dalam semangat kolaboratif untuk membangun kemampuan komunikasi yang lebih efektif.

Dalam membangun komunikasi semangat toleransi dan kreativitas dikembangkan. Keteladanan para pelaku sejarah diperdalam dan dikembangkan dalam praktik kehidupan diri peserta didik, kelompok, dan masyarakatnya. Peserta didik diberi kesempatan mengidentifikasi perilaku para pelaku sejarah. Peserta didik diberi

kesempatan menilai contoh yang baik atau yang kurang baik dari pelaku sejarah. Perilaku terpuji/positif dapat mereka teruskan sehingga berkontribusi terhadap pembangunan kehidupan kebangsaan, sementara yang kurang baik/negatif mereka rubah menjadi perilaku positif masa kini.

Pada jenjang pendidikan menengah umum maupun kejuruan (SMA/MA/MAK), peserta didik diajarkan untuk mengevaluasi perilaku para pelaku sejarah dengan kemampuan berpikir kritis. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi pola pikir/gagasan, perkataan, dan perilaku para pelaku sejarah dalam perjuangan membangun kehidupan kebangsaan.

Perjuangan dalam membangun kehidupan kebangsaan yang dilakukan para pelaku sejarah dievaluasi dengan kemampuan berpikir kritis untuk menciptakan suatu perilaku yang menjadi karakter kehidupan masa kini, untuk mempertebal komitmen membangun bangsanya di masa depan.

Pada jenjang pendidikan ini, peserta didik diajarkan kemampuan berpikir kronologis, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kerjasama, dan kolaborasi serta komunikasi. Cara-cara ini sejatinya telah memberikan kemampuan kokoh kepada setiap peserta didik, sebagai warganegara yang produktif, untuk secara mandiri

mengembangkan karakter dan kemampuan tersebut secara mandiri.

Dengan modal itu, mereka sudah siap untuk menjadi warganegara dengan kemampuan individu yang cukup dalam mengembangkan kehidupan dirinya, mengembangkan minat dan potensi dirinya untuk membangun kehidupan kebangsaan yang produktif. Dengan wawasan kebangsaan yang solid dibangun dari pengalaman pelaku sejarah dalam berbagai peristiwa sejarah, baik lokal dan nasional, dalam suatu keperibadian dan karakter yang aktif dan positif membangun kehidupan kebangsaan Indonesia.

Mata pelajaran sejarah pada jenjang pendidikan ini ditekankan kepada kemampuan berpikir dan keterampilan sejarah dalam bertindak sebagai warganegara. Kemampuan berpikir sejarah akan memberikan dasar kuat bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis sehingga mereka mampu melakukan evaluasi terhadap sumber dan informasi yang mereka terima dari sumber manapun untuk mendapatkan informasi yang sah dan terpercaya (Hamid, 2017).

Kemampuan berpikir sejarah yang dimiliki peserta didik dapat dijadikan dasar bagi mereka untuk mengembangkan berbagai alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi dalam hidup

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemampuan ini tidak semata untuk dirinya sendiri, namun juga bagikeluarga, masyarakat, dan bangsanya berdasarkan analisis hukum sebab-akibat (kausalita) dan kronologis suatu peristiwa sejarah.

Pembelajaran sejarah dapat dikatakan sebagai suatu proses kegiatan untuk memotivasi dan merangsang peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan sejarah. Pengetahuan itu tidak cukup hanya diketahui, namun peserta didik didorong agar menghayati nilai-nilai kemanusiaan dan nilai historis suatu peristiwa. Melalui kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membawa perubahan tingkah laku dan menumbuhkan kesadaran di kalangan peserta didik akan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan sejarah.

Dalam kaitan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembelajaran sejarah bermakna strategis. Pembelajaran sejarah adalah suatu proses untuk membantu mengembangkan potensi dan keberibadian peserta didik melalui pesan-pesan sejarah agar menjadi warga bangsa yang arif dan bermartabat.

Pembelajaran sejarah akan mengembangkan aktivitas peserta didik untuk mengkaji perbagai peristiwa untuk dipahami dan diinternalisasikan

kepada dirinya sehingga melahirkan contoh untuk bersikap dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat.

Bila dicermati secara lebih mendalam, bahwa setiap peristiwa sejarah di dalamnya terimplisit pesan-pesan terkait dengan nilai-nilai kepahlawanan, seperti: keteladanan, rela berkorban, cinta tanah air, toleransi, kerjasama dan kebersamaan, kemerdekaan, kesetaraan, kesetiakawanan, nasionalisme, patriotisme, dan lain-lain. Nilai-nilai ini dapat digali dan dikembangkan melalui pembelajaran sejarah yang bermakna.

Dalam kaitan dengan pendidikan karakter peranan pendidikan sejarah tidak bisa dikesampingkan. Sejarah mengajarkan nilai-nilai nasionalisme. Narasi sejarah dapat berupa dokumen tertulis, situs atau lanskap budaya maupun peninggalan benda-benda bersejarah. Narasi sejarah tersebut, apabila ditelusuri dan dikaji lebih dalam dapat menumbuhkembangkan rasa patriotisme di kalangan peserta didik terhadap masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Sejarah telah mengajarkan untuk mencontoh nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Prinsip “sekali merdeka tetap merdeka” dapat

menginspirasi mereka untuk secara terus menerus berjuang untuk mengusir penjajah. Dalam kaitan ini, pendidikan sejarah dapat mengedukasi dalam pembentukan karakter peserta didik.

Belajar dari dokumen, situs atau lanskap budaya, dan benda-benda peninggalan masa lalu dapat mendorong peserta didik lebih giat melakukan kajian. Dengan penelitian mereka dapat mengungkap makna dari peristiwa masa lalu dan dapat mengetahui pesan yang ada di balik masa lalu tersebut. Pendidikan sejarah dapat menanamkan jiwa disiplin dan etos kerja yang tinggi.

Belajar sejarah berarti belajar menghargai peristiwa masa lalu. Sebab melalui pembelajaran sejarah peserta didik dilatih untuk memiliki daya imajinasi kuat untuk merekonstruksi peristiwa sejarah di masa lalu. Pengalaman masa lalu mereka rekonstruksi menjadi pengalaman masa kini untuk dijadikan sebagai modal dalam pembangunan bangsanya di masa-masa mendatang.

F. Simpulan

1. Derasnya arus budaya global masuk ke berbagai wilayah tidak mungkin dihindari, potensial menimbulkan seseorang mengalami dislokasi dan disorientasi,

disebabkan adanya ledakan kultural yang seringkali mengejutkan. Perubahan sosial-budaya yang begitu cepat membutuhkan keperibadian yang tangguh. Suatu peribadi yang mempunyai pijakan yang kuat dan orientasi yang jelas. Salah satu alternatif untuk mengatasi itu adalah memahami akar sejarah bangsanya.

2. Pendidikan sejarah sebagai penguat karakter dalam membangun masa depan bangsa, karena setiap peristiwa sejarah selalu terimplikasi makna di baliknya. Pendidikan sejarah perlu mentranfer nilai-nilai etik dan moral yang mendasari cara berpikir, bertuturkata, bersikap, dan berperilaku seseorang untuk terciptanya keharmonisan kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa dalam membangun perdamaian, toleransi, dan kesediaan menerima perbedaan. Sejarah mengandung nilai-nilai pendidikan, dapat mengajak generasi berikutnya mengambil ikhmah dari pengalaman nenek moyangnya untuk membangun masa depan bangsanya.
3. Pendidikan sejarah dalam kaitannya dengan pendidikan masa kini, di samping mampu membangkitkan kesadaran sejarah, juga proses rasionalisasi serta melepaskan

pemikiran mitologis. Sejarah yang antropocentris menempatkan peran manusia sebagai pelaku dalam proses sejarah. Sudah barang tentu pengajaran sejarah membudayakan pada diri peserta didik perspektif sejarah yang memberi kemampuan untuk melihat bahwa segala sesuatu adalah produksi dari masa lampau.

4. Eksistensi bangsa Indonesia mutlak harus dipertahankan di tengah-tengah. Pembangunan karakter bangsa (*national character building*) menjadi alternatif dalam mewujudkan generasi bangsa yang memahami jati diri bangsanya secara komprehensif. Salah satu upaya pembangunan karakter bangsa dapat dilakukan melalui pendidikan sejarah yang mulai diberikan sejak pendidikan pra sekolah. Pendidikan sejarah diharapkan dapat memberi wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode dalam upaya pembentukan sikap dan perilaku peserta didik.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. (2017). *Pembelajaran Sejarah yang Reflektif dan Inspiratif*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Kongres Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah (APPS). Medan, 13 – 15 Juli 2017.
- Amid Hasan. (2017). *Pendidikan Sejarah untuk Kehidupan Berbangsa dan Masa Depan Bangsa*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Kongres Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah (APPS). Medan, 13 – 15 Juli 2017.
- Dewantara, Ki Hajar. (2004). *Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Kartodirdjo, Sartono. (1988). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Pusat antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada.
- Lickona, Thomas. (1992). *Educating for Character. How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York A Bantam Book.
- Wahab, Asis. (2002). *Guru Profesional dan PIPS yang Kuat, Prasyarat bagi Keberhasilan Implementasi Kurikulum Sekolah Berbasis Kompetensi*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

- Wija, I Gde. (2002). *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Strategi Pengembangan Kurikulum Baru Pendidikan IPS di LPTK*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Fakultas Pendidikan IPS IKIP Negeri Singaraja.
- Yusuf, Dede. (2011). *Permasalahan Pembelajaran Sejarah di Indonesia*. Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia.

BAB VI
PANCASILA SUMBER PENDIDIKAN
KARAKTER
DI TENGAH ARUS GLOBALISASI

I. Pendahuluan

Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sesungguhnya nilai-nilai tersebut sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, seperti tumbuh dan berkembangnya kepercayaan terhadap Tuhan, budaya musyawarah, gotong royong dan yang lainnya. Nilai-nilai ini kemudian digali dan dirumuskan menjadi suatu tatanan nilai dan norma yang lebih dikenal dengan Pancasila. Perumusan Pancasila mempunyai sejarah panjang sampai pada akhirnya dijadikan sebagai akta pendirian Negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan. Pancasila di samping sebagai dasar, dan ideologi juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang mampu memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam menata kehidupan lahir batin.

Pancasila yang diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan keberibadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembelajaran pancasila melalui jalur pendidikan formal dan nonformal menjadi sangat penting, mengingat pancasila merupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa di dalam pancasila terdapat jiwa yang luhur, nilai-nilai luhur, dan sarat dengan ajaran moralitas.

Usaha untuk menjadikan Pancasila sebagai kenyataan hidup bukannya tanpa tantangan dan gangguan. Tantangan dan gangguan itu datang dari dalam tubuh bangsa sendiri maupun dari luar. Tantangan dari dalam yaitu ada pihak-pihak yang memiliki pandangan atau kepentingan lain, sehingga mereka meragukan kemampuan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itulah ada keinginan mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

Dewasa ini tantangan yang cukup berat dihadapi Pancasila adalah akibat dari semakin derasnya pengaruh arus budaya global. Masuknya globalisasi dalam kehidupan masyarakat tidak mungkin dapat dihindari. Globalisasi masuk ke berbagai segi kehidupan masyarakat memengaruhi kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Pengaruh yang masuk melalui globalisasi sedikit

demis sedikit mulai menggeser tata nilai yang ada di masyarakat.

Pergeseran nilai ini apabila tidak diimbangi dengan pengendalian diri, hal ini tentu akan dapat mengubah karakter dan jati diri bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mendapat tantangan berat dalam membentengi masyarakat dari pengaruh negatif globalisasi. Apabila pengaruh globalisasi itu tidak diantisipasi secara baik sangat dikhawatirkan nilai-nilai pancasila akan terancam. Terancamnya nilai-nilai pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan kehidupan negara.

Sejak negara ini didirikan hingga era globalisasi dewasa ini, negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara tentulah pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan arus globalisasi yang semakin meningkat. Pancasila harus dijadikan landasan berpikir, bersikap, dan berbuat dalam mengantisipasi arus budaya global.

Di era globalisasi dewasa ini peran pancasila menjadi sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi keberibadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi batasan-batasan di antara negara semakin kabur, sehingga berbagai kebudayaan asing begitu mudahnya masuk dalam

kehidupan masyarakat (Brata, 2012). Bangsa Indonesia wajib mewaspadaai pengaruh yang dapat mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi semestinya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi landasan nilai dan prinsipnya yang terus mengalir bagi setiap generasi. Namun dalam perjalanan pembangunan karakter bangsa yang telah dijalankan sejak lama sering mengalami hambatan-hambatan dengan timbulnya berbagai permasalahan yang melibatkan kehidupan antar umat beragama, kekerasan antar golongan atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

Sejak hadirnya globalisasi, eksistensi pancasila sebagai ideologi kebangsaan telah mengalami tantangan yang cukup hebat. Banyak hal yang akan dapat merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu bangsa Indonesia wajib waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia jangan sampai tergerus. Pancasila harus dijadikan sebagai benteng moral dalam menjawab tantangan yang dibawa oleh globalisasi.

Munculnya permasalahan yang mendera bangsa Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Brata (2016) bahwa tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah semakin derasnya arus paham-paham yang lebih bersandar pada otoritas materi, seperti kapitalisme, liberalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang mengancam keberibadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila.

Dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang santun dan bermoral, namun saat ini bangsa Indonesia menjadi bangsa yang seolah-olah kehilangan jati diri karena pengaruh globalisasi dan modernisasi. Banyak generasi muda seolah-olah kehilangan pegangan ketika berhadapan dengan arus kebudayaan global. Sehingga terkesan hanya sebagai penerima begitu saja apa yang datang dari luar, tanpa peduli akibat yang akan ditimbulkannya.

Dewasa ini keadaan masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, terutama dalam bidang karakter. Dalam dimensi hukum setiap saat disuguhi informasi mengenai kasus-kasus korupsi yang dilakukan mulai dari oknum lembaga tinggi negara, birokrat, kader partai, dan pengusaha. Mulai dari pejabat tinggi sampai Lurah atau Kepala Desa. Tindak korupsi yang mereka lakukan mulai dari berskala kecil sampai bernilai triliunan.

Dunia pendidikan pun tidak luput mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan karena dianggap kurang serius dalam mendidik generasi bangsa. Hal tersebut diindikasikan dengan banyaknya masalah yang menyangkut kasus pelajar seperti: tawuran antarpelajar, kasus kriminal yang melibatkan pelajar, kasus asusila, narkoba, aksi vandalisme, dan sebagainya.

Degradasi moral yang terjadi mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan karakter, sebab permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini bukan hanya persoalan intelektual tetapi juga persoalan moral. Kenyataan ini menunjukkan akan pentingnya pendidikan dan pembangunan karakter demi tegaknya jati diri bangsa dalam percaturan global. Landasan utama dalam pembangunan karakter bangsa adalah Pancasila. Atas dasar itulah menjadikan Pancasila sebagai sumber pendidikan karakter di tengah arus kebudayaan global menjadi penting dan sangat strategis.

II. Pendidikan Karakter

Pendidikan sesungguhnya merupakan proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan

merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan semata, tetapi lebih luas lagi yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturasi dan sosialisasi). Atas dasar itu maka anak harus mendapat pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan.

Dimensi kemanusiaan yang dimaksud sekurang-kurangnya menyangkut tiga hal paling dasar, seperti: 1) kognitif, yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) afektif, yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan memiliki keberibadian yang unggul; dan 3) psikomotorik, tercermin pada kemampuan untuk mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Dalam membangun negara dan bangsa yang lebih bermartabat dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang demikian, pendidikan menempati posisi yang sangat strategis. Kenyataan ini sejalan dengan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3, disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2005:506) karakter diartikan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain. Sementara itu Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (2010:2) menyatakan bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Di dalam buku Pedoman yang disusun oleh Pusat Kurikulum tentang pengembangan pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (2010) karakter didefinisikan sebagai suatu moral *excellence* atau akhlak yang dibangun di atas berbagai kebijakan (*virtues*) yang pada gilirannya hanya memiliki makna ketika dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam budaya (bangsa).

Thomas Lickona (1992) menyebutkan bahwa pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya

untuk membentuk keperibadian seseorang melalui pendidikan yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang berupa tingkah laku yang baik, jujur, bertanggungjawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan lain sebagainya.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang karakter di atas dapat disimpulkan bahwa karakter itu sesungguhnya berkaitan dengan kekuatan moral, artinya orang yang berkarakter adalah orang yang memiliki kualitas moral positif. Atas dasar itu, pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan (sekolah), dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

Empat pilar kebangsaan (Proklamasi, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI) harus menjadi dasar pembangunan karakter bangsa, sehingga seluruh nilai budaya yang dianut oleh setiap etnis harus mampu memperkokoh keempat pilar tersebut secara holistik dan integral. Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan pandangan hidup

bangsa telah mencakup seluruh kesadaran berbangsa dan bernegara.

Karakter bangsa yang didasari ajaran Pancasila seperti: 1) bangsa yang religius, menghormati agama lain; 2) sadar dan taat hukum, berbudi pekerti luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; 3) menghargai perbedaan, kesederajatan, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan; 4) demokratis, membangun kerjasama dengan orang lain, mendengar dan menghargai pendapat orang lain; 5) memiliki simpati dan empati sosial, serta komitmen moral untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam membangun sekaligus meningkatkan Sumber Daya manusia, sebab kualitas karakter bangsa sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan karakter dapat dilakukan melalui tri pusat pendidikan, seperti melalui pendidikan informal, formal, dan nonformal. Karena demikian pentingnya pembentukan karakter, maka pendidikan karakter harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

III. Globalisasi

Globalisasi merupakan sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarmanusia dan antarnegara di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain yang menyebabkan batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit dan kabur.

Dengan kata lain, globalisasi merupakan suatu proses dimana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, terkait, tergantung, dan saling memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara.

Globalisasi dengan berbagai bentuk dan caranya berlangsung hingga jauh dan telah masuk ke sudut-sudut ruang dan tempat di seluruh pelosok negeri karena hadirnya industri, investasi individu, dan informasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Arjun Appadurai bahwa arus kebudayaan global (*global cultural flow*) dapat diketahui, yakni dengan memperhatikan hubungan antara lima komponen dari ciri-ciri kebudayaan global, yaitu: (a) *ethnoscape*, yaitu perpindahan penduduk atau orang dari suatu negara ke negara lain; (b) *technoscape*, yaitu arus teknologi yang mengalir begitu cepat dan tidak mengenal batas negara; (c) *mediascape*, media yang dapat menyebarkan informasi ke berbagai belahan dunia; (d) *Finanscape*,

yakni aspek finansial atau uang yang sulit diprediksi pada era globalisasi; dan (e) *ideoscape*, yaitu komponen yang terkait dengan masalah politik seperti kebebasan, demokrasi, kedaulatan, kesejahteraan, dan hak seseorang (Ritzer dan Goodman, 2011:598).

Dengan adanya globalisasi permasalahan yang muncul menjadi lebih rumit dan kompleks. Kondisi ini membawa dampak positif sekaligus dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Akibat globalisasi, kebudayaan barat yang lebih mengedepankan rasionalitas melahirkan corak kehidupan yang berorientasi materialistik-kapitalis, kesenangan (edonisme), sikap menerabas (pragmatisme), kehidupan serba bebas (liberalisme) berjumpa dengan budaya timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan spiritualitas keagamaan. Kenyataan ini merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini (Brata, 2015).

IV. Pancasila Sumber Pendidikan Karakter di

Tengah Arus Globalisasi

A. Pancasila sebagai Sumber Pendidikan Karakter

Penguatan karakter menjadi salah satu program prioritas Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden

Jusuf Kala. Dalam Nawa Cita disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa. Atas dasar itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa melalui gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digulirkan sejak tahun 2016.

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter sebagai fondasi dan ruh utama pendidikan merupakan sebuah gerakan agar pendidikan nasional kembali memperhatikan empat dimensi pendidikan yang dapat dilakukan secara utuh, menyeluruh, dan serentak. Integrasi proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah dapat dilaksanakan dengan berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan. Keempat dimensi pendidikan yang dimaksud meliputi olah pikir (literasi), olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), dan olah raga (kinestetik).

Berdasarkan taksonomi Bloom dalam bukunya yang sangat terkenal "*Taxonomy of Educational Objectives, Handbook 1: Cognitive Domain*" menggambarkan bahwa terdapat tiga elemen pokok dalam pendidikan meliputi aspek *affective*,

cognitive, dan *psychomotoric*. Aspek kognitif meliputi kemampuan peserta didik dalam menyampaikan kembali ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui tahapan bagaimana caranya memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi hasil dari pembelajaran.

Aspek afektif dikaitkan dengan bagaimana sikap dan cara peserta didik menilai dalam menerima ilmu pengetahuan yang diperoleh, sementara aspek psikomotor merupakan kompetensi dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh pendidik. Namun dalam praktiknya teori taksonomi Bloom ini belum menunjukkan keseimbangan di antara ketiganya.

Atas dasar pertimbangan ketidak adanya keseimbangan di antara ketiganya ini kemungkinan yang dijadikan pertimbangan oleh pemimpin bangsa ini melalui program kerja “nawa citanya”, bahwa dalam mendidik budaya dan karakter bangsanya harus dikembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan olah pikir (literasi), olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), dan olah raga (kinestetik).

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dapat menjadi pintu masuk untuk lebih mengefektifkan bagaimana nilai-nilai luhur

(kearifan lokal) yang dimiliki oleh bangsa ini dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya oleh peserta didik.

PPK dapat mendorong sinergi tiga pusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) agar dapat membentuk suatu ekosistem pendidikan. Dengan harapan agar tri pusat pendidikan ini dapat bersinergi untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Dalam konteks ini, tentu bukan pendidikan yang memanfaatkan Pancasila sebagai gambaran umum, tanpa pemahaman secara praktis. Pancasila harus menjadi pedoman praktis dalam interaksi dan komunikasi sosial. Pancasila dapat direkonstruksi menjadi bahan yang menarik dipelajari, untuk dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu Pancasila dapat dijadikan sebagai basis pendidikan karakter yang khas di Indonesia, dengan fokus keberagaman, toleransi, kesederajatan, dan yang berkeadilan sosial.

Keragaman nilai dalam Pancasila yang merupakan cerminan dari keragaman etnis dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, harus dijadikan sebagai modal dasar pendidikan karakter. Sesungguhnya bangsa ini tidak perlu lagi mencari-

cari sumber, bentuk, pola atau model pendidikan karakter yang lain, karena basis kekuatan karakter bangsa sudah dimiliki sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia, yang sudah mengkristal dalam Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penyelenggaraan negara. Fungsi ini sesungguhnya telah diimplementasikan dalam UUD 1945 dan telah dijadikan sebagai sumber tertib hukum tertinggi di negara ini. Fungsi Pancasila dalam tata hukum di Indonesia adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila harus menjiwai segala peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Artinya bahwa segala produk perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya memosisikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman diberbagai kegiatan kehidupan untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Atas dasar itu maka semua pikiran, perkataan, sikap, dan perilaku setiap individu harus dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Di samping itu Pancasila bagi bangsa Indonesia harus menjadi inspirasi untuk

memperkuat jati diri dalam perjuangan di masa-masa yang akan datang.

Pancasila sebagai ideologi negara mempunyai arti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi sesuatu yang didambakan dan dicita-citakan dalam kehidupan nyata. Ideologi Pancasila di samping memuat gambaran tentang kehidupan yang dicita-citakan juga mengandung langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan. Atas dasar itulah suatu ideologi mengandung dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas (Alfian,1981).

Dimensi realita mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara nyata berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Dimensi realitas telah terkandung dalam ideologi Pancasila karena nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Dimensi idealisme mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan angan-angan semata yang memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau

pengalamannya dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari dengan berbagai dimensinya.

Dimensi idealis merupakan penggambaran sebuah situasi yang baru atau kehidupan yang dicita-citakan, yaitu masyarakat yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, mengutamakan musyawarah, dan berkeadilan.

Dimensi fleksibilitas (kelenturan) mengandung makna bahwa sebuah ideologi harus memiliki keluwesan yang membuka kemungkinan bahkan merangsang pengembangan pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa mengabaikan jati dirinya yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka memberi peluang untuk menerima pemikiran-pemikiran baru tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Pancasila.

Bangsa Indonesia memandang Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang hidup dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini diinternalisasikan, disosialisasikan, dan dienkulturasikan sejak lahir serta berlangsung dari generasi ke generasi, sehingga akhirnya menjadi ciri identitas bangsa Indonesia.

Kenyataan ini menjadikan kedudukan Pancasila begitu penting bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai dasar, ideologi, pandangan hidup, pemersatu bangsa, dan sebagai perekat keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Atas dasar itulah maka Pancasila sudah sepantasnya menjadi rumah bersama bagi bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia, maka Pancasila harus tampak dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai karakter bangsa (*nation character*). Nilai-nilai Pancasila harus tampak dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia dalam mengelola dan menjalani kehidupan sosialnya baik dengan Tuhan, antar sesama, dan lingkungannya. Oleh karena itulah setiap komponen bangsa ini selalu dituntut agar senantiasa menggali dan mengembangkan serta merawat nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karakter Pancasila merupakan sebuah karakter yang berasal dari kristalisasi nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karakter Pancasila adalah karakter ketuhanan yang menanggung nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pendidikan karakter Indonesia harus bermuara pada satu kondisi masyarakat yang berkeadilan, berkerakyatan,

bersatu padu, berperikemanusiaan, dan penuh pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pancasila itu sesungguhnya menggambarkan Indonesia yang plural. Ideologi Pancasila hendaknya menjadi satu panduan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat menjaga keanekaragaman masyarakatnya dengan tetap menjaga toleransi dan kesederajatan terhadap perbedaan itu sendiri. Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara tidak bermaksud menghapuskan perbedaan, melainkan semuanya dirangkum sebagai satu kesatuan dalam kesederajatan sebagaimana dinyatakan dalam sesanti bangsa Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”.

Sebagian besar bangsa ini menyadari kalau tidak ada Pancasila tidak ada republik ini. Atas dasar itulah menjadi kewajiban bangsa Indonesia secara sungguh-sungguh mengusahakan agar Pancasila menjadi kenyataan hidup dalam masyarakat. Jangan ada peluang bagi mereka yang ingin merongrong bahkan ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

Pancasila sebagai dasar utama pembangunan karakter bangsa, yang secara operasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU RI No.17 Tahun 2007) ditegaskan bahwa misi pertama pembangunan

nasional adalah terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi IPTEKS.

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara mengamanatkan bahwa moral Pancasila harus sebagai moral negara, artinya negara wajib tunduk pada moral, negara wajib mengamalkan moral pancasila. Kebijakan yang diambil oleh negara harus sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi pembimbing dalam setiap pengambilan kebijakan negara. Sebagai moral negara Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban moral bagi negara Indonesia.

Bangsa Indonesia harus memperkuat nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, karena nilai itu menjadi landasan spiritual dan moral bagi perjuangan bangsa. Dengan landasan demikian diyakini perjuangan bangsa ini akan lebih ulet dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Kehidupan keagamaan harus dipraktikkan lebih mendalam tidak terbatas sebagai ritual belaka.

Nilai Ketuhanan harus dijadikan acuan dalam pembelajaran beberapa nilai. Misalnya nilai toleransi yang selama ini cenderung hanya menjadi wacana dan sangat sulit untuk dipraktikkan disebabkan karena hanya berhenti pada tataran wacana kognitif seremonial belaka. Pada hal nilai toleransi itu dapat ditunjukkan lewat penghargaan terhadap kepercayaan lain melalui kegiatan-kegiatan bersama.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab harus makin meningkatkan perwujudan hak-hak azasi manusia dan kepedulian sosial. Negara menjamin semua warga negara secara adil dengan membuat Undang-Undang dengan tepat dan melaksanakannya dengan baik. Dalam kaitan ini negara juga harus bekerja bersama negara-negara lain demi membangun dunia ke arah yang lebih baik.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan modal utama dalam membangun relasi sosial. Secara sosiologis, konflik dan integrasi akan selalu ada dalam hidup bermasyarakat. Sebagaimana masyarakat melihat konflik adalah hal tabu sehingga konflik harus disingkirkan. Konflik dalam kaitan ini bukan berarti anarkis, konflik dapat diajarkan melalui proses debat atau adu gagasan. Konflik tidak mungkin dihilangkan, disinilah

pentingnya diperkenalkan dan diajarkan manajemen konflik.

Nilai persatuan Indonesia harus memperlihatkan makin berkembangnya kesempatan bagi setiap daerah untuk mengatur dirinya dengan pelaksanaan otonomi yang luas. Nilai persatuan ini harus menginspirasi makin kuatnya persatuan antardaerah dalam wadah Negara kesatuan republik Indonesia. Semuanya ini ditujukan untuk menghindari gejala disintegrasi bangsa dan sebaliknya dapat memperkuat komitmen persatuan dan kesatuan bangsa.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural atau multikultural, yang sangat kaya akan kearifan lokal. Budaya lokal ini dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi pemahaman persatuan. Karakter persatuan yang mendasar yaitu cinta terhadap tanah air. Memperkenalkan keanekaragaman kebudayaan lokal dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Sehingga kebudayaan masyarakat terjauh, terluar, dan terdepan dapat dengan mudah diketahui.

Sistem demokrasi dewasa ini menunjukkan semakin baik, dengan mengedepankan kebebasan dan kemerdekaan. Namun yang patut diwaspadai jangan sampai kebebasan itu kebablasan. Kalau itu

yang terjadi tentu dapat merugikan masyarakat secara umum. Kebebasan itu jangan menjadi euporia, ketika mereka merayakan kebebasan bukan berarti mereka dapat sebeb-bebasnya tanpa menghormati kebebasan yang lain. Oleh karena itu kebebasan itu perlu diatur, sehingga tidak berbenturan dengan kebebasan yang lainnya.

Nilai demokrasi yang paling dasar adalah taat asas, sesuai dengan prosedur, dan menghargai martabat orang lain sesuai hati nuraninya. Nilai ini sesungguhnya bukan untuk mengajak atau memengaruhi orang menjadi pribadi yang semata patuh, namun mengajak mereka menjadi pribadi yang taat. Taat merupakan bagian dari disiplin yang dapat dipraktikkan dalam latihan disiplin diri untuk menghargai proses yang melibatkan orang lain.

Nilai keadilan sosial masih perlu diperjuangkan untuk diwujudkan, sehingga setiap individu, setiap lapisan masyarakat dapat menikmati keadilan itu sendiri. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan, tidak ada penghinaan atau merendahkan yang lain, semuanya bahagia, cukup sandang dan pangan.

Dalam keadilan sosial sesungguhnya tertanam nilai kepekaan sosial yang sangat mendasar.

Nilai dari sila ini, bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sudah seharusnya tertanam dalam jati diri setiap warga bangsa Indonesia. Dalam menghadapi tantangan arus globalisasi, bangsa Indonesia harus melestarikan dan membudayakan nilai-nilai luhur Pancasila dengan cara mendalami, mengkaji, membicarakan, dan menerapkan nilai-nilai mulia Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

B. Pancasila dalam Pusaran Arus Globalisasi

Sejak negara Indonesia dirikan oleh tokoh-tokoh pejuang bangsa hingga dewasa ini Republik Indonesia tercinta masih tetap berdiri kokoh. Republik tercinta ini sejak awal berdirinya senantiasa mengalami ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan dari berbagai arah dengan derajat bahaya yang begitu tinggi, namun semuanya dapat diatasi dengan baik karena Pancasila. Bangsa ini bersyukur memiliki Pancasila yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang jelas untuk menetapkan arah perjuangan ke depan,

terutama ketika menghadapi tantangan arus globalisasi.

Presiden pertama RI, Ir Soekarno pernah mengatakan bahwa tugas berat untuk mengisi kemerdekaan adalah membangun karakter bangsa. Apabila pembangunan karakter bangsa ini tidak berhasil, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli (Soedarsono, 2009:1). Pernyataan tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan pembangunan karakter demi tegaknya jati diri bangsa agar dapat bersaing dalam percaturan global.

Pandangan di atas sesungguhnya memberi gambaran bahwa pendidikan karakter bangsa ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar itu, maka sudah selayaknya apabila pendidikan dan pembangunan karakter bangsa Indonesia memiliki landasan yang kuat. Landasan utama yang mendasari adalah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Harus diakui bahwa Pancasila di era Orde Baru runtuh dan sampai sekarang masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Kenyataan ini disebabkan karena penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dan telah melanggar nilai-nilai dari Pancasila. Penyimpangan terbesar

dan yang paling sulit untuk dihilangkan adalah masalah KKN (korupsi, Kolusi, dan nepotisme).

Masalah korupsi seolah-olah sudah menjadi penyakit mematikan yang belum ditemukan obat mujarab untuk menyembuhkannya. Pancasila yang sejak dahulu sudah dijadikan sebagai dasar negara, bahkan oleh nenek moyang telah dijadikan sebagai pandangan hidup sudah seharusnya dijadikan pedoman oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada hakikatnya globalisasi adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang pada akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Fenomena globalisasi tidak selalu memberi dampak positif, berbagai dampak negatif terjadi disebabkan karena manusia kurang bisa memfilter dampak dari globalisasi itu sendiri.

Ideoscapes adalah komponen yang terkait dengan masalah politik, seperti kebebasan, demokrasi, kedaulatan, kesejahteraan dan hak seseorang (Ritzer dan Goodman, 2011). Sistem demokrasi yang dewasa ini berkembang di tanah air adalah mengarah kepada faham liberalisme. Padahal negara Indonesia seperti ditegaskan dalam

pidato Bung Karno di depan Sidang Umum PBB bahwa Indonesia menganut paham demokrasi Pancasila, yang berasaskan gotong royong, kekeluargaan, serta musyawarah dan mufakat.

Sistem politik yang berkembang dewasa ini cenderung ke arah liberalisme dan semakin menjauh dari sistem politik berdasarkan Pancasila yang seharusnya dibangun dan diwujudkan oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Demokrasi sering dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Hak Azasi Manusia dimaknai dengan boleh berbuat semaunya dan tidak peduli apakah merugikan atau mengganggu hak orang lain. Elit politik tampak hanya memikirkan kepentingan dirinya dan kelompoknya semata.

Ethnoscapes adalah perpindahan penduduk atau orang dari suatu negara ke negara lain, seperti wisatawan, imigran, pengungsi, dan pencari kerja yang menjadi ciri dari kebudayaan global. Pergerakan/perjalanan yang dilakukan karena alasan-alasan yang bersifat praktis dan pragmatis, seperti kebutuhan, mencari dan menemukan sumber kehidupan atau mencari nafkah untuk kelangsungan hidup.

Kehadiran mereka tentu membawa berbagai implikasi, seperti tingkat kepadatan penduduk membawa implikasi pada fasilitas publik.

Kepadatan penduduk juga membawa implikasi terhadap pemanfaatan ruang. Kehadiran mereka ke suatu wilayah tidak dapat dipandang hanya secara fisik semata. Mereka hadir membawa serta kebudayaan mereka, kebiasaan mereka, dan cara hidup mereka.

Technoscapes merupakan konfigurasi global dari teknologi dan fakta bahwa teknologi baik teknologi tinggi maupun rendah, baik yang mekanistik maupun yang informasional kini bergerak dengan kecepatan tinggi melintasi berbagai jenis batasan yang dahulu ada. Teknologi kini mengalir dengan kecepatan tinggi dan tidak mengenal batas negara.

Kemajuan teknologi komunikasi membawa perubahan besar bagi masyarakat. Jaringan komunikasi melalui komputer membuat ruang dan waktu tidak berperan dalam jaringan komunikasi. Kedekatan hubungan antar warga masyarakat tidak digambarkan oleh komunikasi tatap muka, saling mengunjungi tetapi lebih intens berkomunikasi melalui e-mail (*cyberspace*). Surat-menyurat dengan tulisan digantikan melalui komunikasi elektronik atau komputer, kualitas informasi lebih efisien dan efektif dengan jangkauan yang lebih luas.

Mediascapes adalah distribusi kapabilitas elektronik untuk menghasilkan dan menyebarkan

informasi (koran, majalah, televisi, studio pembuat film) yang tersedia untuk kepentingan publik dan swasta. *Mediascapes* mengacu kepada media yang dapat menyebarkan informasi ke berbagai belahan dunia. Hal ini tentu memberikan indikasi bahwa media diasumsikan merujuk pada berbagai institusi atau bisnis dalam menyebarkan informasi dan komunikasi.

Dewasa ini peranan informasi dan komunikasi menjadi sangat penting. Perkembangan teknologi sangat menunjang informasi dan komunikasi yang serba modern, sehingga pesan-pesan maupun informasi yang terjadi di berbagai sudut dunia semakin mudah didapat atau diakses. Kehadiran teknologi membawa perubahan-perubahan dalam hal sikap dan pandangan masyarakat tentang berbagai kehidupan dalam masyarakat. Media informasi dewasa ini berperan besar dalam membentuk budaya citra (*image culture*) dan budaya cita rasa (*taste culture*) adalah gempuran iklan yang menawarkan gaya visual yang kadang-kadang mempesona dan memabukkan.

Financescapes, merupakan aspek finansial atau uang yang sulit diprediksi dalam era globalisasi. Finansial ini melibatkan proses yang dengannya pasar, bursa saham nasional, dan

spekulasi komoditas menggerakkan megamonies melalui batas-batas nasional dengan kecepatan tinggi. Uang benar-benar menjadi panglima dalam kehidupan, tidak memiliki uang seakan-akan tidak dapat berbuat apa-apa.

Dalam KBBI (2001:1232) uang diartikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Secara tradisional uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam pengertian modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya.

Secara sosiologis uang memiliki dua wajah, di satu sisi berwajah normatif dan pada sisi lain berwajah pragmatis. Dalam wajah normatif uang dapat dipandang dari sisi *das sollen* (seharusnya) dan dari segi pragmatis uang dapat dipandang dari sisi *das sein* (kenyataannya). Dalam prakteknya terjadi kesenjangan yang tajam, antara bagaimana

uang seharusnya digunakan tentunya berdasarkan norma-norma sosial dengan uang yang digunakan oleh warga untuk kebutuhan praktis sehari-hari (Nugroho, 2001: xi).

Globalisasi tidak mungkin dihindari oleh bangsa manapun, termasuk Indonesia. Namun yang harus disadari adalah dampak dari globalisasi itu. Globalisasi selalu berwajah ganda, positif dan negati. Dalam kondisi seperti itu, sekali lagi peran Pancasila sebagai filter penyaring, sebagai pandangan hidup dan dasar negara memegang peranan penting. Pancasila akan menilai nilai-nilai mana yang dapat diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan begitu nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas keberibadian bangsa Indonesia.

Di era globalisasi ini peran Pancasila menjadi sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi keberibadian bangsa Indonesia. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi. Dampak positif dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Sementara dampak negatif harus dihindari agar jangan merusak moralitas bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia.

V. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pancasila yang disahkan dan ditetapkan sebagai dasar negara, di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur, ajaran-ajaran moral yang merupakan penjelmaan dari seluruh jiwa manusia Indonesia, dapat dijadikan sumber pendidikan karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk keperibadian generasi bangsa yang berkarakter dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Pendidikan karakter harus menjadi perhatian negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas agar mampu bersaing dalam percaturan global. Atas dasar itu pendidikan karakter merupakan suatu usaha sengaja dari seluruh dimensi kehidupan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal untuk membantu pembentukan karakter secara optimal.
3. Bangsa Indonesia tidak mungkin menghindar dari arus globalisasi. Globalisasi

membawa berbagai dampak positif maupun negatif. Dampak positif diserap, disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, sementara dampak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus dihindari, bila perlu dibuang jauh-jauh, sebab hal itu dapat merusak keberibadian dan jatidiri bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alfian. (1981). *Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia*. Jakarta. Penerbit: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Barker, Chris. (2004). *Cultural Studies Theory and Practice*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Brata, Ida Bagus. (2012). *Komodifikasi Telajakan dalam Era Globalisasi di Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar* (Disertasi). Denpasar: Pascasarjana Universitas Udayana.
- Brata, Ida bagus. (2016). *Kapitalisasi Ruang Terbuka Tradisional sebagai Komoditas*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diselenggarakan oleh LP2M Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Brata, Ida Bagus dan I B. N. Wartha. (2017). "Lahirnya Pancasila sebagai Pemersatu

- Bangsa Indonesia". Dalam *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*. Vol.7 No.1.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 2016. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*.
- Duncan, Hugh Dalziel. (1997). *Sosiologi Uang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaelan. (2004). *Pendidikan Pancasila Proses Reformasi UUD Negara Amandemen 2002 Pancasila sebagai Sistem Filsafat Pancasila sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lickona. Thomas. (1992). *Educating for Character. How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York A Bantam Book.
- Magnis Suseno, Franz. (2003). *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT. Sun.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2011). *Teori Sosiologi Modern (Dialihbahasakan oleh Alimandan)*. Jakarta: Kencana.
- U.U. No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No.17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

U.U. No.12 Tahun 2012, tentang Kurikulum

Pendidikan dapat mengubah suatu masyarakat, maka perlu dikenali pola pembelajaran masyarakat yang dapat menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks ini inovasi kebudayaan dan keribadian yaitu tentang proses bagaimana sebuah kebudayaan diinternalisasikan dan dirubah oleh individu. Implementasi pendidikan sebagai penyesuaian diri dengan masyarakat, lingkungan, dan kebudayaan berlangsung melalui proses. Internalisasi, yaitu proses penerimaan dan menjadikan warisan sosial sebagai isi keperibadian yang dinyatakan dalam perilaku sehari-hari selama hayat di kandung badan. Proses sosialisasi dimulai sejak bayi dilahirkan, berkomunikasi dengan orang-orang dan lingkungan sekitarnya dengan tuntunan nilai, norma, dan aturan yang ada. Enkulturasasi merupakan proses pembudayaan dengan ditata pranata sosial agar menjadi manusia yang berbudaya, beriman, dan takwa kepada tuhan Yang

ISBN 978-602-5872-26-6

